

**POLICY PAPER**

**DI BALIK PIRING GRATIS:  
DEFISIT TATA KELOLA  
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS**

Kajian Satu Tahun Program Makan Bergizi Gratis



# Di Balik Piring Gratis: Defisit Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis

## Kajian Satu Tahun Program Makan Bergizi Gratis

Terbit pertama kali dalam Bahasa Indonesia pada bulan Maret 2026 oleh Nalar Institute.

Jl. Tomat, Ngemplak, Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581, Indonesia

[www.nalarinstitute.com](http://www.nalarinstitute.com)

Kecuali dinyatakan berbeda, seluruh isi laporan ini dilindungi dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0.



Hak Cipta dilindungi secara terbatas.

Penelitian ini dilakukan secara independen oleh Nalar Institute.

### **Tim penulis dan peneliti utama:**

Yanuar Nugroho

Claudia Rosari Dewi

Ani Nur Mujahidah Rasunnah

### **Asisten peneliti:**

Haratua Zosran Abednego

Jose Fernando

### **Penasihat akademis dan penanggung jawab:**

Yanuar Nugroho

Dimas Wisnu Adrianto

### **Penyunting Bahasa Indonesia:**

Anendya Niervana

### **Desain:**

Haniatussa'adah

Cara mengutip naskah ini:

(Nugroho, Y., et al., 2026) - Nugroho, Y., Dewi, CR., Rasunnah, ANM. (2026) Di Balik Piring Gratis: Defisit Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis—Kajian Satu Tahun Program Makan Bergizi Gratis, Yogyakarta: Nalar Institute.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami berikan kepada narasumber yang berkenan untuk membagikan cerita dan pengalaman langsung di lapangan seputar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Meski tidak bisa kami sebut satu per satu untuk alasan keamanan, data yang diberikan sangat berarti bagi penelitian ini.

Semoga hasil penelitian ini dapat membuka ruang dialog dan pertukaran ide bagi masyarakat sipil, akademisi, dan pemerintah, untuk merancang kebijakan yang lebih baik di masa depan. Temuan dari penelitian juga diharapkan mampu menjadi masukan kepada pemerintah untuk memperbaiki tata kelola program Makan Bergizi Gratis sehingga tujuan yang dimaksudkan bisa tercapai.

Tidak luput kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tim Nalar Institute atas segala dukungan yang diberikan selama proses penelitian berlangsung.

# DAFTAR ISI

## 5 | DAFTAR SINGKATAN

## 7 | RINGKASAN EKSEKUTIF

## 8 | PENGANTAR

9 | Latar Belakang

10 | Rumusan Masalah

10 | Batasan Penelitian

10 | Metode Penelitian

## 12 | PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS: KONDISI SAAT INI

13 | Deskripsi Program Makan Bergizi Gratis

13 | Realisasi anggaran untuk program MBG

14 | Realisasi penerima manfaat program MBG di 38 provinsi

## 16 | TATA KELOLA PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

17 | Kerangka regulasi

20 | Kerangka kelembagaan

23 | Mekanisme Transparansi Informasi dan Akuntabilitas

27 | Pendanaan dan insentif

31 | Kapasitas sumber daya manusia

## 37 | EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

38 | Tahap *agenda setting* kebijakan

40 | Tahap formulasi dan perencanaan kebijakan

43 | Tahap implementasi kebijakan

50 | Tahap monitoring dan evaluasi kebijakan

## 53 | DAMPAK IMPLEMENTASI PROGRAM MBG

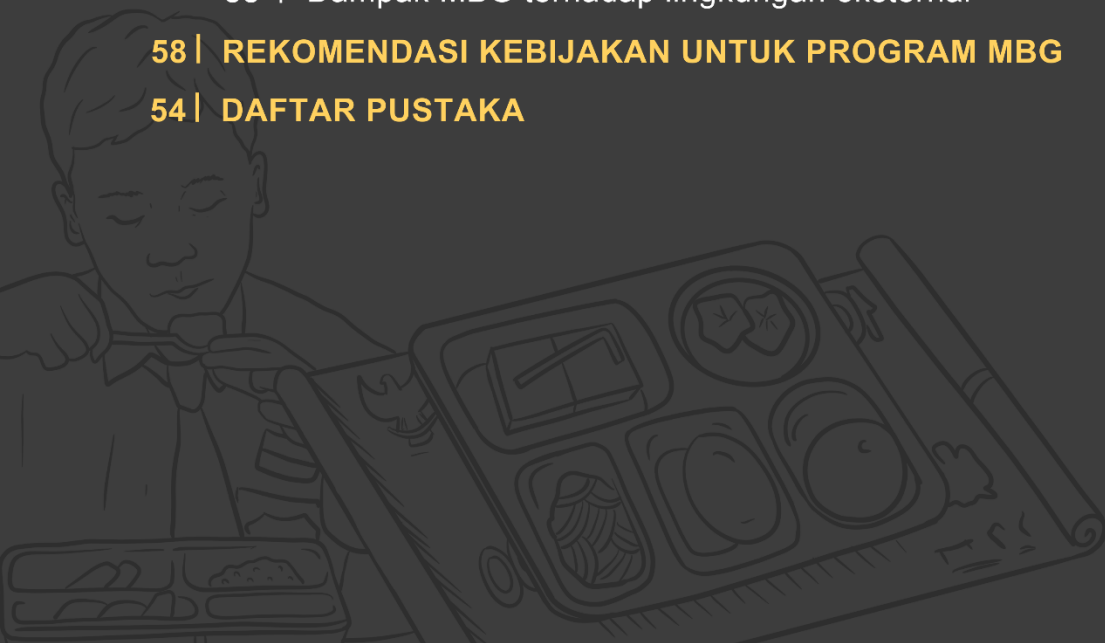
54 | Dampak MBG kepada penerima manfaat

55 | Dampak MBG kepada mitra dan SPPG

55 | Dampak MBG terhadap lingkungan eksternal

## 58 | REKOMENDASI KEBIJAKAN UNTUK PROGRAM MBG

## 54 | DAFTAR PUSTAKA



## DAFTAR SINGKATAN

3T	: Terdepan, Terluar, dan Tertinggal
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ASN	: Aparatur Sipil Negara
Balita	: bawah lima tahun
Bansos	: bantuan sosial
Bapanas	: Badan Pangan Nasional
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BGN	: Badan Gizi Nasional
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMDes	: Badan Usaha Milik Desa
Disdik	: Dinas Pendidikan
DIY	: Daerah Istimewa Yogyakarta
DPP Persagi	: Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Ahli Gizi Indonesia
FGD	: <i>Focus Group Discussion</i> /Diskusi Kelompok Terarah
GHI	: <i>Global Hunger Index</i> /Indeks Kelaparan Global
HACCP	: <i>Hazard Analysis and Critical Control Points</i> /Analisis Bahaya dan Titik Kontrol Kritis
K/L	: Kementerian/Lembaga
Kemenag	: Kementerian Agama
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
Kemendesa & PDT	: Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Kemendikdasmen	: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Kemenkop	: Kementerian Koperasi
KemenUKM	: Kementerian Usaha Kecil Menengah
KLJ	: Kejadian Luar Biasa
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Komcad	: Komponen Cadangan
Komnas	: Komisi Nasional
LHKPN	: Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
MBG	: Makan Bergizi Gratis
MI	: Mililiter (satuan volume cairan)
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i> /Nota kesepahaman
NTT	: Nusa Tenggara Timur
P2G	: Perhimpunan Pendidikan dan Guru
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
Pemda	: Pemerintah Daerah
Perpres	: Peraturan Presiden
Persagi	: Persatuan Ahli Gizi Indonesia
PISA	: <i>Programme for International Student Assessment</i>
POLRI	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
POM	: Pengawas Obat dan Makanan

PPPK	: Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
RAPBN	: Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Satgas	: Satuan Tugas
SD	: Sekolah Dasar
SDM	: Sumber Daya Manusia
SDN	: Sekolah Dasar Negeri
SIPSN	: Sistem Informasi Pengendalian Sampah Nasional
SLHS	: Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SMPN	: Sekolah Menengah Pertama Negeri
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SpGK	: Spesialis Gizi Klinik
SPK	: Surat Perjanjian Kerja
SPM	: Standar Minimal Pelayanan
SPPG	: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi
SPPI	: Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia
TK	: Taman Kanak-Kanak
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UPF	: <i>Ultra-Processed Foods</i> /Makanan Ultra-Proses
UU	: Undang-Undang
VA	: <i>Virtual Account</i> /Akun Virtual
WIB	: Waktu Indonesia Barat
WNI	: Warga Negara Indonesia

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah genap berjalan satu tahun menuai sejumlah kritik sejak awal peluncurannya. Implementasi kebijakan yang terkesan buru-buru dan persiapan yang tidak matang menyebabkan pelaksanaan MBG di lapangan sarat masalah. Melalui analisis tata kelola dan evaluasi kebijakan dengan kerangka siklus kebijakan, kajian ini mendapati beberapa temuan dan merekomendasikan sejumlah langkah perbaikan untuk program ke depan.

### Temuan masalah dalam tata kelola

Tata kelola Makan Bergizi Gratis memiliki permasalahan di setiap aspek, mulai dari regulasi, kelembagaan, transparansi informasi dan akuntabilitas, pendanaan, dan kapasitas sumber daya. Pada aspek **regulasi** terdapat persoalan mendasar yakni ketiadaan regulasi mengenai tata kelola sejak awal peluncuran. Pada aspek **kelembagaan**, sentralisasi program MBG mengakibatkan minimnya pelibatan daerah dalam implementasinya sehingga koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi lemah.

Sementara itu, tindakan represi atas penyebaran informasi dan pertanggungjawaban terkait Kejadian Luar Biasa (KLB) selama pelaksanaan program MBG membuktikan masalah yang serius perihal **transparansi dan akuntabilitas**. MBG juga tidak luput dari permasalahan dalam aspek **pendanaan**, seperti gaji staf Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum dibayar, upaya *mark-up* harga bahan baku oleh mitra, dan harga per porsi yang tidak ideal.

Permasalahan MBG yang lain juga terkait dengan **aspek sumber daya manusia (SDM)**, yakni kekurangan ahli gizi serta SDM dengan kapasitas yang sesuai untuk mengelola program. Persoalan kompetensi SDM ini juga disebabkan oleh sistem rekrutmen yang tidak ideal dan tanpa kontrak resmi.

### Evaluasi kebijakan ditinjau dari siklus kebijakan

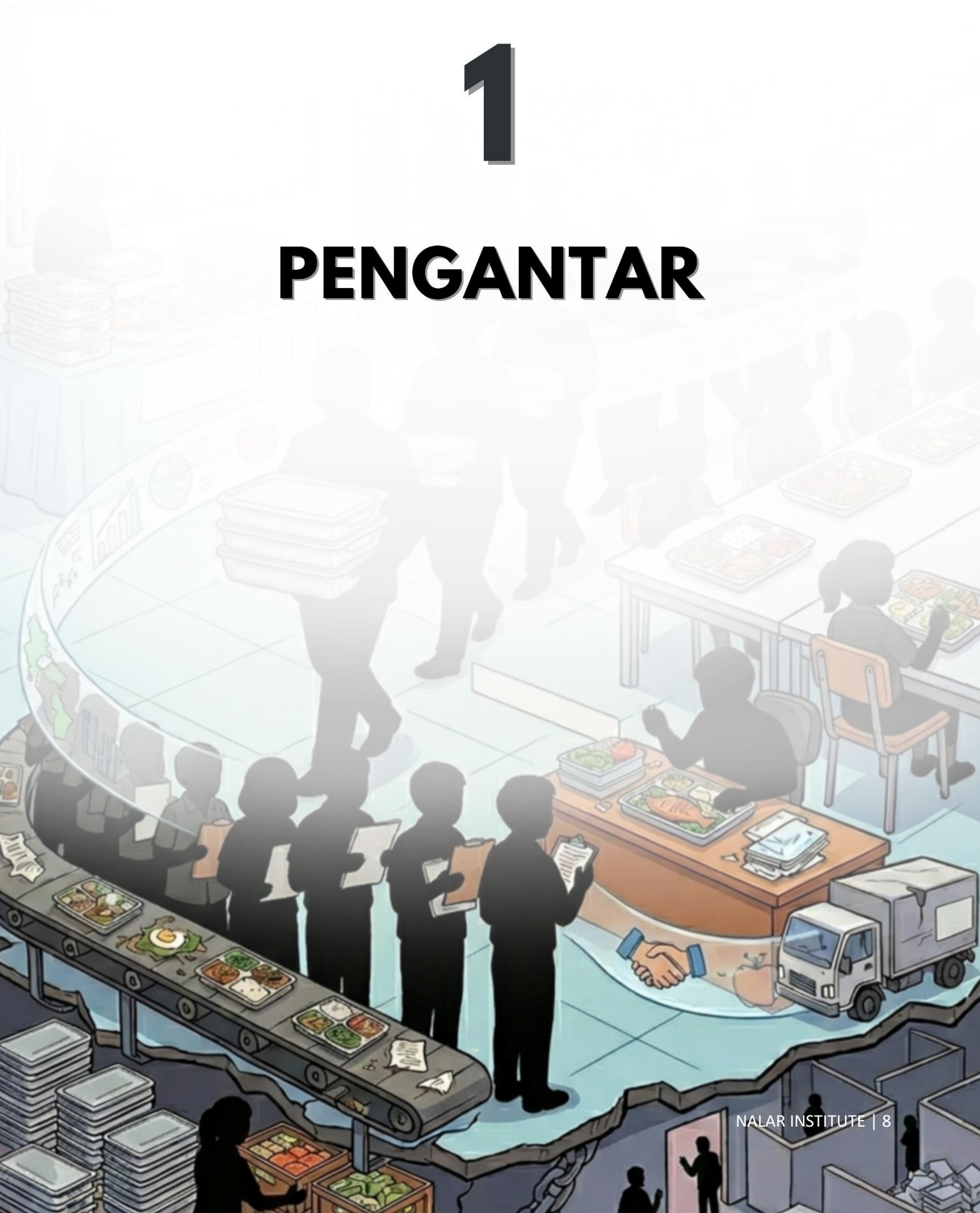
Tata kelola yang buruk memengaruhi proses pembuatan kebijakan mulai dari tahapan *agenda setting*, hingga proses monitoring dan evaluasi. Tahapan **agenda setting** yang menjadi tahap awal sekaligus paling menentukan dalam keseluruhan proses pembuatan kebijakan menunjukkan bahwa program MBG hanya mampu menyentuh sebagian masalah. Tahap **perencanaan dan formulasi kebijakan** mengindikasikan minimnya pelibatan publik termasuk pakar dan direncanakan dengan tergesa-gesa tanpa payung hukum yang kuat. Masalah implementasi yang muncul di lapangan bermuara pada buruknya dimensi tata kelola, yakni kompetensi SDM yang tidak memadai, anggaran per-porsi yang tidak realistis, dan SOP yang tidak ditaati karena lemahnya payung hukum. Pada tahap **monitoring dan evaluasi**—sistem monitoring hingga ke tataran teknis—seperti pengawasan kepatuhan dapur SPPG terhadap SOP tidak berjalan optimal. Selain itu, mekanisme pertanggungjawaban KLB tidak diatur dalam regulasi yang jelas sehingga belum pernah ada evaluasi program MBG yang dilakukan secara komprehensif.

### Rekomendasi kebijakan

Melihat banyaknya permasalahan di semua aspek tata kelola dan tahapan pembuatan kebijakan, penelitian ini menyarankan agar pemerintah mengevaluasi keluaran MBG yang telah berjalan selama satu tahun untuk mengetahui sejauh mana program ini berdampak bagi penerima manfaat. Payung hukum juga perlu diperkuat dengan membuat regulasi turunan di tingkat daerah melalui kolaborasi lintas aktor. Monitoring harus dilakukan secara lebih ketat dan konsisten. Sebagai tambahan, strategi pengendalian sampah makanan dari program MBG mesti dirumuskan secara berkelanjutan. Sampai evaluasi menyeluruh dilakukan, program MBG harus dihentikan sementara. Masyarakat sipil dan penerima manfaat juga perlu terus berkolaborasi untuk mengawasi implementasi program ini.

# 1

# PENGANTAR



# 1. PENGANTAR

## 1.1 Latar Belakang

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan pertama kali oleh Presiden Prabowo pada 6 Januari 2025 dengan pagu awal Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp71 triliun.<sup>1</sup> Semula, program MBG manargetkan 19,47 juta penerima manfaat dengan menysasar peserta didik dari jenjang PAUD hingga SMA/ sederajat, serta balita, ibu hamil dan menyusui.<sup>2</sup>

Sejak awal peluncurannya, MBG menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan, mulai dari akademisi, aktivis, ahli kesehatan, tokoh masyarakat, dan pengamat kebijakan. Masyarakat yang menyambut baik program MBG ini berargumen bahwa program ini dapat meningkatkan gizi anak dan performa akademiknya di sekolah. Pendapat tersebut didasarkan pada pengamatan dan penelitian di berbagai negara yang sudah lama mengimplementasikan kebijakan program makan gratis untuk siswa sekolah, seperti di India, Nigeria, dan Brazil.

Sedangkan sebagian masyarakat lain menilai pesimis. Ini karena implementasi program MBG terkesan buru-buru dan tanpa persiapan matang yang ditunjukkan dari tidak adanya instruksi teknis di level daerah. Implementasi MBG di lapangan juga dinilai bersifat sentralistik dan mengabaikan keragaman pangan lokal tanpa didukung mekanisme akuntabilitas dan transparansi yang kuat pada tataran teknis. Selain itu, penyaluran dengan skema bantuan sosial (bansos) juga berpotensi menjadi lahan subur korupsi, baik di level pemerintah daerah maupun pusat.

Terlepas dari dukungan dan penolakan yang terjadi di masyarakat, program MBG diniatkan untuk mencapai target Indonesia Emas 2045. Kendati demikian, sebagaimana sebuah kebijakan, ada banyak konsekuensi tidak termaksudkan. Dampak paling menonjol yang terjadi selama implementasi MBG adalah kasus keracunan dan ditemukannya makanan basi. Hingga bulan Januari 2026, kasus keracunan MBG masih terjadi di sejumlah daerah. Pemberitaan terakhir dari media massa mengabarkan sepanjang bulan Januari sebanyak hampir 2.000 pelajar mengalami keracunan setelah mengonsumsi MBG.<sup>3</sup> Kasus makanan basi, kurang matang, atau komposisi yang tidak higienis juga peneliti temukan saat wawancara di lapangan.

Semua pihak tentu mengharapkan keberhasilan program MBG yang per-Desember 2025 ini sudah menysasar 49 juta penerima manfaat.<sup>4</sup> Oleh karena itu, evaluasi kebijakan secara komprehensif perlu dilakukan agar konsekuensi tidak termaksudkan, seperti kejadian keracunan makanan dan kasus makanan basi bisa dihentikan. Para ahli juga menganjurkan pemerintah untuk menjalankan alternatif langkah dan saran yang diberikan agar implementasi kebijakan program MBG berjalan dengan lebih baik.

---

<sup>1</sup> "Ini Tiga Skema Penyaluran Makan Bergizi Gratis," *Portal Informasi Indonesia*, diakses pada 20 Maret 2026, <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8750/ini-tiga-skema-penyaluran-makan-bergizi-gratis?lang=1>.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> "Korban Keracunan MBG Sepanjang Januari 2026 Tembus Hampir 2.000 Pelajar, Mengapa Krisis Masih Saja Terjadi?," *BBC News Indonesia*, diakses pada 03 Februari 2026, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cvg5eywd109o>

<sup>4</sup> "Prabowo Sebut MBG Jangkau 49 Juta Penerima: 7 Kali Penduduk Singapura," *CNNIndonesia.com*, diakses pada 03 Januari 2026, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20251206103232-20-1303498/prabowo-sebut-mbg-jangkau-49-juta-penerima-7-kali-penduduk-singapura>

## 1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari sejumlah permasalahan di atas, penelitian ini akan berfokus pada empat pertanyaan utama, yakni:

- 1) Bagaimana implementasi—pendanaan, pengadaan bahan, pemrosesan, hingga distribusi—program Makan Bergizi Gratis di tahun 2025 (tahun pertama program)?
- 2) Bagaimana tata kelola pemerintahan, mulai dari regulasi kebijakan, koordinasi lintas K/L/D, akuntabilitas/transparansi penggunaan dana/sumber daya, aspek pendanaan, dan pengelolaan sumber daya manusia, memengaruhi implementasi program Makan Bergizi Gratis?
- 3) Bagaimana dampak pelaksanaan MBG, baik dampak yang diharapkan maupun yang tak-termaksud (*unintended consequences*)?
- 4) Apa rekomendasi perbaikan tata kelola dan proyeksi keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis?

## 1.3 Batasan Penelitian

Penelitian ini mengambil rentang waktu satu tahun, mulai dari pertama kali implementasi MBG dilakukan, yakni awal Januari 2025 hingga Januari 2026. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan primer. Data sekunder berasal dari pemberitaan media massa (baik media lokal maupun nasional), jurnal ilmiah, laporan penelitian dari organisasi masyarakat sipil (CSO), dokumen dan arsip pemerintah.

Selain sumber sekunder, penelitian ini juga memperoleh data primer yang berasal dari wawancara dan observasi lapangan secara langsung dengan mengunjungi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan sekolah di beberapa daerah. Pada awalnya, penelitian ini berinisiatif mencakup keterwakilan kabupaten/kota di 38 provinsi yang sudah menerima MBG. Namun, keterbatasan sumber daya dan tantangan eksternal seperti tingkat keterbukaan informasi yang tidak sama antarwilayah membuat peneliti kesulitan mengakses data lapangan kota/kabupaten perwakilan provinsi yang sudah menerima MBG. Misalnya, peneliti tidak mendapatkan data yang mewakili wilayah dari Provinsi Jawa Barat meskipun beberapa kota di Jawa Barat sudah menerima program MBG. Hal ini disebabkan oleh terhambatnya izin permohonan wawancara narasumber karena alasan pengambilan data harus mengikuti prosedur dari pusat. Di wilayah lain, peneliti berhasil mewawancarai narasumber di salah satu daerah di Papua Pegunungan dan Nusa Tenggara Timur melalui platform komunikasi video.

Penelitian ini menasar lima kelompok sebagai subjek wawancara, mulai dari unsur sekolah, lembaga, hingga pemerintah. Pertama, orang tua dari siswa penerima MBG. Kedua, guru dan kepala sekolah yang ditugaskan sekolah untuk menangani MBG. Ketiga, pelajar SD/SMP/SMA penerima MBG. Keempat, ketua dan perwakilan staf SPPG, mitra SPPG seperti koperasi atau badan usaha pemasok dapur SPPG. Kelima, Badan Gizi Nasional (BGN).

## 1.4 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pemilihan narasumber untuk diwawancarai sebagai data primer didasarkan pada kajian awal terhadap data sekunder yang diperoleh dari pemberitaan media massa. Beberapa daerah memiliki informasi yang menarik untuk dieksplorasi lebih dalam, misalnya pihak sekolah yang mendapatkan tekanan dari beberapa pihak karena menyebarkan informasi mengenai hidangan MBG yang tidak higienis. Selain itu, beberapa kasus

keracunan tidak dijelaskan lengkap dalam data sekunder (pemberitaan nasional) sehingga perlu ditelusuri lebih jauh. Kasus-kasus dengan data sekunder yang tidak memadai tersebut dijadikan target wawancara. Selain berlandaskan pada pemberitaan di media massa lokal dan nasional, pencarian data sekunder juga bersumber dari informasi yang muncul di platform media sosial seperti X, Instagram, dan YouTube. Selain itu, konten yang berisi informasi mengenai implementasi MBG, yang sengaja diunggah oleh akun pribadi di media sosial juga menjadi data penunjang bagi penelitian ini, tentu setelah melalui proses verifikasi berulang untuk memastikan keabsahannya.

Penelitian ini menggunakan metode analisis wacana (*discourse analysis*) untuk menginterpretasikan temuan, baik dari data sekunder maupun primer. Guna mempertajam analisis, penelitian ini menggunakan kerangka teori siklus kebijakan dan tata kelola dalam Cetak Biru Ekosistem Pengetahuan & Inovasi di Indonesia. Terdapat lima variabel tata kelola utama yang menjadi sasaran kunci dalam EPI, yaitu regulasi, kelembagaan, akuntabilitas dan transparansi, insentif, dan sumber daya manusia.<sup>5</sup> Kelima variabel ini akan digunakan untuk mengidentifikasi sekaligus mengevaluasi sistem tata kelola dalam program MBG. Selanjutnya, evaluasi kebijakan dilakukan dengan menggunakan teori analisis kebijakan dari Wayne Parsons. Teori ini merumuskan siklus kebijakan menjadi lima tahap, yakni menetapkan *agenda setting*, formulasi dan perencanaan, implementasi, serta monitoring dan evaluasi.<sup>6</sup> Permasalahan tata kelola yang muncul selama proses analisis akan memengaruhi perumusan, implementasi, maupun pemantauan kebijakan program.

<sup>5</sup> Aditya Wisnu Pradana et al., *Cetak Biru Ekosistem Pengetahuan & Inovasi* (Jakarta: Ristek-BRIN, KemenPPN/Bappenas, KemenPAN-RB, Februari 2021), Lihat hal. 45.

<sup>6</sup> Parsons, Wayne. *Public Policy : Pengantar Teori dan Praktik analisis kebijakan* EDISI, Cet.3, Cet.5 ; Penerbitan, Jakarta : Kencana, 2008 ; Deskripsi Fisik, xvi, 686 hlm. ;23 cm ; ISBN, 9793925094. Hal 79-80.

# 2

## PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS: KONDISI SAAT INI



## 2. PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS: KONDISI SAAT INI

### 2.1 Deskripsi Program Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dirancang untuk menjangkau seluruh peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan (TK, SD, SMP, SMA), balita, ibu hamil, ibu menyusui, serta secara khusus mereka yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pada awal tahun 2026, pemerintah juga mewacanakan perluasan program ini untuk kelompok lansia. Meski masih dalam tahap rencana, wacana tersebut menuai banyak kritik, terutama terkait risiko konsumsi makanan yang tidak sesuai kebutuhan gizi lansia sehingga berpotensi memicu komplikasi kesehatan.

Secara substansial, program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan gizi anak usia sekolah, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan UMKM. Dalam pelaksanaannya, program ini dirancang melalui alur implementasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah hingga penerima manfaat langsung.

Implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) melibatkan penyaluran dana bantuan pemerintah kepada lembaga mitra atau yayasan. Pemerintah bekerja sama dengan seluruh *stakeholder* termasuk dinas pendidikan, puskesmas, dan sekolah dalam menyiapkan dapur dan menyediakan makanan lokal, serta memastikan rantai pasok bahan pangan aman dan terjangkau. Dalam hal ini, sekolah sebagai penanggung jawab untuk pendistribusian makanan melakukan edukasi terkait kandungan gizi dan bertanggung jawab atas penerimaan makanan yang telah didistribusikan. Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan pihak yang bertanggung jawab atas distribusi makanan ke seluruh sekolah dan memastikan diterima oleh penerima manfaat. Per Januari 2026, terdapat 21.102 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi.<sup>7</sup>

### 2.2 Realisasi anggaran untuk program MBG

Pagu anggaran program MBG dalam APBN 2025 sebesar Rp71 triliun. Hingga pertengahan Desember 2025, penyerapan anggaran MBG mencapai Rp52,9 triliun atau 74,6 persen dari total anggaran Rp71 triliun.<sup>8</sup> Berikut data penyerapan anggaran program MBG sepanjang tahun 2025.

<sup>7</sup> "Ada 21 Ribu Unit SPPG hingga Awal 2026, Ini Tren Bulanannya," *Databoks Katadata*, diakses pada 03 Februari 2026, <https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/6970a62d95986/ada-21-ribu-unit-sppg-hingga-awal-2026-ini-tren-bulanannya>

<sup>8</sup> "MBG Serap APBN Rp 52,9 Triliun hingga Pertengahan Desember," *Tempo.co*, Diakses pada 03 Januari 2026, <https://www.tempo.co/ekonomi/mbg-serap-apbn-rp-52-9-triliun-hingga-pertengahan-desember-2100372>

**Tabel 2.2** Realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis Januari–Desember 2025

Bulan (2025)	Nilai (Rp)
Januari	52,82 Miliar
Februari	1,18 Triliun
Maret	1,8 Triliun
April	2,54 Triliun
Mei	3,85 Triliun
Juni	6,03 Triliun
Juli	7,9 Triliun
Agustus	13,2 Triliun
September	19,39 Triliun
Oktober	35,41 Triliun
November	43,47 Triliun
Desember	52,9 triliun

Sumber: Badan Gizi Nasional; Databoks Katadata (2025)

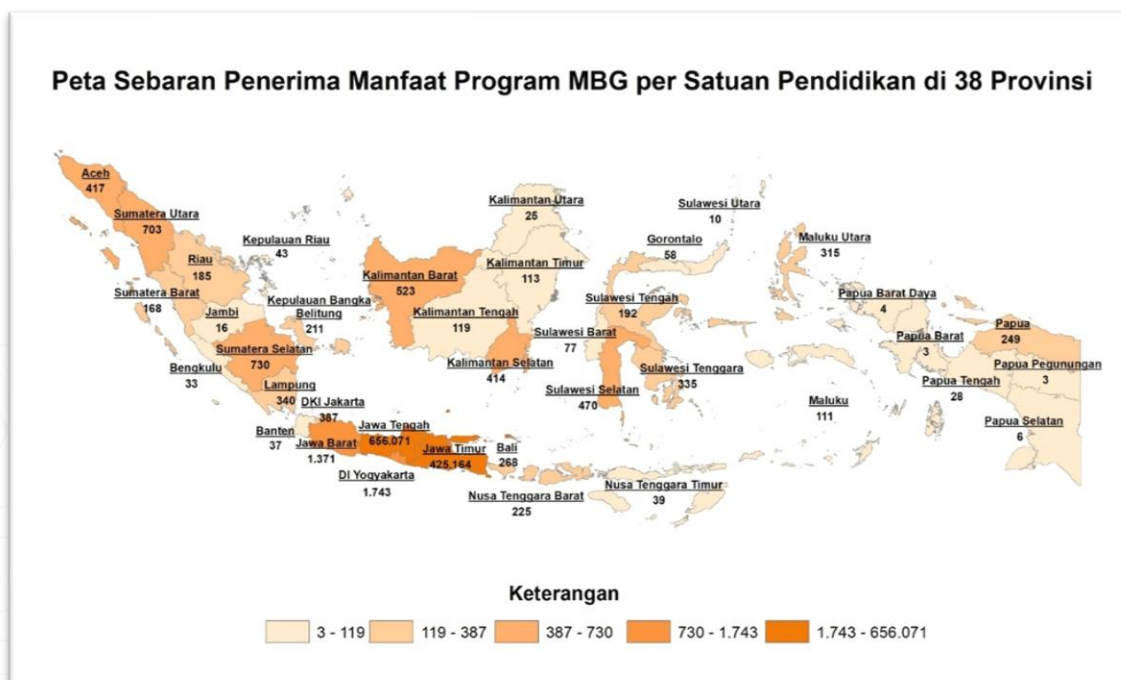
### Pagu anggaran MBG tahun 2026 naik drastis

Anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp335 triliun dengan pagu awal sebesar Rp268 triliun dan mengambil porsi yang signifikan dari anggaran sektor pendidikan. Sebesar Rp223,5 triliun anggaran MBG bersumber dari pos anggaran pendidikan dalam APBN 2026 yang totalnya mencapai Rp769 triliun, atau setara dengan 29,5 persen dari total anggaran pendidikan nasional.

## 2.3 Realisasi penerima manfaat program MBG di 38 provinsi

Hingga akhir tahun 2025, program MBG telah menjangkau 38 provinsi. Per November 2025, program MBG telah menjangkau 41,9 juta penerima manfaat dan di seluruh Indonesia sudah ada 15.369 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

**Gambar 2.3.1** Peta sebaran jumlah sekolah penerima program MBG di 38 provinsi

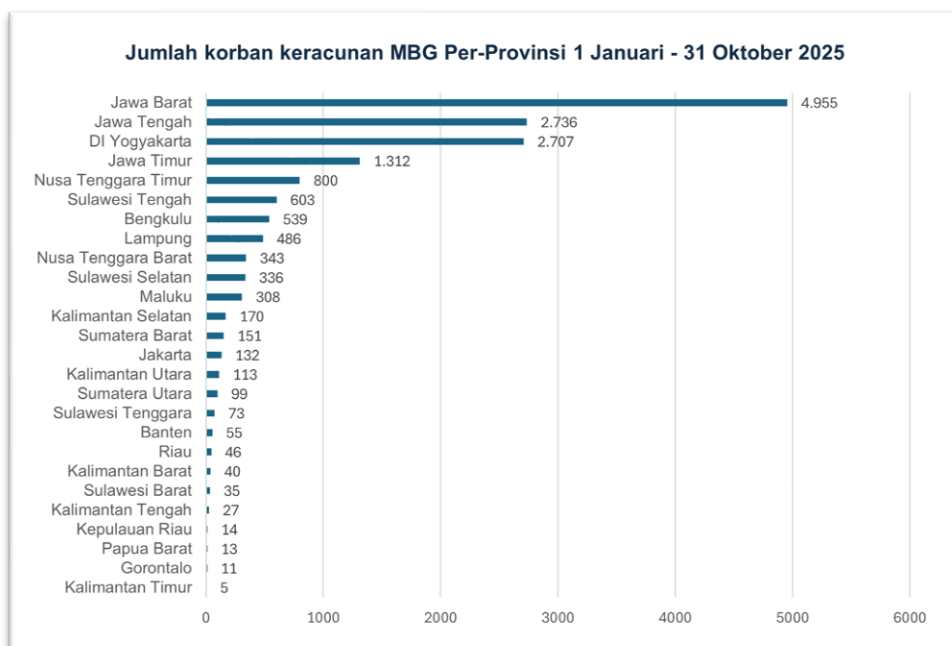


Sumber: Dashboard MBG, 2026

Peta di atas memperlihatkan bahwa program MBG masih terkonsentrasi di Pulau Jawa (warna lebih gelap), dan lebih sedikit terdistribusikan di Indonesia bagian Timur (warna lebih cerah). Adapun jumlah sekolah yang paling banyak menerima MBG ada di provinsi Jawa Tengah (656.071 sekolah), kemudian diikuti oleh Jawa Timur (425.164 sekolah), D.I Yogyakarta (1.743 sekolah), Jawa Barat (1.371 sekolah), dan yang paling sedikit ada di provinsi Papua Barat dan Papua Pegunungan dengan jumlah masing-masing tiga sekolah.

Meskipun terkonsentrasi di Pulau Jawa, berbagai kasus sajian tidak layak dan KLB keracunan juga terjadi di provinsi luar Pulau Jawa. Gambar di bawah menunjukkan jumlah korban keracunan di berbagai provinsi.

**Gambar 2.3.2** Jumlah korban keracunan MBG per provinsi



Sumber: Databoks Katadata, 2025

Gambar grafik di atas menunjukkan, kasus keracunan paling banyak terjadi di Jawa Barat. Sebanyak hampir 5.000 korban mengalami keracunan setelah mengonsumsi MBG. Jumlah ini bahkan hampir dua kali lipat jumlah korban keracunan MBG di provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan lima provinsi dengan jumlah kasus keracunan tertinggi, provinsi-provinsi di Pulau Jawa mendominasi angka korban. Satu-satunya provinsi di luar Pulau Jawa yang masuk dalam daftar tersebut adalah Nusa Tenggara Timur.

# 3

## TATA KELOLA PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS



## 3. TATA KELOLA PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

### 3.1 Kerangka regulasi

Program Makan Bergizi Gratis yang pertama kali diluncurkan oleh Presiden dan Wakil presiden terpilih telah dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang diteken dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 12/2025 tentang RPJMN. Dalam RPJMN 2025-2029, MBG disebut sebagai program prioritas utama pemerintah selama empat tahun ke depan.<sup>9</sup> Adapun sasaran penerima manfaat yang disebutkan dalam RPJMN yaitu siswa, santri, ibu hamil, balita, dan ibu menyusui, dengan indikator keberhasilan penerima manfaat 100 persen di tahun 2029.<sup>10</sup>

Sasaran MBG dalam Perpres No. 115 tahun 2025 tentang Tata Kelola Makan Bergizi Gratis diperluas termasuk tenaga pendidik. Di awal peluncurannya, alokasi anggaran program MBG yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diatur dalam UU No. 62 Tahun 2024 tentang APBN 2025 adalah sebesar Rp71 triliun. Meski memiliki landasan hukum terkait penganggaran, program Makan Bergizi Gratis belum memiliki landasan regulasi untuk pelaksanaan di tingkat nasional maupun daerah. Sementara itu, pelaksanaan MBG bersifat lintas sektor dan melibatkan berbagai kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah.

Pada pertengahan tahun 2025, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sempat menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.7/4072/SJ Tahun 2025. Surat edaran tersebut berisi arahan kepada pemerintah daerah (Gubernur dan Bupati/Wakil) agar membentuk satuan tugas (satgas) percepatan penyelenggaraan program MBG di daerah. Namun karena berupa surat edaran, arahan yang diberikan terbatas pada penjabaran tanggung jawab satgas secara umum dan mekanisme koordinasi dengan BGN.

#### Masalah mengenai regulasi

Program Makan Bergizi Gratis dicanangkan sebagai program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, memiliki sejumlah persoalan dalam kerangka regulasinya:

- **Tidak ada regulasi mengenai tata kelola program MBG saat awal peluncuran**

Di awal pelaksanaannya, satu-satunya produk hukum yang ada adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Sedangkan Perpres No. 83/2024 tentang Badan Gizi Nasional tidak dapat menjadi landasan yang kuat bagi pelaksanaan MBG di lapangan karena hanya mengatur aspek kelembagaan BGN. Setelah mencapai 44 juta penerima manfaat per-November 2025<sup>11</sup> dan terjadi ribuan kasus keracunan sepanjang tahun, pemerintah

<sup>9</sup> Lihat Perpres Nomor 12 tahun 2025, Lampiran I, hal 69. Untuk pernyataan program MBG yang termasuk ke dalam PSN lihat halaman berikutnya (hal. 70). Dengan narasi sebagai berikut:

*“Proyek Strategis Nasional antara lain Program Makan Bergizi Gratis, proyek-proyek yang berkontribusi langsung dan signifikan pada terwujudnya swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, dan hilirisasi serta proyek-proyek yang mendukung pencapaian sasaran Program Prioritas Presiden di bidang pembangunan manusia.”*

<sup>10</sup> Indikator keberhasilan sasaran lihat halaman 145, Lampiran I, Perpres No. 12/2025.

<sup>11</sup> “Prabowo Sebut MBG Dinikmati 44 Juta Orang, Produksi Capai 2 Miliar Porsi,” *Liputan6.com*, diakses pada 15 Desember 2025, <https://www.liputan6.com/news/read/6223985/prabowo-sebut-mbg-dinikmati-44-juta-orang-produksi-capai-2-miliar-porsi>

baru menerbitkan Peraturan Presiden No. 115/2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG di kuartal keempat tahun 2025.<sup>12</sup> Sebelumnya, tim melakukan pencarian informasi mengenai dokumen tata kelola program MBG dan hanya menemukan modul presentasi yang dikeluarkan BGN berisi pedoman umum tata kelola. Dokumen tersebut membahas alur kewenangan, manajemen operasional, hingga prosedur keamanan pangan.

▪ **SOP yang ditetapkan BGN tidak memiliki payung hukum yang kuat**

Selain pedoman tata kelola, tim juga menemukan modul presentasi dari BGN mengenai gambaran umum kebijakan dan implementasi program MBG. Modul tersebut memuat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disiapkan BGN untuk SPPG, mencakup aspek sanitasi ruangan dan fasilitas, sanitasi peralatan, persiapan dan pengolahan bahan pangan, penyimpanan makanan beserta sampelnya, keselamatan kerja, higienitas personel dapur, pemeliharaan peralatan dan bangunan, pengendalian hewan dan hama, serta prosedur penanganan kejadian keracunan makanan. Meskipun SOP tersebut memuat berbagai standar yang penting untuk menjaga higienitas pangan dan keamanan operasional SPPG, keberadaannya masih terbatas pada petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dalam bentuk modul presentasi. Ketentuan-ketentuan tersebut belum dituangkan ke dalam produk hukum yang lebih mengikat, seperti Peraturan Presiden (Perpres) atau Keputusan Kepala Badan (Kepkaban).<sup>13</sup>

▪ **Pelaksanaan SOP di SPPG belum sepenuhnya dipatuhi**

Kasus keracunan massal yang terjadi selama ini dikarenakan pengabaian standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan BGN oleh sejumlah SPPG. Hasil investigasi BGN mengungkapkan bahwa 80 persen SPPG tidak menjalankan SOP saat memasak.<sup>14</sup> Pelanggaran tersebut antara lain meliputi proses memasak yang terlalu dini, ompreng yang tidak dicuci dengan *steamer* (pemanas), serta tidak dilakukannya proses sterilisasi perlengkapan memasak sebelum digunakan. Munculnya pemberitaan terkait salah satu SPPG di Dukuh Kedungbanteng, Sragen, Jawa Tengah yang dibangun di sebelah peternakan babi<sup>15</sup> semakin memperkuat indikasi bahwa masih terdapat SPPG yang tidak mematuhi SOP. Padahal, SOP dari BGN jelas melarang pembangunan SPPG di dekat peternakan hewan apalagi bersebelahan dengan bangunan peternakan.

▪ **Sebagian besar SPPG belum mengantongi SLHS dan menjalankan HACCP**

Kasus keracunan yang jumlahnya semakin bertambah dari kuartal satu hingga kuartal empat menandakan SPPG belum sungguh-sungguh menerapkan prinsip *Hazard Analysis and Critical Control Points*. Seharusnya, prinsip HACCP menjadi standar bagi SPPG untuk menjaga keamanan pangan mulai dari penyiapan, proses pembuatan, hingga distribusi. Permasalahan HACCP

<sup>12</sup> "Optimalkan Program MBG, Pemerintah Perkuat Tata Kelola BGN," *Kompas.com*, diakses pada 15 Desember 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/12/04/12384431/optimalikan-program-mbg-pemerintah-perkuat-tata-kelola-bgn>.

<sup>13</sup> Pada kuartal keempat tahun 2025, BGN telah menerbitkan pedoman umum mengenai tata kelola penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis yang dituangkan dalam produk hukum resmi, yakni Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Dokumen tersebut dapat diakses secara publik melalui laman resmi BGN di <https://www.bgn.go.id/juknis/IB1PKg-petunjuk-teknis-tata-kelola-penyelenggaraan-program-makan-bergizi-gratis>.

<sup>14</sup> "BGN Ungkap Pemicu Keracunan Massal: 80% SPPG Tak Jalankan SOP" diakses pada 11 Desember 2025 <https://kumparan.com/kumparannews/bgn-ungkap-pemicu-keracunan-massal-mbg-80-sppg-tak-jalankan-sop-25uwKmPxEDm/1>

<sup>15</sup> *Ibid.*

sebenarnya pernah diangkat pada bulan Mei 2025 imbas kasus keracunan ratusan pelajar di Bogor, Jawa Barat.<sup>16</sup> Selain permasalahan standar HACCP, sebagian besar SPPG juga belum memiliki Sertifikat Layak Higienis dan Sanitasi (SLHS). Lebih lanjut, data dari Kementerian Kesehatan per 22 September 2025 mengungkapkan hanya 34 dari 8.583 SPPG yang sudah memiliki SLHS.<sup>17</sup>

### **Mengapa ini terjadi dan apa implikasinya?**

Dalam program MBG, pemerintah baru mengeluarkan peraturan hukum yang mengikat setelah ada KLB, seperti kasus keracunan. Tindakan tersebut mencerminkan regulasi yang reaktif—peraturan dibuat sebagai respons terhadap masalah atau kejadian yang sudah terjadi, bukan untuk mencegahnya.

Peraturan Presiden mengenai Tata Kelola MBG (Perpres No. 115/2025) yang baru dikeluarkan setelah satu tahun pelaksanaan adalah bukti bahwa sejak awal tidak ada upaya preventif untuk mencegah kasus keracunan. Selain Perpres tata kelola yang dikeluarkan terlambat, pemerintah juga baru mewajibkan SPPG untuk memiliki sertifikat SLHS dan HACCP setelah keracunan massal atau KLB terjadi di sejumlah daerah.

Proses memperoleh sertifikat SLHS juga memakan waktu yang tidak sebentar, karena harus melalui prosedur yang ketat, mulai dari verifikasi dokumen, verifikasi lapangan, hingga uji laboratorium.<sup>18</sup> Seperti yang terjadi di Kabupaten Bandung, hanya sembilan SPPG yang sudah memiliki sertifikat SLHS, sedangkan sejumlah 123 SPPG masih dalam proses pengajuan. Salah satu penyebab lamanya pengurusan sertifikasi adalah tahap pemeriksaan laboratorium yang meliputi pengujian air minum, kebersihan sanitasi dan peralatan masak yang membutuhkan waktu rata-rata 14 hari.<sup>19</sup> Kendala lainnya adalah setengah dari pegawai pengolah makanan yang belum memenuhi syarat pelatihan.<sup>20</sup> Demi memperbanyak jumlah SPPG yang bersertifikat SLHS, Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menyederhanakan dan mempercepat prosedur penerbitan SLHS untuk SPPG, imbas semakin meluasnya kasus keracunan yang terjadi pada kuartal keempat 2025.<sup>21</sup>

Pembuatan SLHS seharusnya menjadi upaya preventif pemerintah dalam program MBG. Sayangnya, sertifikasi SLHS maupun penerapan HACCP baru diwajibkan oleh pemerintah setelah keracunan massal atau Kejadian Luar Biasa (KLB) terjadi di sejumlah daerah.<sup>22</sup> Kondisi ini menyebabkan makanan yang dihasilkan oleh dapur SPPG tidak layak dikonsumsi karena proses produksinya berlangsung tanpa kontrol higienitas yang memadai.

---

<sup>16</sup> "Prinsip Manajemen Keamanan Pangan HACCP Harus Diterapkan pada Program MBG," *Media Indonesia*, diakses pada 28 Agustus 2025, <https://mediaindonesia.com/humaniora/771543/prinsip-manajemen-keamanan-pangan-haccp-harus-diterapkan-pada-program-mbg>

<sup>17</sup> "Dari 8.583 Dapur MBG, Hanya 34 yang Punya Sertifikat Higienis," *detikJatim*, diakses pada 25 Agustus 2025, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-8129770/dari-8-583-dapur-mbg-hanya-34-yang-punya-sertifikat-higienis>

<sup>18</sup> "Prosedur Ketat Mendapatkan SLHS: Verifikasi Berlapis dan Uji Laboratorium Wajib bagi SPPG," *Lombok Post – Jawa Pos*, diakses pada 03 Desember 2025, <https://lombokpost.jawapos.com/nasional/2510080100/prosedur-ketat-mendapatkan-slhs-verifikasi-berlapis-dan-uji-laboratorium-wajib-bagi-sppg>

<sup>19</sup> "Mayoritas SPPG di Kab Bandung Belum Memiliki SLHS, Proses Sertifikasi Lambat," *Radar Bandung*, diakses pada 03 Desember 2025, <https://www.radarbandung.id/2025/11/17/mayoritas-sppg-di-kab-bandung-belum-memiliki-slhs-proses-sertifikasi-lambat/>.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> "Menkes Minta Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Dapur MBG Dipercepat," *Tempo.co*, diakses pada 03 Desember 2025, <https://www.tempo.co/politik/menkes-minta-penerbitan-sertifikat-laik-higiene-sanitasi-dapur-mbg-dipercepat-2075148>

<sup>22</sup> "Pemerintah Wajibkan Dapur MBG Punya Sertifikat Layak Higiene Sanitasi," *Tempo.co*, diakses pada 03 Desember 2025, <https://www.tempo.co/politik/pemerintah-wajibkan-dapur-mbg-punya-sertifikat-layak-higiene-sanitasi-2074178>

### 3.2 Kerangka kelembagaan

Badan Gizi Nasional (BGN) adalah lembaga bentukan Presiden yang bertanggung jawab dalam program pemenuhan gizi nasional.<sup>23</sup> Tanggung jawab BGN secara eksplisit tercantum dalam Perpres No. 12 tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 yang menyebut bahwa koordinator nasional program MBG adalah BGN.<sup>24</sup> Karena BGN setingkat kementerian, maka lembaga ini bertanggung jawab langsung kepada presiden. Struktur organisasi BGN dipimpin oleh Kepala BGN yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan membawahi tiga Wakil Kepala. Selain itu, terdapat Sekretaris Utama dan Inspektur Utama, serta empat Deputi, yaitu Deputi Sistem dan Tata Kelola, Deputi Penyediaan dan Penyaluran, Deputi Pemantauan dan Pengawasan, dan Deputi Promosi dan Kerja Sama.

Dalam melaksanakan tupoksinya, BGN menjalin kerja sama dengan kementerian dan lembaga lain karena program MBG menuntut kolaborasi lintas sektor. Berdasarkan Perpres No. 115 tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis pasal 19, BGN dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan; instansi pemerintah, badan usaha berbadan hukum seperti koperasi, BUMD, Bumdes, persekutuan komanditer atau badan usaha yang tidak berbadan hukum, UMKM, serta yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum.

Kendati demikian, Perpres No. 115 tahun 2025 tidak menyebutkan secara eksplisit Kementerian atau Lembaga apa saja yang terlibat. Sementara itu, sebuah dokumen dari BGN yang beredar ke publik menyatakan bahwa setidaknya terdapat 21 kementerian/lembaga, termasuk pemerintah daerah, yang terlibat dengan tugas dan fungsi yang dapat dikelompokkan ke dalam 10 kategori sebagai berikut:

**Tabel 3.2.1** Tugas pokok kementerian/lembaga dalam program MBG

No.	Kementerian/Lembaga	Tupoksi utama
1	Kementerian Dalam Negeri/TNI/POLRI/Pemerintah Daerah	Meningkatkan kapasitas SDM di daerah dan SPPG, serta menyediakan data penerima MBG.
2	Bappenas, Kemenkes, Kemendikdasmen, Kemenag, KemenPPA	Mengatur tata kelola data penerima manfaat (siswa) pada satuan pendidikan.
3	Kemendesa, KemenUKM, Kemenkop	Meningkatkan kapasitas UMKM, koperasi, dan BUMDES.
4	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)	Mengatur mekanisme pengadaan barang/jasa dan pangan.
5	BUMN, KemenPU	Menyediakan kebutuhan infrastruktur SPPG seperti air, listrik, gas, dan sanitasi bersih.
6	Bapanas, KLHK	Menata limbah kemasan dan sisa pangan.
7	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	Mengawasi keamanan pangan hingga lolos uji.
8	Bapanas, Kementan, KKP	Memasok bahan baku pangan.
9	Kemendikdasmen & Kemenag	Mendukung infrastruktur pendidikan.
10	Kemenkes	Mengawasi keamanan produksi dan distribusi, serta standar gizi pada makanan.

Sumber: Perpres No. 115 tahun 2025; Kebijakan dan Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (2025)

Lebih lanjut, selain K/L yang menangani tugas pokok implementasi MBG, terdapat pula tugas pengawasan program MBG yang ditangani oleh beberapa kementerian/lembaga pemerintah, seperti BPK, BPKP, Ombudsman, DPR, BIN, Kejaksaan Agung. Berikut tupoksi masing-masing K/L dalam pengawasan program:

<sup>23</sup> Perpres No. 83 tahun 2024

<sup>24</sup> Perpres No. 12 tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029, hal 72.

**Tabel 3.2.2** Kementerian/lembaga dengan fungsi pengawasan dalam program MBG

No.	Kementerian/Lembaga	Tupoksi utama
1	Badan Pengawas Keuangan (BPK)	Melakukan audit penggunaan anggaran dan penerbitan evaluasi kinerja program.
2	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	Membuat kebijakan pengawasan anggaran, kemudian melakukan audit, revidi, evaluasi dan pemantauan.
3	Ombudsman	Mencegah maladministrasi dalam pengadaan program.
4	Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)	Menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan agar program berjalan sesuai regulasi.
5	Kejaksaan Agung	Menegakkan hukum atas pelanggaran pelaksanaan program.
6	Badan Intelijen Nasional (BIN)	Mengumpulkan informasi strategis dan mendukung keamanan pelaksanaan program di daerah.

Sumber: Kebijakan dan Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (2025)

Kementerian/Lembaga yang disebutkan dalam tabel di atas tidak dicantumkan tupoksinya secara detail dalam Perpres No. 115 tahun 2025. Namun, Bagian Kedua Pemantauan, Pengawasan, Pengendalian, dan Evaluasi pasal 57 perpres tersebut menyebutkan bahwa K/L dan Pemerintah Daerah memiliki fungsi dan kewenangan salah satunya dalam hal pengawasan.

### **Masalah mengenai kelembagaan**

Persoalan yang muncul dalam kerangka kelembagaan, yakni:

- **Tidak melibatkan dinas kabupaten/kota dalam pelaksanaan dan evaluasi program MBG**  
Berdasarkan peraturan kelembagaan BGN, pemerintah daerah dilibatkan dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menandakan bahwa program ini dirancang untuk dilaksanakan secara desentralisasi. Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa sejumlah dinas kabupaten/kota tidak dilibatkan secara optimal dalam pelaksanaan program MBG.

Salah satu narasumber penelitian yang berprofesi sebagai Kepala Sekolah SD Pagi (nama sekolah disamarkan) di Kota Waingapu, Provinsi Nusa Tenggara Timur mengaku bahwa sekolah penerima tidak memperoleh sosialisasi terlebih dahulu mengenai penetapan mereka sebagai penerima program. Peneliti juga bertanya apakah dinas terkait telah menyampaikan informasi mengenai pembagian MBG. Merespons persoalan tersebut, narasumber menyatakan bahwa Kepala Dinas Pendidikan setempat pada awalnya tidak mengetahui sekolah mana saja di Kota Waingapu yang akan menerima MBG.

Nihilnya pelibatan pemda setempat juga dialami oleh sebuah SD di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara saat belasan siswa menjadi korban keracunan MBG pada Juni 2025 setelah mengonsumsi ayam tepung yang diduga basi. Pasca kejadian tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana mengungkapkan bahwa Dinas Kesehatan tidak terlibat sejak awal pelaksanaan program MBG. Dalam praktiknya, pelaksanaan MBG hanya melibatkan pihak dapur yang bertugas penuh untuk menentukan menu, menyediakan ahli gizi, hingga menyalurkan makanan ke sekolah.<sup>25</sup>

Fakta lapangan ini bertentangan dengan ketentuan dalam regulasi maupun dokumen yang beredar di ruang publik, yang menempatkan dinas pendidikan dan kesehatan sebagai pemangku kepentingan utama. Ini berarti dinas pendidikan dan kesehatan setempat seharusnya terlibat

<sup>25</sup> S. R. Yunus, "Keracunan MBG Berulang, Siswa SD di Bombana Muntah-muntah," *Kompas.id*, 24 April 2025, <https://www.kompas.id/artikel/keracunan-mbg-berulang-puluhan-siswa-sd-di-bombana-muntah-muntah>

dalam implementasi MBG di tingkat daerah. Namun, merujuk pada kasus di Kota Waingapu dan Kabupaten Bombana, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan tidak dilibatkan sejak awal implementasi program.

- **Ketidaktejelasan mekanisme koordinasi pelaporan antara pusat dengan daerah**

Saat terjadi kasus keracunan, pemerintah daerah kerap tidak mengetahui kepada instansi atau unit koordinasi mana KLB tersebut harus dilaporkan. Kerancuan peran pemerintah daerah di Kalimantan Barat dalam kasus keracunan yang menimpa 20 siswa di SD Negeri 12 Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, menjadi salah satu contohnya. Kasus keracunan yang diduga terjadi karena menu hiu filet<sup>26</sup> pada September 2025 membuat bingung pemerintah daerah setempat. Gubernur Kalimantan Barat menyatakan bahwa pemerintah daerah bingung harus berkoordinasi dengan pihak mana ketika terjadi kasus keracunan karena di wilayahnya tidak terdapat koordinator daerah yang menangani program MBG. Akibatnya, pemerintah daerah harus menghubungi langsung pemerintah pusat untuk memperoleh kejelasan.<sup>27</sup>

- **Mekanisme pelaporan kasus keracunan belum jelas**

Sekolah-sekolah yang mengalami kasus keracunan MBG melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berbeda-beda. Ada yang melaporkannya kepada vendor, sementara ada pula yang langsung melaporkannya kepada kepolisian.

Kepala Sekolah SD Pagi di Kota Waingapu, NTT, melaporkan masalah makanan basi melalui grup aplikasi obrolan daring yang dibentuk oleh pihak vendor. Grup yang beranggotakan sembilan kepala sekolah penerima MBG tersebut dijadikan sebagai sarana berbagi informasi seputar MBG di masing-masing sekolah.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Gapai Cita (nama sekolah disamarkan) di Provinsi DIY melaporkan kasus keracunan massal di sekolahnya secara langsung kepada SPPG. Namun, SPPG merespons laporan tersebut dengan memberikan tanggapan yang tidak berbasis data dan menyatakan bahwa kasus keracunan tersebut bersifat 'terisolasi', yaitu hanya terjadi di SMP Gapai Cita akibat sanitasi yang buruk. Padahal, kasus keracunan juga terjadi di sekolah-sekolah lain di wilayah tersebut. Karena respons SPPG dinilai tidak memadai, kepala sekolah kemudian melanjutkan pelaporan kepada Dinas Pendidikan, Kelurahan, Puskesmas, dan Kapanewon terkait.

SDN 7 Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan merespons kasus sakit perut delapan siswa setelah mengonsumsi MBG dengan cara yang berbeda. Setelah para siswa dilarikan ke puskesmas, pihak sekolah segera melaporkan peristiwa tersebut kepada Polres Empat Lawang. Setelah menerima laporan, pihak kepolisian langsung menuju dapur penyedia MBG untuk melakukan pemeriksaan.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Sucipto, "Usai Dugaan Keracunan MBG Ikan Hiu Filet, Program Tetap Berjalan di Kalbar," *Kompas.id*, diakses 17 Januari 2026, <https://www.kompas.id/artikel/usai-dugaan-keracunan-mbg-ikan-hiu-filet-program-tetap-berjalan-di-kalbar>

<sup>27</sup> Dina Prihatini Wardoyo, "Gubernur Kalbar Marah soal Siswa Keracunan MBG: Siapa Koordinatornya?" *Kompas.id*, 24 September 2025, <https://regional.kompas.com/read/2025/09/24/195333478/gubernur-kalbar-marah-soal-siswa-keracunan-mbg-siapa-koordinatornya-saya>

<sup>28</sup> Aji YK Putra dan David Oliver Purba, "8 Siswa SD Sakit Perut Usai Santap Menu MBG, Berulat di Empat Lawang," *Kompas.com*, 19 Februari 2025, <https://regional.kompas.com/read/2025/02/19/122537978/8-siswa-sd-sakit-perut-usai-santap-menu-mbg-berulat-di-empat-lawang-sumsel>

Terdapat perbedaan yang signifikan dalam mekanisme pelaporan KLB akibat mengonsumsi MBG oleh ketiga sekolah (SD Pagi, SMP Gapai Cita, dan SDN 7 Tebing Tinggi). Dua sekolah, yakni SMP Gapai Cita dan SD Pagi, melaporkan KLB tersebut kepada SPPG. Jika ditelaah, langkah ini masuk akal karena SPPG atau vendor penyedia makanan merupakan pihak yang bersentuhan langsung dengan hidangan MBG yang diterima oleh siswa. Namun, SDN 7 Tebing Tinggi memilih untuk melaporkan langsung kepada kepolisian, bukan kepada vendor.

### **Mengapa ini terjadi dan apa implikasinya?**

Minimnya keterlibatan pemerintah daerah, khususnya dinas terkait, menunjukkan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersifat tersentralisasi. Pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) memegang kendali utama dalam perencanaan, implementasi, dan pengawasan program. Akibatnya, sejumlah kasus pelaksanaan MBG di sekolah-sekolah berlangsung tanpa sepengetahuan dinas pendidikan, sementara proses pengolahan hingga penyajian makanan tidak berada di bawah pengawasan dinas kesehatan.

Pola sentralisasi ini semakin diperkuat dengan ketiadaan regulasi yang memadai terkait mekanisme koordinasi antara pemerintahan pusat dan daerah. Pada tahap awal implementasi, Perpres No. 83 tahun 2024 hanya mengatur kelembagaan Badan Gizi Nasional (BGN), sedangkan regulasi turunan yang mengatur pelaksanaan program di tingkat daerah hanya sebatas surat edaran.<sup>29</sup> Akibatnya, mekanisme koordinasi di tingkat daerah belum terbentuk. Pemerintah daerah akhirnya kewalahan menghadapi kasus keracunan, mengingat tidak adanya koordinator daerah yang secara khusus menangani program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kondisi ini lantas menimbulkan berbagai masalah turunan, seperti sekolah yang mengalami kebingungan harus melaporkan kejadian keracunan atau makanan basi kepada siapa: apakah SPPG, dinas terkait, atau kepolisian.

## **3.3 Mekanisme Transparansi Informasi dan Akuntabilitas**

BGN menyediakan platform tunggal terpusat yakni Sistem Pengelolaan Kinerja untuk mengelola seluruh data dan indikator kinerja dalam pelaksanaan program di BGN. Setiap SPPG dan mitra menggunakan platform ini secara daring melalui *website mitra.bgn.go.id* untuk mengunggah berbagai laporan pelaksanaan operasional MBG harian, seperti jumlah porsi makanan yang sudah diproduksi dan disalurkan, hasil pengukuran kualitas bahan baku, dan laporan pemanfaatan dana. Meski tersedia secara daring, platform tersebut tidak bisa diakses umum, kecuali mitra BGN dan SPPG.

Berkaitan dengan keterbukaan informasi, Badan Gizi Nasional menyediakan *platform* untuk mengajukan permohonan informasi secara daring melalui *ppid.bgn.go.id*. Menurut informasi yang tertera dalam *website* tersebut, publik dapat mengajukan permohonan informasi kepada Badan Gizi Nasional dan disediakan pula alur serta tata cara memperoleh informasi secara daring. Menurut tinjauan yang peneliti lakukan, setidaknya ada 20 kategori informasi yang dapat diakses publik dalam *website* tersebut, mulai dari laporan keuangan, informasi program kegiatan BGN, informasi mengenai regulasi/keputusan BGN, pengadaan barang dan jasa, hingga LHKPN pejabat BGN.

<sup>29</sup> Surat edaran yang dimaksud adalah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.7/4072/SJ Tahun 2025. Surat edaran tersebut berisi arahan kepada pemerintah daerah (Gubernur dan Bupati/Wakil) agar membentuk satuan tugas (satgas) percepatan penyelenggaraan program makan siang bergizi gratis di daerah.

## Masalah transparansi informasi dan akuntabilitas program

Pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja merupakan variabel penting dalam mekanisme akuntabilitas, serta transparansi informasi sebagai upaya mencegah penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan publik. Peneliti menemukan sejumlah permasalahan dalam mekanisme akuntabilitas dan transparansi informasi dalam pelaksanaan MBG, yakni:

- **Ketidakjelasan mekanisme pelaporan keuangan antara para mitra dan SPPG**

Peneliti mewawancarai salah satu koperasi yang bermitra dengan SPPG, yaitu koperasi Wibawa yang berlokasi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pihak Koperasi Wibawa mengungkapkan bahwa meskipun terdapat pelaporan keuangan, alur administrasi yang komprehensif belum berjalan. Hubungan jual beli hanya bersifat transaksional *"aku beli ke kamu berapa?"*, sedangkan relasi kemitraan yang menuntut akuntabilitas administratif tidak dilakukan. Hal ini diperjelas dengan ungkapan dari narasumber bahwa ia tidak pernah diminta untuk mendokumentasikan alur pemasokan sebagai bukti apabila dimintai pertanggungjawaban. Alhasil, dokumentasi dilakukan sebagai inisiatif pribadi.<sup>30</sup>

- **Upaya untuk menggali informasi program MBG sulit dilakukan**

Peneliti menyoal salah satu SPPG yang beroperasi di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat sebagai informan. Sebelumnya, peneliti menemukan kasus keracunan di SPPG tersebut pada bulan April–Juni 2025. Wawancara bermaksud untuk menggali informasi mengenai tata kelola SPPG yang bertanggung jawab atas distribusi MBG di beberapa sekolah yang mengalami kasus keracunan di Kabupaten Tasikmalaya. Pihak SPPG menolak diwawancarai dengan alasan perlu ada izin resmi terlebih dahulu dari pemerintah pusat (BGN).

Sebelumnya, peneliti tidak memahami alur pengambilan data (wawancara) dengan SPPG di daerah. Setelah penolakan wawancara tersebut, peneliti segera berkiriman surat kepada BGN beberapa hari setelahnya. Salah satu peneliti sempat mendatangi kantor BGN yang saat itu masih berlokasi di kompleks Kementerian Pertanian di Jalan Harsono RM, Jakarta Selatan pada pertengahan Agustus 2025. Namun, pihak kehumasan sedang menghadiri agenda percepatan program Makan Bergizi Gratis di Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Akhirnya, permohonan dilakukan melalui aplikasi obrolan daring.

Setelah empat kali menghubungi pegawai BGN yang berbeda, tim tidak kunjung mendapatkan surat izin wawancara kepada SPPG. Pesan terakhir yang peneliti kirimkan di bulan September 2025 juga tidak memperoleh balasan apa pun, baik berupa konfirmasi tindak lanjut maupun penolakan. Hingga laporan ini disusun, peneliti belum mendapatkan respons terkait permohonan izin wawancara kepada SPPG tersebut. Beberapa SPPG dengan data menarik tidak bisa digali lebih dalam karena sebagian besar ketua SPPG yang dikontak menanyakan surat izin wawancara dari pusat (BGN). Selain itu, permohonan wawancara kepada pihak BGN, yang diajukan sebagai penyeimbang perspektif, juga tidak mendapatkan konfirmasi lanjutan.

---

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan anggota koperasi pada tanggal 20 Agustus 2025. Nama koperasi disamarkan.

- **Tidak ada transparansi pelaporan keracunan dan sajian tidak layak**

Sejumlah sekolah yang mengalami kasus keracunan dan makanan basi mendapatkan tekanan dari berbagai pihak agar kasusnya tidak dipublikasikan. Sekolah Dasar Pagi (SD Pagi) di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menjadi subjek dalam penelitian ini sempat mendapatkan tekanan melalui MoU “tutup mulut” yang dikirimkan secara langsung oleh petugas vendor, agar kasus makanan keracunan atau kesalahan penyajian pangan lain dalam MBG tidak tersebar luas ke publik. Namun, kepala sekolah menolak menandatangani MoU tersebut karena beranggapan kasus keracunan seharusnya disampaikan secara transparan kepada publik. Setelah penolakan tersebut, petugas vendor kembali mendatangi kepala sekolah untuk meminta penandatanganan MoU mengenai kerahasiaan publikasi. Namun, kepala sekolah tetap menolak permintaan tersebut.

Tidak hanya di SD Pagi, SMP Gapai Cita di Provinsi DIY yang mengalami kasus keracunan massal juga mendapatkan tekanan serupa: ada pasal-pasal dalam MoU yang melarang sekolah untuk menyebarkan informasi terkait kelalaian penyajian MBG ke media. Kepala sekolah SMP Gapai Cita juga mengungkapkan bahwa sebelum SMP Gapai Cita, kasus keracunan massal sudah beberapa kali terjadi di sekolah lain, tapi dirahasiakan dari publik. Terkait dengan MoU pertama, pihak sekolah hanya diizinkan mengomunikasikan kejadian luar biasa kepada pihak SPPG dan melarang mempublikasikannya. Kepala sekolah sempat menganggap dirinya melanggar pasal ini karena berkoordinasi dengan dinas dan membuat kasus keracunan tersebar, tetapi kemudian tindakannya dibenarkan DPR. Pasal ini kemudian diperjelas di MoU kedua bahwa pelarangan publikasi mengacu pada “pihak di luar dinas terkait, seperti media.”

Adanya MoU yang disertai pasal-pasal agar sekolah tidak menyebarkan informasi kejadian keracunan sudah beredar luas ke publik. Hal ini menguatkan fakta yang peneliti temukan di lapangan. Pada awal September 2025, beredar surat perjanjian antara SPPG dengan penerima manfaat di Kabupaten Sleman, DIY, agar penerima manfaat MBG, yakni sekolah, merahasiakan apabila terjadi KLB seperti kasus keracunan. MoU tersebut memuat tujuh klausul. Klausul ketujuh menyatakan bahwa jika ditemukan kejadian ‘luar biasa’ seperti kasus keracunan, paket makanan yang tidak lengkap, atau kejadian serius lainnya, maka penerima manfaat berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan informasi.<sup>31</sup> Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sleman membenarkan MoU tersebut sudah beredar dari sekolah ke sekolah. Meski begitu, Disdik tidak tahu menahu eksistensi surat perjanjian tersebut sampai kemudian terjadi kasus keracunan massal di salah satu sekolah di Kabupaten Sleman pada bulan Agustus.<sup>32</sup>

- **Ketidajelasan mekanisme penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan**

Saat terjadi kasus keracunan massal, sulit untuk menentukan pihak mana yang harus bertanggung jawab. Setelah ribuan kasus keracunan massal terjadi hingga akhir tahun 2025, pemerintah saling lempar tanggung jawab. Belum jelas apakah BGN yang akan bertanggung jawab penuh atas KLB program MBG ataukah aktor-aktor yang terlibat dalam distribusi makanan di lapangan seperti SPPG.

<sup>31</sup> Firda Janati, “Muncul Surat Perjanjian Merahasiakan Keracunan MBG di Sleman,” *Kompas.id*, 20 September 2025, <https://yogyakarta.kompas.com/read/2025/09/20/204958978/muncul-surat-perjanjian-merahasiakan-keracunan-mbg-di-sleman-ternyata>

<sup>32</sup> Tim detikJogja, “Sederet Fakta Heboh Surat Perjanjian SPPG Minta Rahasiakan Kasus Keracunan,” *detik.com* (detikJogja), 21 September 2025, <https://www.detik.com/jogja/berita/d-8122247/sederet-fakta-heboh-surat-perjanjian-sppg-minta-rahasiakan-kasus-keracunan>

Saat kasus keracunan massal menimpa SDN 7 Tebing Tinggi, misalnya, SPPG sama sekali tidak terlibat dalam memberikan penjelasan. Keterangan mengenai kasus keracunan hanya berasal dari pihak kepolisian, yayasan mitra penyedia dapur, serta Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM). Selang beberapa bulan, kasus keracunan terjadi di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) yang korbannya mencapai 173 siswa, jauh lebih besar daripada di Tebing Tinggi. Pada kasus keracunan PALI, SPPG juga enggan memberikan keterangan. Penjelasan mengenai kasus keracunan hanya muncul dari Bupati dan Wakil Bupati PALI, pihak yayasan, dan Dinas Kesehatan Sumatera Selatan.<sup>33</sup>

Contoh kasus lainnya terjadi di Kabupaten Gunungkidul terkait distribusi susu basi. Koperasi Wibawa sebagai pemasok dimintai pertanggungjawaban oleh SPPG karena sekitar 100 dari 3.000 susu yang didistribusikan kepada siswa berakhir basi. Namun, salah seorang narasumber penelitian mengklaim bahwa susu tersebut masih dalam kondisi masih baik saat sampai di dapur SPPG. Menurut narasumber, proses distribusi hingga sampai ke siswa melibatkan tahapan yang panjang, termasuk penyimpanan di kulkas dapur yang dapat memengaruhi kualitas susu. Atas dasar tersebut, mitra pemasok menolak bertanggung jawab penuh karena proses penyajian makan juga melibatkan dapur SPPG.

### **Mengapa ini terjadi dan apa implikasinya?**

Adanya perjanjian MoU yang melarang penyebaran informasi mengenai kasus keracunan dan makanan yang tidak layak, ditambah dengan sulitnya memperoleh izin wawancara di lapangan membuktikan adanya tindakan represi informasi dalam pelaksanaan program MBG. Penerima manfaat yang menjadi sasaran kebijakan seharusnya berhak untuk melaporkan kejadian fatal yang membahayakan keselamatan mereka. Transparansi informasi merupakan unsur penting yang mengawasi partisipasi publik dalam proses kebijakan, khususnya untuk mengevaluasi kebijakan MBG. Namun sebaliknya, penerima manfaat, yakni sekolah, dilarang untuk menyebarluaskan kasus *fraud* maupun kelalaian selama implementasi program MBG, termasuk beredarnya MoU bernada represif<sup>34</sup> yang lolos dari pengetahuan Dinas Pendidikan. Desakan untuk menandatangani surat resmi atau nota kesepemahaman (MoU) juga menunjukkan bahwa praktik represi informasi tersebut telah terinstitusionalisasi.

Selain itu, prosedur pengambilan data dengan wawancara dan/atau observasi di lapangan juga tidak diatur dalam *ppid.bgn.go.id*. Alur yang dijelaskan hanya menyebut permohonan informasi dapat dilakukan melalui mekanisme *online* atau “... dengan cara datang secara langsung di Kantor Badan Gizi Nasional”<sup>35</sup>, kemudian menunggu respons hingga 10 hari kerja. Meski prosedur tersebut terkesan sederhana, BGN tetap membatasi akses terhadap informasi terkait MBG dengan tidak merespons permohonan yang telah diajukan. Padahal, penelitian/kajian yang mendalam terkait MBG tidak hanya membutuhkan informasi yang bersifat normatif, tetapi juga data lapangan di daerah yang tidak bisa dijangkau pemerintah pusat/BGN. Data tersebut hanya bisa diperoleh melalui observasi secara langsung.

<sup>33</sup> “Dua Kasus Keracunan di Sumsel, Bukti Ruang Gelap MBG?,” *Kompas.id*, diakses pada 28 Agustus 2025, <https://www.kompas.id/artikel/dua-kasus-keracunan-di-sumsel-bukti-ruang-gelap-mbg>

<sup>34</sup> Dikutip dari *kompas*, kendati telah tersebar luas ke publik, Wakil Kepala BGN membantah telah mengeluarkan perjanjian kesepakatan untuk tidak menyebarluaskan informasi, serta menyangkal bunyi pasal-pasal yang tercantum di dalamnya. Ia menyebut tidak ada klausul untuk menjaga kerahasiaan informasi, yang ada hanyalah pengaturan koordinasi untuk distribusi dan pengawasan peralatan MBG.

<sup>35</sup> “Alur Permohonan Informasi,” *PPID Badan Gizi Nasional*, diakses pada 20 September, <https://ppid.bgn.go.id/layanan/alur-permohonan>

Sementara itu, akuntabilitas mengenai pertanggungjawaban kejadian fatal di lapangan juga bermasalah. Hal ini terutama disebabkan oleh pelaksanaan program MBG yang melibatkan rantai komando dan penyedia yang kompleks, termasuk pihak eksternal seperti UMKM, koperasi, bahkan bisnis rumahan sebagai pemasok bahan, tanpa disertai mekanisme pengawasan yang ketat. Hubungan antara SPPG dengan mitra juga tidak diatur melalui kontrak yang jelas, melainkan hanya dilakukan dengan mekanisme putus jual tanpa jaminan akuntabilitas administratif. Akibatnya, kekosongan mekanisme pengawasan membuat pihak-pihak yang terlibat saling menyalahkan satu sama lain dan enggan bertanggung jawab saat terjadi kasus sajian tidak layak.

Lebih lanjut, belum ada pihak yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan hingga tingkat distribusi. Seharusnya, dinas terkait memiliki peran pengawasan. Namun dalam praktiknya, dinas kesehatan tidak dilibatkan dalam perancangan menu MBG, seperti terlihat pada kasus keracunan di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kasus KLB keracunan yang menimpa ribuan siswa bukan perkara sederhana. Investigasi menyeluruh atas kasus keracunan belum juga dilakukan pemerintah. Langkah ini penting untuk mengetahui akar permasalahan KLB keracunan yang tidak hanya terjadi di satu wilayah, tapi tersebar di berbagai daerah. Evaluasi yang tidak serius hanya akan menambah catatan panjang kasus-kasus terdahulu. KLB keracunan seharusnya bisa dikenai tindak pidana sebagai bagian dari akuntabilitas hukum. Namun, belum ada regulasi yang mengatur tindak pidana terkait program MBG. Selain itu, tantangan utama yang akan dihadapi apabila KLB dibawa ke jalur hukum adalah sulitnya investigasi untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab.

### 3.4 Pendanaan dan insentif

#### **Porsi MBG dalam APBN**

Program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang mendapat alokasi Rp71 triliun dalam APBN 2025. Dari Rp71 triliun, sebanyak Rp 63,36 triliun digunakan untuk pemenuhan gizi nasional dan Rp 7,43 triliun dialokasikan untuk mendukung manajemen operasional.<sup>36</sup> Di tahun 2026, anggaran MBG naik signifikan menjadi Rp335 triliun. Dengan anggaran tersebut, pemerintah akan mengalokasikan setidaknya Rp1,2 triliun per hari atau sekitar Rp25 triliun per bulan untuk realisasi program MBG.<sup>37</sup> Program prioritas Presiden Prabowo ini turut memangkas Rp223 triliun atau hampir setengah dari alokasi anggaran pendidikan di RAPBN 2026 senilai Rp724,7 triliun (44,2 persen).<sup>38</sup> Tidak hanya anggaran pendidikan, program MBG juga menyedot anggaran sektor kesehatan mencapai Rp24,7 triliun (9,2 persen) dan sebesar Rp19,7 triliun (7,4 persen) dari sektor ekonomi.<sup>39</sup>

<sup>36</sup> "Makan Bergizi Gratis di Papua, Anggaran Disesuaikan Menjadi Rp 15.000 Per Porsi," *Kompas.id*, diakses pada 13 September 2025, <https://www.kompas.id/artikel/makan-bergizi-gratis-di-papua-harga-disesuaikan-menjadi-rp-15000-per-porsi>

<sup>37</sup> "Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 335 Triliun, untuk Intervensi Gizi hingga Digitalisasi," *Tempo.co*, diakses pada 20 Agustus 2025, <https://www.tempo.co/politik/anggaran-makan-bergizi-gratis-rp-335-triliun-untuk-intervensi-gizi-hingga-digitalisasi-2060952>

<sup>38</sup> "Mengapa Hampir Separuh Anggaran Pendidikan untuk Program MBG dan Bagaimana Dampaknya," *Kompas.id*, diakses pada 18 Januari 2026, <https://www.kompas.id/artikel/mengapa-hampir-separuh-anggaran-pendidikan-untuk-program-mbg-dan-bagaimana-dampaknya>

<sup>39</sup> "Resmi! MBG Dapat Rp 335 T dari APBN 2026, Ambil Jatah Anggaran Pendidikan Rp 223 T," *detik.com* (detikEdu), diakses pada 23 September 2025, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-8126284/resmi-mbg-dapat-rp-335-t-dari-apbn-2026-ambil-jatah-anggaran-pendidikan-rp-223-t>

### **Anggaran MBG per porsi**

Awalnya, pemerintah menetapkan anggaran untuk makanan MBG sebesar Rp15.000 per porsi, kemudian diturunkan menjadi Rp10.000 per porsi. Proporsi anggaran MBG per porsi terdiri dari Rp10.000 untuk makanan, Rp2.000 biaya sewa, dan Rp3.000 untuk biaya operasional. Menurut Ombudsman, SPPG bisa mendapatkan untung Rp2.000 dari anggaran Rp15.000 per porsi.<sup>40</sup> Sedangkan untuk wilayah Papua, Maluku, dan beberapa wilayah lain di luar Pulau Jawa, harga per porsi MBG bisa lebih tinggi hingga mencapai Rp60.000 per porsi karena menyesuaikan harga kebutuhan pokok di wilayah tersebut.<sup>41</sup>

### **Alur gaji petugas SPPG dan pendanaan mitra**

Gaji petugas SPPG berkisar Rp2.000.000 per bulan dengan status sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Dengan status tersebut, penggajian petugas SPPK didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Sementara itu, gaji koordinator dan Ketua SPPG berkisar antara Rp5.000.000–Rp8.000.000 per bulan.

Mekanisme alur penggajian pegawai SPPG Matahari Sore menurut salah satu narasumber penelitian Farah (bukan nama sebenarnya) dilakukan melalui skema harian yang besarnya ditentukan berdasarkan beban (jumlah penerima manfaat di satu SPPG). Farah menyebutkan bahwa SPPG yang melayani 4000 penerima manfaat akan memberikan gaji yang berbeda dibandingkan dengan SPPG yang melayani 1500 penerima saja.<sup>42</sup> Meski begitu, Ketua SPPG, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) ahli gizi, dan SPPI akuntan umumnya menerima pembayaran gaji per bulan. Sementara itu, karyawan dapur yang bukan merupakan pegawai SPPG digaji melalui dana operasional.<sup>43</sup>

Terkait dengan alur pendanaan mitra, mekanisme dilakukan dengan sistem *reimburse* pada dua pekan pertama pelaksanaan MBG. Artinya, penyedia makanan atau mitra harus menggunakan uang pribadi terlebih dahulu, kemudian menagihkan total biayanya kepada pemerintah.<sup>44</sup> Namun, pemerintah memutuskan untuk mendanai mitra dengan uang muka mulai pertengahan tahun. Bahkan, ada ketentuan yang melarang SPPG beroperasi sebelum uang muka dikucurkan pemerintah.

Pencairan dana pemerintah ke yayasan dilakukan melalui bank *Virtual Account* (VA) untuk memudahkan pemantauan keluar masuknya uang. Sebelum dana dicairkan untuk masuk ke rekening yayasan, SPPG terlebih dahulu membuat proposal untuk periode 10 hari yang terdiri dari pengeluaran untuk bahan baku, operasional, dan insentif, yang juga disertai laporan keuangan mengenai realisasi anggaran minggu sebelumnya.<sup>45</sup> Pegawai SPPG Matahari Sore di Kota Yogyakarta yang menjadi narasumber dalam

<sup>40</sup> "Ombudsman RI Sebut Mitra Masih Bisa Untung Rp2.000 per Porsi MBG," *ANTARA News*, diakses pada 08 Agustus 2025, <https://www.antaranews.com/berita/4834281/ombudsman-ri-sebut-mitra-masih-bisa-untung-rp2000-per-porsi-mbg>

<sup>41</sup> "Biaya Makan Bergizi Gratis Tetap Rp 10 Ribu/Porsi atau Naik? Ini Jawabannya," *detik.com* (detikFinance), diakses pada 30 September 2025, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8102346/biaya-makan-bergizi-gratis-tetap-rp-10-ribu-porsi-atau-naik-ini-jawabannya>

<sup>42</sup> Namun menurut narasumber kami, ketentuan terbaru hanya mengizinkan satu SPPG melayani tidak lebih dari 1500 penerima.

<sup>43</sup> Dana operasional yang dimaksud adalah kucuran anggaran per porsi Rp15.000; Rp10.000 untuk makanan, Rp2.000 biaya sewa, dan Rp3.000 untuk biaya operasional.

<sup>44</sup> "Kepala BGN: Mulai Februari, MBG Tak Lagi Pakai Mekanisme Reimburse," *ANTARA News*, diakses pada 08 Agustus, <https://www.antaranews.com/berita/4608982/kepala-bgn-mulai-februari-mbg-tak-lagi-pakai-mekanisme-reimburse>

<sup>45</sup> "BGN Hapus Sistem 'Reimbursement' MBG, Diganti dengan 'Virtual Account'," *Kompas.com*, diakses pada 08 Agustus 2025, <https://money.kompas.com/read/2025/05/06/173900026/bgn-hapus-sistem-reimbursement-mbg-diganti-dengan-virtual-account>

penelitian ini juga mengatakan bahwa penyaluran dana ke SPPG melewati yayasan yang pengajuan anggarannya dilakukan setiap dua minggu sekali melalui aplikasi Dialur. Aplikasi Dialur hanya bisa diakses oleh SPPG.

### **Masalah dalam pendanaan**

- **Sejumlah staf SPPG belum dibayarkan gajinya**

Seorang staf SPPG di Jawa Tengah, bernama Tata (bukan nama sebenarnya) saat diwawancarai oleh Tempo, pada Maret 2025 mengaku belum mendapatkan gaji, padahal kerjanya sampai larut malam. Menurutnya, kontrak dan gajinya sebagai staf SPPG memang masih abu-abu. Tata mengatakan sudah menandatangani surat perjanjian kerja (SPK) sebanyak dua kali dengan isi yang berbeda. SPK pertama yang dikeluarkan bulan Februari 2025 menyatakan bahwa staf SPPG dikontrak selama tujuh bulan dan akan menerima gaji setara dengan upah provinsi beserta tunjangan hari raya. Namun, masa kontrak Tata berubah signifikan pada SPK kedua yang dia tandatangani menjadi satu bulan.<sup>46</sup>

Staf SPPG di daerah lain, yakni Jawa Barat, juga mengalami hal serupa. Restu, bukan nama sebenarnya, belum mendapatkan gaji sejak SPPG tempat ia bekerja beroperasi dari bulan Januari 2025. Selain itu, ia mengaku *overwork* dengan jam kerja yang tidak jelas. Serupa dengan Tata, Restu juga mendapatkan SPK sebanyak dua kali, tetapi ia menolak menandatangani SPK kedua karena tidak ada THR dan perubahan kontrak kerja. Untuk bertahan hidup, Tata harus menjual HP dan motornya, sedangkan Restu terpaksa meminjam uang saudaranya untuk menutup kebutuhan sehari-hari.<sup>47</sup> Kasus identik juga dialami oleh staf inti SPPG di Bogor, Jawa Barat, yakni ahli gizi dan akuntan yang seharusnya dibayar lima juta per bulan, tetapi baru cair gajinya setelah tiga bulan. Para staf juga mengaku beban kerja di SPPG yang berat tidak sebanding dengan besaran gaji yang mereka terima.<sup>48</sup>

Masalah tunggakan gaji pegawai SPPG ternyata banyak dialami oleh SPPI. BBC Indonesia sempat memberitakan akun Instagram @badagizinasional.ri yang dibanjiri komentar dari SPPI perihal gaji yang belum dibayarkan.<sup>49</sup> Konten yang dimaksud diunggah pada 9 November 2025 dan memuat dokumentasi distribusi MBG di SDN Kalibaru 07 Pagi, Cilincing, Jakarta Utara.

- **Upaya *mark-up* harga bahan baku oleh mitra**

Pada pertengahan tahun 2025, BGN menemukan kasus mitra yang sengaja menggelembungkan harga melampaui harga referensi pasar. Namun, BGN mengklaim langsung menindaklanjuti kasus tersebut. BGN mengaku tidak memproses hukum mitra yang kedapatan melakukan tindakan kecurangan tersebut, tapi hanya diwajibkan untuk mengembalikan uang selisih *mark-up*.<sup>50</sup>

---

<sup>46</sup> "Cerita Staf SPPG Makan Bergizi Gratis Jual Motor Karena Gaji Belum Dibayar," *Tempo.co*, diakses 08 Agustus 2025, <https://www.tempo.co/politik/cerita-staf-sppg-makan-bergizi-gratis-jual-motor-karena-gaji-belum-dibayar-1224322>

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> "Gaji Staf SPPG MBG Baru Cair 3 Bulan, Motivasi Kerja Terdampak," *Kompas.com*, diakses pada 02 Desember 2025, <https://money.kompas.com/read/2025/10/01/110000426/gaji-staf-sppg-mbg-baru-cair-3-bulan-motivasi-kerja-terdampak>

<sup>49</sup> BBC Indonesia, *loc.cit.*

<sup>50</sup> "Mitra MBG Gelembungkan Anggaran Lebih Tinggi dari Harga Pasar." *Bisnis.com*, diakses pada 25 Agustus 2025. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250819/12/1903727/mitra-mbg-gelembungkan-anggaran-lebih-tinggi-dari-harga-pasar>

- **Harga per porsi MBG tidak realistis untuk menghasilkan makanan bergizi seimbang**  
Beberapa inisiatif simulasi harga yang dilakukan media dan juga pendapat dari pengusaha kuliner menunjukkan bahwa porsi hidangan sebesar Rp10.000 hanya bisa menyajikan sayur dengan lauk tahu-tempe.<sup>51</sup> Jika hidangan ditargetkan mengandung protein tinggi, maka harga satu porsi dipatok setidaknya Rp15.000. Sedangkan beberapa pedagang makanan di Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, berpendapat bahwa satu porsi nasi dan ayam goreng paling murah dijual sekitar Rp15.000 per porsi. Dengan harga Rp10.000 per porsi, vendor akan kesulitan mendapatkan keuntungan di tengah harga bahan pokok yang terus melambung.<sup>52</sup>
- **Pegawai dapur berada dalam kondisi rentan karena upah rendah dan tidak pasti**  
Gaji karyawan SPPG berasal dari biaya operasional MBG yang ditetapkan 15.000 per porsi dengan rincian Rp10.000 untuk biaya makanan dan Rp5.000 untuk biaya operasional. Pada praktiknya, besaran biaya per porsi 15.000 belum bisa memenuhi standar makanan bergizi seimbang, apalagi untuk menutup biaya tenaga kerja.

Alokasi anggaran yang sangat terbatas ini menciptakan potensi tarik-menarik antara pemenuhan kualitas makanan dan pembayaran gaji karyawan dapur. Situasi tersebut tidak hanya berisiko menurunkan mutu makanan MBG, tetapi juga mendorong terciptanya kondisi kerja yang tidak sejahtera bagi pekerja dapur, seperti beban kerja berlebihan dengan upah yang rendah atau tidak pasti.

### **Mengapa ini terjadi dan apa implikasinya?**

Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan bahwa penunggakan gaji staf SPPG bukan disebabkan oleh kekurangan anggaran, melainkan oleh permasalahan administrasi.<sup>53</sup> Namun, masalah yang terjadi sesungguhnya tidak hanya bersifat administratif. Keterlambatan pembayaran gaji kepada sejumlah pegawai SPPI, seperti akuntan dan ahli gizi, mencerminkan persoalan yang lebih mendasar, yakni lemahnya tata kelola pegawai dalam pelaksanaan program MBG, khususnya dalam aspek penggajian. Padahal, mekanisme penggajian pegawai inti SPPG sudah diatur dalam perjanjian kerja (PPPK) sesuai dengan Perpres Nomor 11 Tahun 2024.

Persoalan yang lebih krusial terletak pada sistem penggajian karyawan dapur. Sebab, penggajian karyawan dapur belum memiliki payung hukum yang jelas hingga saat ini sebagaimana pegawai inti SPPG. Kekosongan regulasi akan menempatkan karyawan dapur dalam situasi kerja yang rentan, baik dari sisi kepastian upah maupun jam kerja.

Lebih lanjut, lemahnya tata kelola pendanaan pada fase awal pelaksanaan MBG juga berkontribusi pada terjadinya praktik *mark-up* harga bahan baku oleh mitra. Pada tahap awal implementasi, BGN menerapkan sistem *reimbursement* kepada mitra SPPG. Sistem ini memiliki kelemahan karena membuka ruang bagi mitra untuk memanipulasi laporan pengeluaran, baik dalam proses pembelian maupun

<sup>51</sup> "Menu MBG Rp 10.000 Disebut Cukup, Begini Realita Jika Beli di Warteg," *Kompas.com*, diakses pada 02 Desember 2025, <https://bandung.kompas.com/read/2025/10/18/073904178/menu-mbg-rp-10000-disebut-cukup-begini-realita-jika-beli-di-warteg-di>

<sup>52</sup> "Pedagang di Lubuk Pakam Nilai Harga Rp 10 Ribu untuk Program MBG Tak Realistis," *Mistar.id*, diakses pada 15 November 2025, <https://mistar.id/news/sumut/pedagang-di-lubuk-pakam-nilai-harga-rp10-ribu-untuk-program-mbg-tak-realistis>

<sup>53</sup> "BGN Bilang Keterlambatan Pembayaran Gaji Petugas MBG Karena Kesalahan Administratif," *Tempo.co*, 02 Desember 2025, <https://www.tempo.co/politik/bgn-bilang-keterlambatan-pembayaran-gaji-petugas-mbg-karena-kesalahan-administratif-2088559>

pengadaan bahan baku. Tata kelola pendanaan ini perlu transparan, akuntabel, dan terus dievaluasi mengingat anggaran untuk program MBG naik drastis di tahun 2026. Jika tata kelola pendanaan masih lemah, maka peluang korupsi akan terus terbuka lebar.

### 3.5 Kapasitas sumber daya manusia

#### Struktur organisasi

BGN resmi dibentuk oleh Mantan Presiden Joko Widodo setelah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024. BGN merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, susunan organisasi BGN meliputi dewan pengarah yang di dalamnya ada ketua dan anggota. Pelaksananya meliputi kepala, wakil kepala, sekretariat utama, deputi bidang sistem dan tata kelola, deputi bidang penyediaan dan penyaluran, deputi bidang promosi dan kerja sama, deputi bidang pemantauan dan pengawasan, serta inspektorat utama.

Tanggung jawab BGN secara eksplisit tercantum dalam Perpres No. 12 tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 yang menyebutkan bahwa koordinator nasional program MBG adalah BGN. BGN bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan teknis di bidang tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional.<sup>54</sup> Lebih lanjut, Peraturan Presiden No. 115 Tahun 2025 yang telah resmi berlaku mengatur tata kelola program makan bergizi gratis menjadi lebih terarah, termasuk pengangkatan PPPK. Regulasi ini menjadi tonggak penting dalam kebijakan pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia, khususnya dalam upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat sejak usia dini.<sup>55</sup>

#### Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI)

Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) adalah program inisiatif pemerintah melalui Kementerian Pertahanan dan Universitas Pertahanan yang bertujuan melatih para sarjana dalam kemampuan manajerial dan bela negara guna mendukung pembangunan nasional. Program ini terutama diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program gizi nasional MBG, sekaligus menyiapkan peserta sebagai bagian dari Komponen Cadangan (Komcad) pertahanan negara.<sup>56</sup>

Lulusan SPPI kemudian menduduki posisi sebagai Kepala SPPG yang bertanggung jawab atas pengelolaan operasional dapur umum serta memastikan ketersediaan makanan bergizi bagi masyarakat di wilayah kerjanya.<sup>57</sup> Sebagai pelaksana program MBG, lulusan SPPI akan diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kebijakan pengangkatan pegawai SPPG menjadi PPPK mengacu pada Perpres Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata

<sup>54</sup> "Melongok Fungsi, Tugas, dan Struktur Badan Gizi Nasional yang Dibentuk Presiden Jokowi," *Tempo.co*, diakses pada 02 September 2025, <https://www.tempo.co/politik/melongok-fungsi-tugas-dan-struktur-badan-gizi-nasional-yang-dibentuk-presiden-jokowi-22163>

<sup>55</sup> "Perpres 115 Tahun 2025 Resmi Berlaku, Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis Jadi Lebih Terarah, Termasuk Pengangkatan PPPK," *Radarsemarang.id*, diakses pada 03 Februari 2026, <https://radarsemarang.jawapos.com/berita/727070879/perpres-115-tahun-2025-resmi-berlaku-tata-kelola-program-makan-bergizi-gratis-jadi-lebih-terarah-termasuk-pengangkatan-pppk>

<sup>56</sup> "Ingin daftar SPPI 2025? Ini mekanisme seleksi dan syarat lengkapnya," *ANTARA News*, diakses pada 02 Maret 2025, <https://www.antaraneews.com/berita/4576930/ingin-daftar-sppi-2025-ini-mekanisme-seleksi-dan-syarat-lengkapnya>

<sup>57</sup> "Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi: Seperti Apa Karir Ke depannya," *Kumparan*, diakses pada 08 Agustus 2025, <https://kumparan.com/ardhya-siahaan/kepala-satuan-pelayanan-pemenuhan-gizi-seperti-apa-karir-kedepannya-24y2JAMPQ7A>

Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis pasal 17.<sup>58</sup> Terdapat tiga posisi utama yang masuk dalam kategori jabatan inti SPPG, yakni kepala SPPG, tenaga ahli gizi, dan akuntan. Posisi ini memegang peran strategis dalam merancang dan mengimplementasikan program-program pemenuhan gizi masyarakat, sekaligus mendukung upaya peningkatan kualitas kesehatan nasional secara berkelanjutan.

### **Proses rekrutmen SPPI**

Rekrutmen sarjana penggerak Indonesia terbuka bagi WNI berusia maksimal 30 tahun dengan pendidikan minimal D4/S1. Warga negara yang melamar wajib sehat jasmani dan rohani, tidak memiliki catatan pidana, serta bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Pendaftaran dilakukan melalui situs resmi dengan mengisi formulir dan mengunggah dokumen sesuai persyaratan.<sup>59</sup>

Berikut ini tiga posisi utama yang masuk dalam kategori jabatan inti SPPG:

#### **1) Kepala SPPG**

SPPI Kepala Dapur adalah SPPI yang menjabat sebagai Kepala SPPG dan bertanggung jawab atas manajemen seluruh operasional dapur untuk program MBG. Tugasnya adalah memastikan distribusi MBG kepada ribuan penerima manfaat dan memenuhi standar BGN dalam hal kualitas makanan, pengolahan higienis, distribusi, dan pengadaan bahan.

#### **2) Ahli Gizi**

SPPI Ahli Gizi merupakan lulusan sarjana gizi yang telah mengikuti program SPPI dan menjabat sebagai pemimpin program makan bergizi di daerah. Mereka bekerja sama dengan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mengelola program gizi langsung di lapangan serta memastikan kualitas dan ketersediaan makanan bergizi gratis untuk masyarakat. Setelah diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Gizi Nasional, mereka menjadi bagian penting dari program pemenuhan gizi nasional yang diprioritaskan oleh pemerintah.

#### **3) Akuntan**

SPPI akuntan adalah lulusan program SPPI yang bekerja sebagai ahli akuntan untuk mendukung program MBG. Akuntan bertugas mengurus keuangan pembelanjaan bersama koperasi. Koperasi kemudian bertugas mencari bahan-bahan pokok yang dibutuhkan SPPG.

Selain itu, SPPG juga memiliki beberapa posisi lain<sup>60</sup> sebagai berikut:

- 4) Jurutama masak** merupakan pemimpin tim masak dan bertugas menjamin kualitas dan kuantitas bahan pangan.
- 5) Ahli sanitasi** bertugas untuk melakukan pengawasan, pemeliharaan, dan penerapan SOP kebersihan.
- 6) Asisten lapangan** bertindak sebagai pengawas pengantaran dan pelaksana terdepan dalam menjalin hubungan dengan pihak eksternal.
- 7) Relawan dapur** terbagi atas tim persiapan bahan makanan, tim pengelola bahan makanan, tim pengaturan porsi, dan pengemasan, tim distribusi, tim kebersihan dan pencuci alat makan, serta tim keamanan.

<sup>58</sup> "SPPG Akan Diangkat Jadi PPPK, Ini Kriteria dan Skema Gajinya," *BeritaSatu*, diakses pada 02 Februari 2026, <https://www.beritasatu.com/nasional/2958013/sppg-akan-diangkat-jadi-pppk-ini-kriteria-dan-skema-gajinya>

<sup>59</sup> "Cara Mendaftar SPPI Batch 3 2025, Lengkap dengan Syarat dan Jadwalnya," *Liputan6.com*, diakses pada 01 Desember 2025, <https://www.liputan6.com/hot/read/5878968/cara-mendaftar-sppi-batch-3-2025-lengkap-dengan-syarat-dan-jadwalnya>

<sup>60</sup> "Kriteria Pegawai MBG Jadi PPPK," *Hukumonline*, diakses pada 02 Februari 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kriteria-pegawai-mbg-jadi-pppk-lt6968d30d9f240/>

Hasil wawancara dengan SPPG Matahari Sore menemukan bahwa SPPG memiliki perjanjian kerja dengan koperasi yayasan yang berafiliasi dengan TNI. Koperasi berperan sebagai pihak pembelanja/*procurement* bahan-bahan yang dibutuhkan SPPG. Farah menyatakan bahwa pembelanjaan bahan tidak selalu berasal dari mitra lokal atau UMKM. Beras dan sayur-sayuran diperoleh dari petani, sedangkan makanan ringan/*snack* diperoleh dari UMKM. Namun, bahan lain seperti daging dan susu dibeli dari perusahaan karena sifatnya yang lebih tahan lama dan instan. Sementara itu, omprengan dan alat dapur sudah disiapkan dari yayasan.

### **Masalah dalam sumber daya manusia**

- **Kekurangan ahli gizi yang mumpuni dalam mengelola program MBG**

Meskipun ada ribuan lulusan gizi setiap tahun, program MBG masih kekurangan tenaga ahli gizi. Kebutuhan akan ahli gizi yang tinggi dan mendadak telah melampaui kapasitas penempatan yang tersedia sehingga banyak sarjana gizi yang tidak terserap secara terstruktur. Akibatnya, kebutuhan tenaga gizi di lapangan tidak terpenuhi secara memadai.<sup>61</sup> Padahal ahli gizi merupakan ujung tombak dalam menentukan menu MBG dengan komposisi nutrisi seimbang. Keterlibatan ahli gizi dalam program MBG ini adalah mutlak: kompetensi yang dimiliki tidak dapat digantikan oleh tenaga non-profesional yang hanya diberikan pelatihan singkat.

Dalam pelaksanaannya, ahli gizi menentukan menu beserta komposisi nutrisi yang kemudian didiskusikan dengan asisten lapangan. Asisten lapangan akan mempertimbangkan menu tersebut dari ketersediaan logistik dan kesiapan juru masak. Menurut staf dari SPPG Matahari Sore, menu sering kali ditentukan berdasarkan hasil dari kompromi asisten lapangan dengan ahli gizi atas pertimbangan waktu, tenaga, dan bahan (bahan manakah yang perlu dihabiskan terlebih dahulu sebelum basi).

- **Kompetensi dan pelatihan gizi kurang merata di antara tenaga gizi**

Melalui kebijakan MBG, ahli gizi dihadapkan pada layanan gizi baru dan banyak dari mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang rendah secara tidak merata.<sup>62</sup> Kapasitas sumber daya manusia yang tidak merata ini membuat mereka kesulitan mengatasi masalah yang timbul selama implementasi kebijakan makan bergizi gratis.<sup>63</sup> Selain itu, banyak dapur SPPG yang tidak mendapatkan dukungan ahli gizi terlatih, tetapi diisi oleh tenaga umum atau lulusan spesialis lain (misalnya: kesehatan masyarakat atau teknologi pangan). Akibatnya, kebutuhan akan personel yang memiliki kompetensi dalam menyusun menu sesuai standar gizi, mengevaluasi kebutuhan gizi lokal, hingga melakukan pengawasan kualitas antar lokasi tidak terpenuhi. Kemendikdasmen juga telah meluncurkan modul edukasi gizi untuk implementasi MBG di lapangan, tetapi fokusnya lebih luas daripada pelatihan ahli gizi profesional.<sup>64</sup> Ahli gizi MBG

---

<sup>61</sup> "BGN: Nutritionist Shortage Emerges amid Indonesia's Free Meal Program Rollout," *Asia-Pacific Solidarity*, diakses pada 02 Desember 2025, <https://www.asia-pacific-solidarity.net/index.php/news/2025-11-13/bgn-nutritionist-shortage-emerges-amid-indonesias-free-meal-program-rollout.html>

<sup>62</sup> Farhan, A. U., Hafizhah, R. D., & Aji, A. S., "The association of current knowledge on gene-based nutrition services with involvement and confidence levels among nutrition workers in Indonesia," *Amerta Nutrition*. 2024, diakses pada 08 Agustus 2025, <https://doi.org/10.20473/amnt.v8i1.2024.116-123>

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> "Kemendikdasmen Perkuat Implementasi Program MBG Lewat Peluncuran Enam Modul Edukasi Gizi," *Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)*, 01 Desember 2025, <https://kemendikdasmen.go.id/siaran-pers/14248-kemendikdasmen-perkuat-implementasi-program-mbg-lewat-pelunc>

mempunyai lebih dari pelatihan singkat untuk memahami risiko kesehatan dan standar gizi kompleks yang diperlukan.<sup>65</sup>

▪ **Permasalahan perekrutan dan pengelolaan karyawan SPPG**

Pengurus SPPG termasuk di dalamnya kepala SPPG, ahli gizi, dan ahli akuntan dipilih langsung oleh Badan Gizi Nasional dan ditugaskan ke yayasan. Narasumber penelitian yang bertindak sebagai staf (asisten lapangan) SPPG Matahari Sore mengatakan bahwa SPPG tempatnya bekerja berada di bawah yayasan yang berafiliasi dengan TNI dan berfungsi sebagai penyalur dana dari BGN. Berdasarkan penuturan staf tersebut, pengurus SPPG (Kepala, Ahli Gizi, dan Ahli Akuntan) dipilih langsung oleh BGN dan ditugaskan ke yayasan. Narasumber juga menambahkan bahwa yayasan yang berafiliasi dengan TNI ini masih memiliki andil dalam menentukan rekrutmen karyawan. Biasanya rekrutmen berdasarkan rekomendasi pihak TNI, seperti saudara dari personel atau pensiunan TNI. Tidak ada tes khusus terkait keterampilan yang diberlakukan kecuali seleksi berkas dan wawancara.

Staf SPPG Matahari Sore mengatakan bahwa asisten lapangan berperan memimpin proses penyediaan MBG. Berkaitan dengan evaluasi internal SPPG, baik Kepala SPPG, Ahli Gizi, dan Ahli Akuntan bertugas membuat laporan dan pengajuan anggaran ke BGN. Dalam hal ini, pihak sekolah dapat melakukan evaluasi kinerja dan pelayanan SPPG melalui borang evaluasi harian yang dibagikan saat distribusi MBG berlangsung. Indikator evaluasi termasuk apakah makanan sudah layak dikonsumsi dan apakah ada KLB di sekolah selama distribusi MBG.

Dalam melaksanakan tugasnya, SPPG memiliki banyak mitra pendukung, seperti pemasok bahan baku, penyedia alat dapur, penyedia alat makan, jasa pengantaran, jasa kebersihan, jasa keamanan, dan lain-lain. Pemasokan bahan baku di SPPG Matahari Sore dilakukan melalui *outsourcing* ke koperasi yayasan yang diduga berafiliasi dengan TNI dan belanja bahan-bahan dengan vendor-vendor yang berbeda. Hal ini dilakukan agar tidak ada ketergantungan dari satu vendor ke vendor yang lain yang berpotensi memengaruhi penetapan harga. Alat dapur disediakan oleh yayasan yang diduga berafiliasi dengan TNI yang juga bertanggung jawab terhadap pengadaan bangunan, omprengan, dan alat makan lainnya. SPPG memang memiliki perjanjian kerja sama dengan koperasi yayasan yang diduga berafiliasi dengan TNI tersebut sehingga banyak pekerjaan yang ditangani oleh koperasi itu. Sementara itu, jasa pengantaran dilakukan oleh karyawan tidak tetap yang bertindak sebagai supir. Jasa-jasa lain seperti kebersihan dan keamanan dibayar sendiri melalui uang operasional yang ada.<sup>66</sup>

- **Upah dan jam kerja petugas MBG tidak seimbang dan keterlambatan penerimaan gaji**  
Sejumlah pekerja di dapur SPPG program MBG banyak yang mengalami eksploitasi. Mereka bekerja tanpa kontrak tertulis yang membatasi jam kerja dan terlambat menerima gaji. Kepala BGN Dadan Hindayana mengakui bahwa ada persoalan dalam sistem penggajian SPPI yang telah bekerja di dapur MBG.<sup>67</sup>

<sup>65</sup> "Ahli Gizi Sebut Mustahil MBG Tanpa Kasus Keracunan," *CNN Indonesia*, diakses pada 01 Desember 2025, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20251119173347-92-1297220/ahli-gizi-sebut-mustahil-mbg-tanpa-kasus-keracunan>

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan asisten lapangan SPPG Matahari Sore, pada tanggal 26 November 2025.

<sup>67</sup> "Pengakuan petugas MBG – 'Tak punya kontrak kerja, jam kerja tak menentu, dan telat terima gaji'," diakses pada 01 Desember, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cm27rj2k4zdo>

Dani, seorang pekerja di salah satu dapur MBG di Jawa Timur yang merupakan lulusan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Batch 3, mengaku belum menerima gaji dalam beberapa bulan terakhir. Dani sempat menjalani pendidikan militer dasar selama satu bulan sebelum ditempatkan di dapur MBG. Selama bekerja, ia tidak terikat perjanjian kerja apalagi kontrak tertulis.<sup>68</sup>

- **Beban guru bertambah dalam mempersiapkan MBG**

Keterlibatan guru dalam pendistribusian program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi mengganggu proses belajar mengajar. Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang guru di SD Pagi, waktu pembelajaran yang seharusnya berlangsung efektif menjadi terpotong karena guru harus terlibat dalam pengurusan distribusi dan pembersihan sisa makanan. Guru tersebut menyatakan bahwa tugas tambahan ini menambah beban kerja guru di luar tanggung jawab utama sebagai pendidik.

Kendati demikian, keterlibatan guru telah diatur dalam Surat Edaran BGN Nomor 5 Tahun 2025 yang mengharuskan setiap sekolah yang menjadi penerima manfaat program MBG menunjuk 1 sampai 3 guru yang akan menjadi penanggung jawab distribusi MBG di sekolah melalui arahan kepala sekolah. Surat edaran tersebut juga mengatur insentif setiap guru yang menjadi penanggung jawab sebesar Rp.100.000,- yang akan diberikan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.<sup>69</sup> Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) kontra terhadap pemberian insentif tersebut karena dianggap sebagai bentuk lepas tangan pemerintah dari tanggung jawab akan KLB program MBG.<sup>70</sup>

### **Mengapa ini terjadi dan apa implikasinya?**

Badan Gizi Nasional mengakui adanya kekurangan tenaga ahli gizi sehingga banyak satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang berhenti beroperasi dan meminta bantuan Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Ahli Gizi (DPP Persagi) untuk mengerahkan ahli gizi ke SPPG yang membutuhkan.<sup>71</sup> Sebenarnya, saat ini terdapat 233 program studi (prodi) gizi di seluruh Indonesia yang setiap tahunnya menghasilkan 11.000-12.000 lulusan.<sup>72</sup> Data ini menunjukkan bahwa melimpahnya lulusan prodi gizi tidak dibarengi dengan serapan yang seimbang. Banyak lulusan prodi gizi yang tidak mengetahui informasi kebutuhan tenaga ahli gizi di lapangan, khususnya untuk program MBG.<sup>73</sup>

Selain informasi terkait kebutuhan ahli gizi yang kurang disosialisasikan, banyak lulusan tidak mengetahui tata cara atau alur mendaftar posisi ahli gizi, terutama di wilayah SPPG dan dapur pengelola MBG yang baru dibangun. Akibatnya, sarjana di bidang gizi menganggur atau bekerja di bidang lain,

---

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> "Surat Edaran BGN: Guru Penanggung Jawab MBG Dapat Insentif Rp 100 Ribu," *Tempo.co*, diakses pada 01 Desember 2025, <https://www.tempo.co/politik/surat-edaran-bgn-guru-penanggung-jawab-mbg-dapat-insentif-rp-100-ribu-2075131>

<sup>70</sup> "Pro Kontra Insentif Guru Penanggung Jawab MBG: Iman Zanatul Haeri: Kami Menolak Guru Jadi Penanggung Jawab," *RM.id*, diakses pada 01 Desember 2025, <https://rm.id/baca-berita/blakblakan/284783/pro-kontra-insentif-guru-penanggung-jawab-mbg-iman-zanatul-haeri-kami-menolak-guru-jadi-penanggung-jawab>

<sup>71</sup> "BGN Ungkap Kelangkaan Ahli Gizi, Minta Persagi Isi Kekosongan untuk SPPG." *Detik News*, diakses pada 01 Desember 2025, <https://news.detik.com/berita/d-8223725/bgn-ungkap-kelangkaan-ahli-gizi-minta-persagi-isi-kekosongan-untuk-sppg>

<sup>72</sup> "Penantian Ahli Gizi untuk Dilibatkan dalam Program MBG," *Kompas.com*, diakses pada 01 Desember 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/11/18/16264281/penantian-ahli-gizi-untuk-dilibatkan-dalam-program-mbg>

<sup>73</sup> Asia-Pacific Solidarity, *loc. cit.*

sedangkan kebutuhan tenaga kerja gizi di lapangan masih belum terpenuhi.<sup>74</sup> Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) juga sepakat bahwa Indonesia tidak kekurangan ahli gizi, melainkan kekurangan data dan koordinasi dalam penyalurannya sehingga perlu adanya mekanisme perekrutan yang jelas dalam menyalurkan ahli gizi ke setiap dapur SPPG.<sup>75</sup> Sementara SPPG terus bertambah dan membutuhkan tenaga dalam pelaksanaan MBG, pemerintah perlu membenahi mekanisme perekrutan tenaga ahli gizi.

Memperbaiki sistem perekrutan bukan hanya sekadar menyerap sarjana gizi, tetapi juga memilih tenaga ahli gizi yang berkualitas dan kompeten. Rendahnya pengawasan aspek gizi dalam sajian MBG salah satunya disebabkan oleh ketiadaan ahli gizi yang memadai. Sejumlah pemberitaan menunjukkan bahwa ahli gizi yang direkrut untuk mengontrol kualitas makanan di SPPG adalah lulusan baru (*fresh graduate*). Misalnya kasus makanan basi yang terjadi di Bangkalan melibatkan ahli gizi berstatus *fresh graduate* dan belum pernah mengikuti pelatihan.<sup>76</sup> Kondisi ini berisiko karena *fresh graduate* belum memiliki cukup pengalaman untuk menjalankan fungsi pengawasan kualitas makanan.

Oleh karena itu, perekrutan tenaga ahli gizi profesional perlu disertai dengan kualifikasi yang jelas, misalnya persyaratan pengalaman kerja tertentu dalam bidang pengendalian mutu dan keamanan pangan atau sudah mengantongi sertifikasi. Kebutuhan akan sumber daya manusia yang kompeten sesungguhnya tidak hanya terbatas pada tenaga ahli gizi. Tenaga lain yang menjalankan operasional SPPG, seperti akuntan dan posisi lainnya juga perlu diisi oleh individu yang memiliki kapasitas dan kompetensi agar program MBG berjalan secara optimal.

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> "Benarkah Ahli Gizi Langka dan Tak Cukup Disalurkan ke MBG?," *Tempo.co*, diakses pada 01 Desember 2025, <https://www.tempo.co/politik/benarkah-ahli-gizi-langka-dan-tak-cukup-disalurkan-ke-mbg--2091315>

<sup>76</sup> "Satgas MBG: Ahli Gizi SPPG di Bangkalan Masih *Fresh Graduate* dan Tak Pernah Ikut Pelatihan," *Kompas.com*, diakses pada 01 Desember 2025, <https://surabaya.kompas.com/read/2025/09/23/202427478/satgas-mbg-ahli-gizi-sppg-di-bangkalan-masih-fresh-graduate-dan-tak-pernah>

# 4

## EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS



## 4. EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

### 4.1 Tahap *agenda setting* kebijakan

#### Konsep *agenda setting* dalam kebijakan

Merumuskan *agenda setting* adalah tahap awal sekaligus paling krusial dalam keseluruhan proses pembuatan kebijakan. Dalam tahap ini program idealnya dibuat berdasarkan masalah faktual yang terjadi di masyarakat dan dibuktikan dengan data. Selain itu, penentuan masalah yang ingin diselesaikan juga berdasarkan umpan balik dari kebijakan sebelumnya yang intervensinya belum maksimal tetapi isunya masih dianggap relevan.

Menurut Wayne Parsons, masalah yang diambil dan intervensi kebijakan yang dipilih tidak terlepas dari dinamika politik. Ini karena pembuat kebijakan memiliki persepsi yang berbeda-beda dalam melihat dan menemukan akar masalah, juga menilai urgensi masalah tersebut untuk diselesaikan.<sup>77</sup> Tahap selanjutnya adalah tahap politis yang bahkan bisa tidak berdasarkan bukti ilmiah dan masalah faktual di lapangan: memutuskan kebijakan. Pada tahap ini, pengambil keputusan (pemerintah) mungkin saja mengintepretasikan hal lain yang akhirnya membuat kebijakan sesuai dengan kepentingan mereka meskipun para pakar telah menemukan masalah dasar dan mendefinisikan sebuah masalah secara objektif (sesuai fakta).<sup>78</sup>

#### Bagaimana tahap *agenda setting* dalam program MBG dilakukan?

Gagasan program MBG pertama kali muncul dalam dokumen Asta Cita Prabowo-Gibran sejak keduanya mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029. Dalam dokumen visi-misi Indonesia Maju, salah satu program unggulan yang digagas adalah memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. Ide program tersebut dilatarbelakangi oleh tingginya angka tengkes (*stunting*) di Indonesia yang dianggap mendesak untuk diselesaikan.

Meski begitu, masalah tengkes tidak disebut secara eksplisit di dalam dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah<sup>79</sup> sebagai alasan utama dirilisnya program MBG. Namun, berdasarkan informasi yang banyak beredar di media daring, program MBG awalnya bertujuan untuk memperbaiki gizi demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Ini berarti pemerintah melihat persoalan gizi sebagai masalah yang perlu diselesaikan. Selain itu, Perpres No. 115 tahun 2025 tentang tata kelola MBG menegaskan bahwa program MBG bertujuan untuk meningkatkan status gizi pada kelompok sasaran yang dalam jangka panjang akan membentuk kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan dokumen BGN yang berjudul “Pedoman Umum Sistem dan Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG)”, tujuan MBG dirinci secara lebih luas. Tujuan program MBG tersebut meliputi bidang gizi, bidang pendidikan, bidang ekonomi, dan bidang kemiskinan dengan detail yang tertuang dalam tabel di bawah ini.

<sup>77</sup> Parsons, Wayne., *Op. Cit.*, Hal 90.

<sup>78</sup> Parsons menjelaskan, dalam penentuan *agenda setting* dan mendefinisikan problem, kontroversinya ada pada apakah kebijakan ini didasarkan pada persoalan obyektif versus subyektif.

<sup>79</sup> Referensi lain yakni <https://setkab.go.id/prabowo-tegaskan-program-makan-bergizi-gratis/>

**Table 4.1 Tujuan Program MBG**

Bidang gizi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemenuhan gizi anak usia pra sekolah, TK/PAUD, anak sekolah, santri, ibu hamil, ibu menyusui dan balita.</li><li>• Peningkatan akses makanan bergizi bagi kelompok masyarakat yang rentan gizi.</li><li>• Menanamkan perilaku makan sehat.</li></ul>
Bidang pendidikan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatkan prestasi, partisipasi dan kehadiran siswa, mengurangi anak putus sekolah.</li><li>• Peningkatan pengetahuan terkait gizi seimbang.</li></ul>
Bidang ekonomi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemanfaatan bahan pangan lokal.</li><li>• Meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha kecil dan mikro.</li></ul>
Bidang kemiskinan	Menciptakan lapangan kerja dan pengurangan beban penduduk miskin dalam perolehan pangan.

Sumber: Pedoman Umum Sistem dan Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis (2025)

Beragamnya tujuan serta sasaran penerima manfaat menandakan bahwa program MBG tidak hanya dimaksudkan untuk mengatasi persoalan gizi saja. Berbagai masalah yang dipotret seperti rendahnya prestasi anak usia sekolah, kesejahteraan petani dan pelaku UMKM, juga masalah kemiskinan seperti minimnya lapangan kerja dan kerawanan pangan (*food insecurity*), diharapkan dapat diselesaikan atau diminimalisir dengan program MBG.

#### **Analisis masalah agenda setting:**

Permasalahan yang dipetakan pemerintah memunculkan pertanyaan apakah permasalahan tersebut benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan. Pertanyaan lain yang juga muncul adalah apakah berbagai permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara efektif melalui proyek sebesar MBG.

Masalah yang dipotret pemerintah mulai dari malnutrisi, rendahnya prestasi siswa sekolah, tingginya persentase pengangguran di kalangan anak muda, kondisi petani yang kurang sejahtera, hingga masalah kelaparan adalah kondisi aktual di Indonesia. Contohnya masalah pangan. Berdasarkan Global Hunger Index (GHI) 2025<sup>80</sup>, Indonesia berada pada level kelaparan sedang (*moderate*) dengan skor 14,6, menduduki peringkat 70 dari 123 negara. Skor ini membaik dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 16,9.<sup>81</sup> Masalah kelaparan masih menjadi persoalan laten terutama di wilayah Timur Indonesia, seperti Papua Barat, NTT, Maluku dan sebagian Kalimantan.<sup>82</sup> Selain masalah pangan, capaian akademik siswa Indonesia masih tertinggal dari negara-negara Asia Tenggara, sebagaimana ditunjukkan oleh rendahnya skor PISA.<sup>83</sup>

Meski demikian, menyelesaikan persoalan multisektor melalui program MBG adalah upaya yang tidak realistis. MBG hanya bisa menyelesaikan masalah parsial/pingiran. Sebut saja masalah tengkes.

<sup>80</sup> Skor GHI dirumuskan dari empat indikator: 6,3% populasi kurang gizi (*undernourished*), 22,6% anak di bawah lima tahun stunting, 8,4% anak di bawah lima tahun wasting, dan 2,1% tingkat kematian anak di bawah lima tahun. Selengkapnya baca di laman <https://www.globalhungerindex.org/indonesia.html>

<sup>81</sup> "Indonesia ranks 77th in global hunger levels," *The Jakarta Post*, diakses pada 05 Januari 2026, <https://www.thejakartapost.com/indonesia/2024/11/07/indonesia-ranks-77th-in-global-hunger-levels.html>

<sup>82</sup> Ahadian Utama, "Penelitian FAO: 19,4 Juta Penduduk Indonesia Masih Mengalami Kelaparan," *VOA Indonesia*, 30 Mei 2015, [https://www.voaindonesia.com/a/pemelitian-fao-sembelan-belas-koma-empat-juta-penduduk-indonesia-masih-mengalami-kelaparan/2817021.html](https://www.voaindonesia.com/a/pemelitian-fao-sembelas-belas-koma-empat-juta-penduduk-indonesia-masih-mengalami-kelaparan/2817021.html)

<sup>83</sup> Siti Nur Salsabilah Silambona, "Skor PISA Indonesia Masih Rendah, Dikhawatirkan Disalip Vietnam-Timor Leste," *Detik.com*, 13 Desember 2025, <https://www.detik.com/edu/sekolah/d-8257399/skor-pisa-indonesia-masih-rendah-dikhawatirkan-disalip-vietnam-timor-leste>

Program MBG mungkin dapat meningkatkan asupan gizi ibu hamil dan balita, tetapi akar masalah tengkes tidak bisa dengan mudah terselesaikan dengan pemberian makanan bergizi. Ini karena masalah malnutrisi adalah persoalan kompleks yang melibatkan faktor multidimensi seperti ekonomi (kemiskinan), sosial budaya (perkawinan anak, pola asuh), sanitasi, pendidikan ibu, lingkungan fisik, akses layanan kesehatan primer, dan determinan ibu (usia, status gizi).

Begitu pula dengan masalah rendahnya prestasi anak sekolah. Program MBG mungkin dapat meningkatkan semangat siswa untuk datang ke sekolah karena adanya momen kebersamaan yang menyenangkan saat menyantap makanan bersama di kelas.<sup>84</sup> Akan tetapi, munculnya semangat belajar dan rasa senang makan bersama teman merupakan aspek yang sangat subjektif dan tidak dapat serta-merta disimpulkan memiliki korelasi langsung dengan peningkatan prestasi akademik siswa.

Persoalan rendahnya capaian akademik siswa sekolah di Indonesia sejatinya bermuara pada kualitas proses belajar-mengajar di sekolah. Jika pemerintah ingin fokus menyelesaikan permasalahan pokok di sektor pendidikan, prioritas seharusnya diberikan pada peningkatan aksesibilitas yang mencakup ketersediaan infrastruktur pendidikan, bantuan biaya pendidikan dengan subsidi atau beasiswa penuh, meningkatkan kesempatan anak Indonesia untuk mengembangkan potensinya, serta yang tidak kalah penting adalah meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pengajar atau guru.

Namun yang terjadi tidak demikian. Dana pendidikan dipangkas hampir setengah (44,2 persen) untuk megaproyek MBG. Kebijakan anggaran pendidikan yang dilakukan pemerintah pada awal tahun ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak berniat menyelesaikan akar permasalahan di sektor pendidikan. Padahal, alokasi anggaran pendidikan seharusnya bisa diarahkan pada kebijakan yang lebih substantif daripada dialokasikan untuk kebijakan parsial seperti program MBG.

## 4.2 Tahap formulasi dan perencanaan kebijakan

### Konsep tahap formulasi dan perencanaan dalam kebijakan

Tahap formulasi kebijakan publik merupakan fase penting dalam siklus kebijakan dan berada di antara *agenda setting* dan pembuatan keputusan. Tahap ini terjadi setelah masalah publik berhasil diidentifikasi dan diagendakan oleh pembuat kebijakan. Tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan, merancang berbagai alternatif solusi, dan memilih kebijakan terbaik yang dapat diimplementasikan secara efektif.<sup>85</sup> Proses ini melibatkan banyak aktor di dalamnya, mulai dari pemerintah hingga masyarakat sipil, serta dipengaruhi oleh berbagai faktor internal seperti kepemimpinan, komunikasi, dan motivasi serta faktor eksternal seperti ekonomi, sosial, dan infrastruktur.<sup>86</sup> Pada tahap ini para pembuat kebijakan dan aktor mengembangkan alternatif solusi, mempertimbangkan pro-kontra, mengukur sebab dan akibat dari kebijakan yang akan dibuat. Hasil akhir dari tahap formulasi ini adalah rancangan kebijakan yang menjadi dasar bagi pengambilan keputusan formal untuk tahap selanjutnya.

<sup>84</sup> Temuan ini dibahas lebih lanjut dalam bagian “Dampak Implementasi Program MBG”.

<sup>85</sup> Firda, I. M. S., Heryani, S., Mutiara, N. I. J. B., Permatasari, H. N., Firdaus, M. F., Sevtian, D., & Herdiana, D. (2025). Formulasi kebijakan publik: Konsep dan penelitian. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(6), 50–55.

<https://doi.org/10.59435/menulis.v1i6.324>

<sup>86</sup> *Ibid.*

## Bagaimana tahap formulasi dan perencanaan dalam program MBG dilakukan?

Proses formulasi kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dimulai dengan menganalisis masalah gizi dalam skala nasional. Pemerintah mengidentifikasi tingginya angka malnutrisi, tengkes, dan kebutuhan akan pangan bergizi yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia Indonesia. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kesehatan, pertumbuhan, perkembangan, dan kemampuan belajar anak sebagai investasi jangka panjang pembangunan manusia Indonesia. Sasaran dari kebijakan ini mencakup anak-anak dan kelompok rentan lainnya seperti balita, ibu hamil dan menyusui.

Kebijakan ini juga melibatkan pemerintah pusat-daerah dan aktor non-negara seperti UMKM, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi berbasis pangan lokal guna memperkuat ekonomi komunitas. Dalam tahap formulasi ini, kerangka kelembagaan dan tata kelola dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional yang merupakan koordinator dalam pelaksanaan program MBG, sekaligus menyiapkan alokasi anggaran sebesar sekitar Rp71 triliun untuk mendukung pelaksanaan dalam skala nasional.

Dalam tahap formulasi, desain kebijakan ini memerlukan dukungan seluruh pihak dan sinkronisme lintas sektor, terutama sektor pendidikan dan kesehatan dan koordinasi intensif pusat dan daerah. Kebijakan ini juga melibatkan aktor non negara seperti UMKM, koperasi, BUMDes untuk urusan rantai pasok pangan.

Dalam kerangka teoritis, proses ini sejalan dengan pandangan Wayne Parsons, yang menekankan bahwa formulasi kebijakan mencakup tahapan politis dan teknokratis, di mana kebijakan tersebut dirumuskan, dianalisis, dan dinegosiasi sebelum akhirnya ditetapkan sebagai regulasi resmi.<sup>87</sup> Rangkaian ini mencerminkan adanya proses penetapan masalah, perumusan tujuan, pemilihan alternatif solusi, hingga penetapan desain kebijakan sebelum akhirnya masuk ke tahap implementasi dan evaluasi.

### Analisis masalah tahap formulasi dan perencanaan kebijakan

Proses formulasi kebijakan diselenggarakan setelah masalah publik berhasil diidentifikasi dan diagendakan oleh para pembuat kebijakan. Program MBG diharapkan dapat memperkuat kualitas tumbuh kembang anak, meningkatkan konsentrasi belajar, menurunkan angka tengkes sehingga menghasilkan generasi yang sehat, cerdas, serta memiliki daya saing kuat di masa depan. Namun, pelaksanaan program MBG dimulai sebelum regulasi, standar, dan strategi implementasi dipersiapkan dengan matang. Walhasil, program MBG tak lepas dari kritik publik karena perencanaannya terburu-buru, minim payung hukum dan lemahnya tata kelola, kurangnya sosialisasi dan edukasi serta standar pelayanan minimal (SPM) yang tidak tegas sehingga menimbulkan sejumlah masalah di lapangan. Untuk itu, program MBG membutuhkan pembenahan menyeluruh dengan regulasi yang kuat dan partisipasi publik yang lebih luas.<sup>88</sup>

- **Perencanaan yang terburu-buru**

Kebijakan MBG dieksekusi tanpa landasan regulasi yang kuat (seperti UU) karena dipaksakan untuk mengejar target visi politik Presiden. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun 2025. Namun, ambisi untuk segera mencapai target tersebut membuat program ini dilaksanakan terburu-buru sehingga berdampak pada kualitas tata kelola

<sup>87</sup> Firda, I. M. S., dkk., *Op. Cit.*, hal. 50–55.

<sup>88</sup> Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI), "Policy Paper Series: Mengkaji Program Makan Bergizi Gratis – Pentingnya Penguatan Tata Kelola, Regulasi, dan Monitoring Evaluasi pada Program Makan Bergizi Gratis (2025)", hal 4, diakses 2 Desember 2025, <https://cisdi.org/riset-dan-publikasi/publikasi/dokumen/seri-dua-kajian-makan-bergizi-gratis>

penyediaan makanan dan distribusi makanan yang tidak merata dan tertata dengan baik.<sup>89</sup> Program MBG memang telah diimplementasikan di 31 provinsi hingga akhir Januari 2025, tapi pelaksanaannya masih belum ideal: terburu-buru dan tanpa persiapan yang memadai, termasuk ketiadaan persiapan yang sistematis terhadap aspek teknis dan operasional seperti kesiapan dapur, standar menu, dan sistem pengawasan yang baik.<sup>90</sup>

- **Tata kelola dan koordinasi yang bermasalah**

Sejak tahap formulasi, kelembagaan pelaksana program MBG seperti struktur SPPG serta hubungan antar pemerintah pusat-daerah belum didefinisikan secara detail. Hal ini berakibat pada ketidakjelasan dan lemahnya peran dan tanggung jawab institusi di tingkat lokal. Pada tahap formulasi, pemerintah seharusnya menetapkan mekanisme koordinasi yang jelas untuk institusi lintas sektor serta pemerintah pusat dan daerah. Hal ini akhirnya menimbulkan tantangan dalam standarisasi pelayanan.

- **Sistem data sumber daya manusia yang belum terintegrasi**

Dalam tahap formulasi kebijakan, pemerintah seharusnya mengukur sejauh mana kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki bisa mengimplementasikan desain kebijakan yang sudah dirancang sebelumnya. Sistem data terkait sumber daya manusia ini perlu terintegrasi guna melihat kebutuhan sumber daya manusia apa saja yang dibutuhkan dalam implementasi program MBG termasuk, ahli gizi, kepala dapur, juru masak, staf administratif, dan lain-lain. Namun, kebijakan MBG belum sepenuhnya menentukan strategi penempatan SDM dan peningkatan kapasitasnya sehingga timbul ketimpangan kompetensi yang dibutuhkan di lapangan.

- **Kurangnya partisipasi publik termasuk pakar dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG)**

Tahap formulasi kebijakan bukan saja agenda politis, melainkan juga proses teknokratis dan deliberatif yang seharusnya melibatkan pakar/ahli, kelompok kepentingan, dan masyarakat terdampak. Diskusi publik, seminar, hingga FGD adalah instrumen penting untuk melibatkan elemen masyarakat sipil dalam perumusan program. Sayangnya, kebijakan ini dieksekusi tanpa sosialisasi yang cukup. Padahal, edukasi publik penting dalam membangun kepercayaan untuk pelaksanaan program MBG.<sup>91</sup>

Lemahnya formulasi kebijakan MBG melahirkan desain kebijakan yang tidak tepat sasaran. Rapuhnya desain kelembagaan, pedoman operasional, dan mekanisme koordinasi berakibat pada buruknya implementasi kebijakan. Hal ini memengaruhi kualitas standar pelayanan, seperti ketidaksesuaian standar gizi yang berakibat keracunan massal dan masalah pengawasan lainnya. Wayne Parsons dalam teorinya menegaskan bahwa tahap formulasi merupakan tahap krusial untuk menerjemahkan tujuan kebijakan menjadi desain kebijakan dengan detail teknis dan operasional. Mengacu pada teori tersebut, kelemahan desain kebijakan dapat berimplikasi pada munculnya persoalan implementasi.<sup>92</sup>

<sup>89</sup> "Desakan Moratorium dan Evaluasi Total Program MBG Kian Menguat," *Kompas.id*, diakses pada 02 Februari 2026, <https://www.kompas.id/artikel/desakan-moratorium-dan-evaluasi-total-program-mbg-kian-menguat>

<sup>90</sup> "Tanpa Payung Hukum yang Jelas, Akuntabilitas MBG Dipertanyakan," *Pattiro*, diakses pada 14 Agustus 2025, <https://pattiro.org/2025/02/tanpa-payung-hukum-yang-jelas-akuntabilitas-mbg-dipertanyakan/>

<sup>91</sup> "Pakar Kebijakan Publik: MBG Perlu Diperkuat, Edukasi, Transparansi, dan Kualitas Gizi di Garis Depan," *Rejogja Republika*, diakses pada 03 Maret 2025, <https://rejogja.republika.co.id/berita/t4m9lk291/pakar-kebijakan-publik-mbg-perlu-diperkuat-edukasi-transparansi-dan-kualitas-gizi-di-garis-depan>

<sup>92</sup> Parsons, W. (1995). *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis*, 457-503.

Dalam perspektif *behavioral public policy*, kebijakan MBG memiliki *behavioral-design gap* yakni desain yang mengabaikan kebiasaan, perilaku, dan bias manusia. Kegagalan kebijakan dapat terjadi karena adanya dua kesenjangan yakni *behavioral-design gap*, kegagalan desain kebijakan yang mengabaikan keterbatasan perilaku manusia dan arsitektur pilihan sebagaimana dibahas oleh Thaler dan Sunstein<sup>93</sup>, dan *behavioral-practice gap*, yang mengacu pada penyimpangan implementasi akibat perilaku birokrasi garis depan, keterbatasan kapasitas, dan diskresi pelaksana sebagaimana dijelaskan oleh Lipsky<sup>94</sup>.

*Behavioral design gap* terjadi ketika desain kebijakan tidak sesuai dengan realitas perilaku aktor. Misalnya, pengelola dapur sebagai aktor diasumsikan akan mengikuti standar operasional prosedur yang ada. Namun, mereka dihadapkan pada realitas yang berbeda: tertekan biaya, waktu, dan tenaga sehingga mengorbankan kualitas. Sekolah, sebagai aktor, bertindak selaku pengawas, tetapi realitas perilaku menunjukkan bahwa mereka memiliki prioritas untuk mengajar sehingga MBG menjadi beban kerja baru. Anak-anak diasumsikan akan menyantap sajian MBG yang sudah disiapkan, tapi realitas perilaku menunjukkan bahwa mereka memiliki preferensi makanan yang berbeda sehingga menolak hidangan MBG. Orang tua yang diasumsikan dapat memberikan dukungan tetapi realitas perilakunya meragukan sajian MBG. *Behavioral design gap* ini didasarkan pada asumsi yang salah tentang perilaku manusia atau gagal memasukkan wawasan perilaku (*behaviour insights*) yang relevan secara efektif.

Dalam perspektif *behavioral public policy*, program MBG dianggap gagal karena desain kebijakannya tidak mengedepankan intervensi perubahan perilaku makan sehat dalam skala nasional, melainkan distribusi makanan belaka.

## 4.3 Tahap implementasi kebijakan

### Konsep tahap implementasi kebijakan

Tahap implementasi kebijakan ini merupakan tahapan di mana proses keputusan kebijakan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata oleh aktor pelaksana untuk mencapai tujuan kebijakan. Implementasi mencakup penjabaran kebijakan ke dalam aturan teknis dan prosedur operasional, pengorganisasian aktor pelaksana dan mekanisme koordinasi, penyediaan sumber daya yang memadai, pelaksanaan program kebijakan oleh birokrasi pelaksana, serta pengawasan dan penyesuaian selama proses berjalan. Tahapan ini juga merupakan proses interaktif yang dipengaruhi oleh struktur kelembagaan, relasi kekuasaan, kapasitas organisasi, dan dinamika lingkungan politik.<sup>95</sup> Keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada bagaimana kebijakan diterjemahkan dalam praktiknya, bagaimana aktor pelaksana meresponsnya, dan sejauh mana kebijakan mampu beradaptasi pada kenyataan di lapangan.<sup>96</sup>

### Bagaimana tahap implementasi dalam program MBG dilakukan?

Pada tahap pelaksanaan program MBG, proses di lapangan dilakukan secara bertahap dan terstruktur. Pelaksanaannya dimulai dari kebijakan nasional yang kemudian diterjemahkan menjadi petunjuk teknis dan standar operasional. Dokumen tersebut mengatur sasaran penerima, standar gizi, serta mekanisme penyediaan dan distribusi makanan yang dikoordinasikan bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah daerah.

<sup>93</sup> Thaler, R. & Sunstein, C. (2008). *Nudge*. Yale University Press, 1-14.

<sup>94</sup> Lipsky, M. (2010). *Street-Level Bureaucracy*. Russell Sage, 13-25.

<sup>95</sup> Parsons, Wayne., *Op. Cit.*, hal 463-464.

<sup>96</sup> *Ibid.*

Pembagian MBG memiliki prosedur pembagian makanan yang berbeda-beda di setiap jenjang pendidikan. Untuk jenjang PAUD, TK, hingga SD, pembagian makanan dilakukan antara pukul 07.00–09.30 pagi. Penerima manfaat dari jenjang SMP-SMA menerima hidangan MBG lebih siang, yakni sekitar pukul 10.00–11.30. Pada awal implementasi program di tahun 2025, beberapa sekolah ditunjuk menjadi *pilot project* sebelum MBG dibagikan ke seluruh sekolah di wilayah sasaran.

**Gambar 3.** Pembagian MBG di SD Pagi



**Gambar 4.** Para siswa SD Pagi mengantre MBG



Sumber foto: dokumentasi pribadi

Dalam penentuan menu, setiap hari para siswa memperoleh menu makanan yang berbeda. Pada hari khusus yang dipilih, siswa menerima makanan dengan kriteria tertentu. Misalnya SMP Gapai Cita lebih sering menerima burger ketimbang nasi dan lauk pauk setiap hari Jumat. Selain itu, satu SPPG di suatu wilayah bisa menyajikan MBG ke beberapa sekolah yang artinya jumlah porsi yang dibagikan dalam satu hari mencapai ribuan.

#### **Masalah dalam tahap implementasi:**

- **Keterlambatan distribusi MBG ke sekolah**

Salah satu masalah yang muncul di tahap implementasi adalah buruknya manajemen distribusi MBG ke sekolah-sekolah, seperti keterlambatan pembagian makanan. Keterlambatan ini menyebabkan makanan yang seharusnya disajikan segar menjadi basi. Permasalahan keterlambatan distribusi MBG banyak ditemukan di kuartal pertama tahun 2025. Dua sekolah yang menjadi percontohan yakni SMPN 24 Ambon dan SMPN 12 Semarang mengalami keterlambatan distribusi MBG. Pelajar SMPN 12 Semarang yang seharusnya menyantap MBG pukul 12.30 WIB molor hingga pukul 13.30 WIB, sedangkan siswa SMPN 24 Ambon harus menunggu sampai jam dua siang. Para siswa di kedua sekolah tersebut mengeluhkan makanan yang disajikan sudah tidak segar dan bau. Siswi SMP Negeri 12 Semarang, misalnya menemukan sayur yang sudah basi. Tidak hanya hidangannya yang menjadi bau, siswa SMPN 24 Ambon juga sudah tidak berselera makan karena menunggu terlalu lama.

Keterlambatan distribusi MBG juga terjadi di SMP Negeri 18 Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Keterlambatan selama 40 menit membuat aktivitas belajar para siswa di sekolah tersebut menjadi terganggu. Beberapa siswa harus menahan lapar karena hidangan MBG yang tidak kunjung datang. Sementara itu, siswa lainnya memilih untuk membeli makanan di kantin sekolah. Di SMP Negeri 5 Ngawi para siswa juga terpaksa menahan lapar karena menunggu MBG yang seharusnya sudah tersedia pada pukul 10 pagi datang pukul 12 siang. Guru SMP Negeri 5 Ngawi mengatakan keterlambatan tersebut berdampak pada jadwal istirahat siswa.

**Gambar 4.3.1** Menu MBG di SD Pagi



Sumber foto: dokumentasi pribadi

SD Pagi di Kota Waingapu, NTT bahkan pernah mengalami keterlambatan pembagian MBG hingga jam pulang sekolah. Lalu, petugas SPPG menawarkan solusi untuk membagikan makanan ke masing-masing rumah siswa. Namun, solusi tersebut ditolak Kepala Sekolah dan guru SD Pagi. Pihak sekolah juga tidak tahu harus melapor kepada siapa mengenai keterlambatan distribusi tersebut. Selain itu, jadwal pembagian MBG di SD Pagi juga tidak menentu. Terkadang makanan diantarkan pukul 07.30, tetapi suatu waktu sajian MBG baru datang pukul 08.00 atau 09.00. Target pembagian MBG kepada siswa juga tidak merata. Dengan jumlah siswa sebanyak 273, hanya kelas 1, 2, 3, yang mendapatkan MBG pada satu hari dan kelas 4, 5, 6 mendapat giliran keesokan harinya.

- **Makanan yang disajikan basi dan tidak higienis**

Sejak awal kali MBG dibagikan di kuartal pertama, kejadian makanan basi, tidak higienis, atau belum matang sudah bermunculan. Makanan basi dan tidak higienis menjadi pemicu utama KLB keracunan. Siswa yang menjadi korban keracunan umumnya merasakan gejala yang sama: mual, sakit perut, dan muntah, hingga harus dilarikan ke rumah sakit karena kondisi yang semakin parah. Ketidakhigienisan makanan terbukti dari hasil uji sampel yang dilakukan oleh dinas kesehatan terhadap kasus keracunan di Bandung, Bogor, dan Tasikmalaya di Jawa Barat serta Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Sumatra Selatan. Hasil investigasi menemukan adanya kontaminasi berbagai mikroorganisme patogen dalam makanan, seperti bakteri *Salmonella*, *Escherichia coli*, *Bacillus cereus*, *Staphylococcus aureus*, *Bacillus subtilis*, hingga jamur *Candida tropicalis*.<sup>97</sup>

Peneliti sempat mewawancarai dua murid SMP Gapai Cita, di Yogyakarta, yang sempat mengalami kasus keracunan massal. Dua siswa tersebut mengatakan bahwa makanan yang membuat mereka keracunan adalah menu rawon dengan tauge yang rasanya asam dan daging yang bau. Seusai makan, para murid belum merasakan gejala apapun. Namun, beberapa siswa mengeluhkan sakit perut di malam hari hingga harus dilarikan ke puskesmas pada pagi hari.

<sup>97</sup> "MBG: Ribuan Siswa Keracunan Makan Bergizi Gratis, Orang Tua Trauma dan Larang Anaknya Konsumsi MBG," *BBC News Indonesia*, diakses pada 23 Januari 2026, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cm2zney05ypo>

Selain para murid, guru yang menyantap MBG juga mengeluhkan sakit perut di malam hari. Meskipun para siswa dan guru mengalami keracunan, MBG tetap dibagikan ke SMP Gapai Cita keesokan harinya. Namun, guru enggan memberikan kepada siswa.

▪ **Makanan yang disajikan tidak bergizi**

Meski tujuan utama program MBG adalah mendistribusikan makanan bergizi, kenyataan di lapangan berkata sebaliknya. Informasi yang beredar di media sosial maupun media nasional menunjukkan sebagian porsi MBG tidak mencerminkan makanan bergizi seimbang. Makanan yang dibagikan kerap kali berupa *ultra process food* (UPF), susu kemasan dengan kadar gula yang tinggi, atau proporsi menu yang tidak seimbang antara protein, lemak, karbohidrat, dst. SMP Islam Kawasan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, misalnya menerima sajian MBG yang terdiri dari keripik tempe, kacang goreng, biskuit kemasan, dan satu buah jeruk.<sup>98</sup> Menu ini kemudian viral karena secara tampilan memang tidak mengandung gizi seimbang: biskuit yang termasuk UPF dan tempe goreng yang bentuknya sangat tipis.

Selanjutnya, salah satu komponen dalam menu yang cukup viral di media sosial kala itu adalah susu kemasan impor dari Tiongkok yang kandungan gula dan airnya lebih banyak dari kandungan susu murni. Satu kemasan susu tersebut (125ml) diberitakan mengandung 86 persen air, 14 gram gula, dan 1 persen bubuk susu skim. Menurut spesialis gizi dr Nathania Sheryl Sutisna, SpGK, produk dengan kandungan tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai susu. Murid yang mengonsumsi susu tersebut memang akan merasa kenyang, tetapi hanya mendapatkan gizi yang semu.<sup>99</sup>

Saat mengunjungi SMP Gapai Cita pada hari Jumat bulan November 2025, peneliti mendapati menu *burger* sebagai sajian MBG. Berdasarkan keterangan dari seorang guru yang bertugas mengurus MBG, menu ringan seperti *burger* memang biasa diberikan kepada siswa setiap hari Jumat.

**Gambar 4.3.2** Menu MBG di SMP Gapai Cita



Sumber foto: dokumentasi pribadi

<sup>98</sup> "Viral Menu MBG di Ciseeng Bogor Keripik Tempe-Kacang, BGN Bakal Cek SPPG," *detikNews*, diakses pada 15 Januari 2026, <https://news.detik.com/berita/d-8267165/viral-menu-mbg-di-ciseeng-bogor-keripik-tempe-kacang-bgn-bakal-cek-sppg>

<sup>99</sup> "Heboh 'Susu' dari China Diduga Jadi Menu MBG, Dokter Gizi Soroti Ini," *detikHealth*, diakses pada 23 Januari 2026, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-8292011/heboh-susu-dari-china-diduga-jadi-menu-mbg-dokter-gizi-soroti-ini>

Hidangan MBG berupa *burger* seperti yang terlihat pada foto di atas masih berupa bahan-bahan terpisah; olahan daging *burger (patty)*, keju lembar dalam kemasan plastik, seiris timun dan tomat, buah kelengkeng, dan saus. Roti yang disajikan bukan roti gandum, melainkan roti biasa yang termasuk UPF. Sementara itu, kandungan vitamin yang bersumber dari buah dan sayuran relatif minim karena porsinya yang sangat sedikit.

Ternyata, menu burger bukan hanya ada di SMP Gapai Cita. Beberapa sekolah juga diberikan menu *burger* dan *spaghetti*. Menurut dokter ahli gizi Tan Shot Yen, menu seperti *burger*, *spaghetti*, dan semacamnya tidak berbasis bahan pangan lokal. Lebih lanjut, ia juga mengkritisi komposisi burger yang tidak layak disajikan seperti isian daging yang terlalu tipis.<sup>100</sup> Ia mengingatkan bahwa MBG seharusnya mendukung diversifikasi pangan lokal.

▪ **Lauk-pauk tidak matang dan rasa masakan yang hambar tidak menggugah selera**

Meskipun sebagian penerima manfaat (siswa) mengatakan menu MBG enak, tidak sedikit juga siswa yang merasakan sajian MBG hambar. Siswa pun tidak berselera untuk makan karena rasa hidangan yang tidak menggugah selera. Seorang siswa di SMP Negeri 61 Slipi, Jakarta Barat misalnya, tidak memakan sayur dalam menu MBG karena rasanya yang hambar.<sup>101</sup> Hal serupa juga dilakukan siswi dari SMP 1 Barunawati Jakarta yang enggan memakan sayur dalam menu MBG karena rasanya hambar.<sup>102</sup> Menu yang tidak disantap oleh siswa ini berpotensi menambah limbah sisa makanan. Data Bappenas menunjukkan sisa makanan dari program MBG mencapai 1,1–1,4 juta ton per tahun. Selain itu, makanan yang tidak dikonsumsi tersebut juga berarti pemborosan anggaran.

Selain rasa menu yang hambar, beberapa sekolah-sekolah diberitakan menerima menu tidak layak konsumsi, misalnya lauk-pauk yang masih mentah atau ayam yang dimasak setengah matang. Pada awal tahun 2026, media sosial sempat ramai oleh menu MBG di SMAN 1 Cigemblong, Lebak Banten yang berisi telur mentah. Pihak SPPG mengaku ada sekitar 15 kilogram telur mentah yang didistribusikan ke SMAN 1 Cigemblong. Berdasarkan foto yang diperoleh dari liputan media, terlihat bahwa putih dan kuning telur masih utuh dalam wujud cair setelah cangkang telur dipecahkan di salah satu sekat ompreng, mengindikasikan bahwa telur tersebut sama sekali belum dimasak.<sup>103</sup> Selain telur mentah, ompreng tersebut juga memperlihatkan jagung mentah.<sup>104</sup>

<sup>100</sup> "Menu MBG Burger-Spageti Disentil Ahli Gizi, BGN: Hanya Sese kali," *detikSumbagsel*, diakses pada 02 Desember 2025, <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-8132793/menu-mbg-burger-spageti-disentil-ahli-gizi-bgn-hanya-sese kali>

<sup>101</sup> "Program Makan Bergizi Gratis: Keluhan Rasa Hambar dan Omzet Kantin Menurun", diunggah oleh Liputan 6, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=4vf8Y2hmIfI>

<sup>102</sup> "Fakta-fakta Makan Gratis: Curhat Rasa Hambar hingga Sistem Reimburse," *CNN Indonesia*, diakses pada 05 Januari 2026, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250108063924-20-1184848/fakta-fakta-makan-gratis-curhat-rasa-hambar-hingga-sistem-reimburse>

<sup>103</sup> "MBG di Cigemblong Lebak Isi Telur Mentah, Wakepek: Kemarin Belatung di Sayur," *detikNews*, diakses pada 03 Februari 2026, <https://news.detik.com/berita/d-8323385/mbg-di-cigemblong-lebak-isi-telur-mentah-wakepek-kemarin-belatung-di-sayur>

<sup>104</sup> "Menu MBG Telur dan Jagung Mentah Viral, SPPG Sudah Tiga Kali Lakukan Kesalahan," *RadarBanten.co.id*, diakses pada 03 Februari 2026, <https://www.radarbanten.co.id/2026/01/25/menu-mbg-telur-dan-jagung-mentah-viral-sppg-sudah-tiga-kali-lakukan-kesalahan/>

- **Makanan yang disajikan tidak sesuai dengan keberagaman daerah**

Beberapa menu MBG yang disajikan tidak sesuai dengan keragaman pangan lokal, contohnya menu *burger* di SMP Gapai Cita, DI Yogyakarta. Selain *burger*, ada juga SPPG yang menyajikan *spaghetti*. SD Pagi, Kota Waingapu, NTT mengaku pernah menerima menu MBG berupa salad: sayuran mentah yang disiram saus mayones. Guru dan Kepala Sekolah yang peneliti wawancarai mengatakan menu tersebut tidak familiar untuk para murid. Keduanya juga menyampaikan bahwa anak-anak di Indonesia Timur tidak terbiasa memakan salad berisi sayuran mentah yang barangkali lebih cocok untuk para siswa di Pulau Jawa. Selain itu, rata-rata para siswa SD Pagi menyampaikan bahwa porsi nasi yang disajikan dalam ompreng lebih sedikit dibandingkan porsi yang biasa mereka konsumsi di rumah. Akibatnya, guru SD Pagi menyarankan agar siswa tetap membawa bekal dari rumah untuk mencegah rasa lapar selama jam belajar.

- **Dapur SPPG tidak menjaga higienitas peralatan makanan**

Menjaga kebersihan dapur, peralatan masak, dan peralatan makanan merupakan standar yang tidak bisa ditawar karena sangat menentukan kualitas dan keamanan pangan (*food safety*). Jika menu yang disajikan tidak higienis, besar kemungkinan disebabkan oleh ketidakpatuhan dapur SPPG dalam menjalankan SOP. Sebuah video yang beredar di media sosial, misalnya memperlihatkan SPPG di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat yang mencuci ompreng dengan air keruh berwarna kecokelatan dan tidak mengalir.<sup>105</sup> Mencuci peralatan makanan dengan air yang tidak mengalir berisiko mengendapkan bakteri sehingga berpotensi mencemari ompreng yang nantinya diisi makanan. Proses pencuciannya pun dilakukan asal-asalan: alih-alih mencucinya dengan bersih, ompreng hanya digoyang-goyangkan sebentar di dalam ember berisi air keruh secara bergantian, kemudian langsung ditumpuk kembali untuk digunakan.

Kasus lainnya terjadi di SPPG Sidomulyo, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah yang tidak memenuhi standar kebersihan dapur. Tampak dari video yang beredar<sup>106</sup> ada tumpukan sampah hasil pembuatan makanan di dalam dapur. Bahkan, lokasi dapur yang berdekatan dengan saluran limbah terbuka yang terdiri dari campuran limbah dan sampah makanan menyebabkan bau tidak sedap dan tercium hingga ke area luar dapur. Koordinator SPPG Blora sekaligus penanggung jawab program MBG membenarkan bahwa dapur SPPG tersebut tidak memiliki sistem sanitasi yang memadai.<sup>107</sup> Selain kondisi dapur yang kotor, peralatan makan dan memasak juga tidak tertata dengan baik.

### **Analisis masalah dan refleksi pada tahap implementasi kebijakan**

Dalam analisis tata kelola, masalah dalam sumber daya manusia dalam implementasi program MBG yaitu kekurangan jumlah ahli gizi yang terqualifikasi. SPPG yang tidak memiliki ahli gizi yang mumpuni berpotensi menyajikan menu harian yang tidak memenuhi standar gizi seimbang. Selain itu, lulusan SMA yang hanya diberikan pelatihan singkat terkait pengelolaan gizi tentu tidak memiliki pengetahuan yang sebanding dengan sarjana gizi. Termasuk sarjana gizi yang baru lulus belum tentu mampu menghasilkan perencanaan dan pengawasan makanan yang memenuhi standar gizi seimbang. Kompleksitas program

---

<sup>105</sup> "SPPG di Bandung Barat Cuci Ompreng MBG Tidak Layak dan Jorok," *IDN Times Jabar*, diakses pada 03 Februari 2026, <https://jabar.idntimes.com/news/jawa-barat/sppg-di-bandung-barat-cuci-ompreng-mbg-tidak-layak-dan-jorok-00-nqtv-0c7kq7>

<sup>106</sup> "Viral Dapur SPPG di Blora Disorot karena Dinilai Tidak Higienis, Belum Punya Ahli Gizi," *Tribun Sumsel*, diakses pada 05 Januari 2026, <https://www.youtube.com/watch?v=1eeSj69Pval>

<sup>107</sup> "Koordinator SPPG Blora Instruksikan Benahi Dapur MBG Belum Standar," *ANTARA News Jateng*, 08 Januari 2026, <https://jateng.antaranews.com/berita/603309/koordinator-sppg-blora-instruksikan-benahi-dapur-mbg-belum-standar>.

MBG membutuhkan ahli gizi tersertifikasi yang memiliki latar belakang pendidikan linear dan pengalaman profesional bertahun-tahun.

Hal ini sejalan dengan pendapat dokter pakar gizi, bahwa peran ahli gizi di dapur SPPG tidak bisa dikompromikan. Menurutnya, setiap penerima manfaat memiliki kebutuhan gizi yang berbeda-beda. Siswa yang obesitas atau gizi buruk tentu memiliki kebutuhan asupan yang berbeda dengan ibu hamil yang mengalami anemia atau remaja yang kurang berenergi. Kemampuan untuk menakar kebutuhan gizi dan memetakannya tidak bisa dilatih hanya dalam waktu tiga bulan.<sup>108</sup>

Selain kekurangan ahli gizi yang terqualifikasi, masalah lain program MBG adalah pendanaan. Persoalan pendanaan mungkin jarang dibahas karena dana yang digelontorkan dari pemerintah pusat untuk program MBG sangat besar, hingga mengambil porsi anggaran sektor utama lainnya. Namun, persoalan pendanaan justru muncul ketika anggaran tersebut sampai dan dikelola di tingkat SPPG. Sejumlah simulasi harga menunjukkan bahwa satu porsi MBG dengan anggaran Rp10.000 sulit untuk memenuhi standar makanan bergizi seimbang. Dalam beberapa kasus, anggaran per porsi dinaikkan menjadi Rp12.000, seperti yang terjadi di SPPG Matahari Sore di Yogyakarta. Akan tetapi, penyesuaian tersebut memotong anggaran untuk gaji pegawai dapur sehingga upah yang diterima relatif rendah.

Persoalan lain dalam tata kelola MBG adalah lemahnya manajemen distribusi dalam pelaksanaan program. Dengan banyaknya target penerima manfaat dalam sehari, manajemen distribusi yang buruk menyebabkan makanan datang terlambat. Dalam sehari, SPPG bisa mendistribusikan makanan ke beberapa sekolah, sementara satu sekolah saja terdiri dari ratusan siswa. Dengan demikian, jumlah omprong yang dikirim setiap hari diperkirakan mencapai ratusan hingga ribuan. Kondisi ini menjadi masalah ketika makanan yang dimasak sejak tengah malam di dapur SPPG baru tiba di sekolah pada siang hari, misalnya di atas pukul 12.00. Dalam situasi seperti ini, besar kemungkinan siswa menerima makanan yang sudah tidak segar atau basi.

Selain permasalahan waktu distribusi yang menyebabkan makanan menjadi basi, hidangan MBG juga dibayangi isu higienitas. Proses pengolahan makanan yang tidak higienis bermula dari kondisi dapur yang kotor, kelalaian pengolahan makanan, hingga pencucian peralatan makan dan masak yang menyalahi standar kebersihan. Sebab utamanya adalah ketidakpatuhan SPPG menaati SOP dan belum mengantongi sertifikat SLHS dan HACCP sehingga dapur SPPG beroperasi tanpa standar keamanan pangan yang jelas. Kondisi ini semakin diperparah oleh pengawasan yang tidak dilakukan secara ketat. Meski beberapa daerah sudah melakukan inspeksi rutin ke dapur SPPG, sebagian besar daerah lain kemungkinan belum melaksanakannya. Sebab, target nol untuk kasus keracunan belum tercapai malah mencapai hampir 2.000 kasus hingga awal tahun 2026.<sup>109</sup>

Sajian menu makanan yang tidak selaras dengan kearifan lokal menunjukkan bahwa program MBG belum disertai sosialisasi dan kerja sama lintas pihak dalam perencanaan menu. Di SD Pagi, Kota Waingapu, NTT, misalnya, narasumber menyampaikan bahwa pihak sekolah tidak memperoleh sosialisasi terlebih dahulu terkait pembagian MBG pada 7 Februari 2025. Idealnya, perencanaan menu MBG, termasuk jenis menu dan porsi, dibahas terlebih dahulu dengan pihak-pihak terkait, terutama sekolah, agar kebutuhan riil siswa dapat diketahui. Namun, kolaborasi antara SPPG terkait dan dinas pendidikan di kota Waingapu tidak terjadi. Apabila koordinasi dengan pemerintah daerah berjalan

<sup>108</sup> "Makan Bergizi Tanpa Ahli Gizi," *Tempo.co*, diakses pada 03 Februari 2026, <https://www.tempo.co/politik/dapur-mbg-tanpa-ahli-gizi-2091627>

<sup>109</sup> "Korban keracunan MBG sepanjang Januari 2026 tembus hampir 2.000 pelajar, mengapa masih saja terjadi?, *BBC News Indonesia*, diakses pada 28 Februari 2026, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cvg5eywd109o>

secara optimal, BGN semestinya dapat menyesuaikan menu MBG yang mendukung diversifikasi pangan lokal setempat.

## 4.4 Tahap monitoring dan evaluasi kebijakan

### Konsep tahap monitoring dan evaluasi kebijakan

Tahap monitoring dan evaluasi kebijakan adalah tahapan akhir dalam rangkaian siklus kebijakan. Monitoring dilakukan untuk memantau apakah program berjalan sesuai dengan rencana yang dirumuskan saat tahap implementasi. Pada tahap monitoring, sejumlah data harus dikumpulkan secara berkala, misalnya bulanan, triwulan, atau tahunan. Adapun data yang dikumpulkan seperti anggaran yang sudah dialokasikan, jumlah penerima manfaat yang sudah diberikan bantuan, atau jumlah daerah yang sudah dijangkau. Dalam tahap monitoring, ada umpan balik atas pelaporan kinerja yang sudah dimonitor. Laporan hasil monitoring dilaporkan kepada koordinator atau pengambil keputusan. Jika program tidak berjalan sesuai dengan prosedur dan terjadi penyimpangan, maka tindakan korektif bisa langsung dilakukan tanpa menunggu program selesai berjalan.

Evaluasi digunakan untuk menilai *output* program: apakah program berhasil mencapai tujuannya dan dampak yang dihasilkan sesuai dengan harapan. Untuk menilai dampak, ada kausalitas dan korelasi yang perlu dipertimbangkan. Artinya sebuah dampak tidak otomatis disebabkan oleh kebijakan yang sedang berjalan. Misalnya dalam kasus program Makan Bergizi Gratis (MBG), penurunan angka tengkes tidak serta merta disebabkan oleh program MBG. Oleh karena itu, evaluasi dampak perlu dilakukan secara hati-hati dan komprehensif.

Baik evaluasi maupun monitoring membutuhkan indikator kinerja (apa saja yang diukur) dan *baseline* data sebagai titik pembanding, misalnya prevalensi tengkes sebelum adanya MBG. Hasil analisis tahap monitoring dan evaluasi digunakan untuk pengambilan keputusan atas langkah berikutnya: apakah program akan dilanjutkan, dimodifikasi, atau dihentikan sementara atau total.

### Bagaimana tahap monitoring dan evaluasi dalam program MBG dilakukan?

Hingga saat ini, BGN sebagai koordinator utama program MBG belum melakukan evaluasi mengenai dampak program terhadap tujuan awal MBG dilaksanakan, apakah program MBG berhasil menurunkan tengkes atau tidak. Menilai penurunan prevalensi tengkes mungkin masih terlalu dini untuk dilakukan, kala program baru berjalan selama satu tahun. Namun, evaluasi mengenai dampak lainnya yang termaksudkan, misalnya peningkatan kehadiran siswa di sekolah, juga belum dilakukan oleh BGN.

Berdasarkan informasi yang beredar di media, BGN telah melakukan monitoring melalui inspeksi mendadak ke sejumlah SPPG di beberapa daerah. Belum diketahui sudah berapa daerah yang rutin dilakukan inspeksi mendadak, bagaimana cakupan wilayahnya, dan seberapa sering dilakukan, tetapi BGN menyebut inspeksi mendadak sudah dilakukan sejak awal peluncuran program yang dimulai Februari 2025 lalu.<sup>110</sup> Jika ada kondisi yang tidak sesuai SOP, BGN memberikan tenggat waktu dua minggu kepada SPPG untuk melakukan perbaikan, dari pembenahan infrastruktur hingga tata kelola. Apabila tidak ada perbaikan selama dua minggu, maka SPPG akan ditutup sementara.

Ketika ada kasus KLB keracunan, hal yang pertama dilakukan pemerintah daerah adalah melakukan investigasi terhadap kasus keracunan massal dengan bantuan kepolisian. Kemudian, uji sampel

<sup>110</sup> "BGN Rutin Sidak Dapur MBG, Diberi Waktu Perbaikan Sampai Sanksi Penutupan," *Kompas.com*, diakses pada 25 Februari 2026, <https://nasional.kompas.com/read/2026/01/19/15383041/bgn-rutin-sidak-dapur-mbg-diberi-waktu-perbaikan-sampai-sanksi-penutupan>

dilakukan di laboratorium dengan didampingi dinas kesehatan untuk mengetahui penyebab keracunan. Menurut standarisasi BGN, SPPG harus ditutup sementara ketika terjadi keracunan massal. Jika tidak ada perbaikan atau terjadi kasus keracunan berulang, maka SPPG ditutup permanen.

#### **Masalah dalam tahap monitoring dan evaluasi:**

- **Minimnya pengetatan implementasi SOP penyiapan makanan hingga distribusi ke sekolah**  
Minimnya pengetatan SOP di tataran teknis menyebabkan proses penyiapan makanan hingga distribusi ke sekolah menjadi berantakan. Pengawasan terhadap seluruh proses pembuatan makanan sulit dilakukan karena beberapa dapur SPPG memasak terlalu dini. Akibatnya, kesegaran makanan yang disajikan tidak dapat bertahan hingga saat waktu distribusi tiba.

Selain persoalan pada tahap penyiapan, keterlambatan pembagian makanan ke sekolah juga menunjukkan bahwa manajemen distribusi belum berjalan optimal. SOP terkait distribusi sebenarnya sudah diatur dalam dokumen BGN<sup>111</sup>, tapi masalah keterlambatan terletak pada implementasi di tingkat SPPG. Tata kelola distribusi yang buruk juga memperbolehkan satu SPPG melayani beberapa sekolah sekaligus dengan total penerima manfaat yang bisa mencapai ratusan ribu siswa. Praktik ini menyebabkan sejumlah sekolah terlambat menerima hidangan MBG.

- **Minimnya pengetatan pelaksanaan SOP untuk menjaga kebersihan dapur SPPG.**  
Monitoring tataran teknis, seperti kepatuhan dapur SPPG menjalankan SOP belum berjalan secara optimal. Permasalahan yang paling menonjol adalah tidak terjaganya higienitas sanitasi di dapur SPPG. Sejumlah video yang beredar di media sosial memperlihatkan tempat pencucian peralatan di dapur SPPG menggunakan air berwarna keruh. Beberapa dapur SPPG juga terlihat berantakan. Selain masalah higienitas dan kerapian, ada bangunan SPPG yang dibangun dekat dengan perternakan hewan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pengetatan terhadap pelaksanaan SOP sejak pendirian SPPG. Jika SOP benar-benar dijalankan dan diawasi, pembangunan SPPG yang dekat dengan peternakan hewan atau bekas peternakan hewan tentu tidak akan mengantongi izin.
- **Minimnya evaluasi dan monitoring kandungan gizi pada makanan**  
Berbagai unggahan di media sosial menunjukkan bahwa sejumlah makanan yang disajikan belum memenuhi prinsip gizi seimbang. Misalnya, susu yang diberikan memiliki kandungan gula yang relatif tinggi. Selain itu, beberapa menu masih menyertakan *ultra-processed food* (UPF) seperti roti, wafer, dan biskuit kemasan. Temuan ini mengindikasikan bahwa perencanaan menu belum melalui pengawasan yang memadai dari tenaga ahli gizi.

Lebih lanjut, perhitungan kandungan gizi dalam satu porsi (ompreng) yang dilakukan oleh salah satu SPPG menunjukkan lemahnya mekanisme monitoring. Kondisi ini kemungkinan disebabkan oleh ketiadaan tenaga ahli gizi yang memiliki kompetensi untuk menakar komposisi nutrisi dalam setiap sajian.

Praktik pemberian makanan cepat saji seperti *burger* secara berulang, yang menurut rekomendasi ahli gizi tidak ideal bagi anak-anak, juga menunjukkan bahwa kajian dan pengendalian mutu terhadap standar gizi program MBG belum berjalan secara optimal. Selain

<sup>111</sup> Lihat halaman 94 dalam “Pedoman Umum Sistem dan Tata Kelola badan Gizi Nasional Untuk Program Makan Bergizi Gratis”, <https://www.bgn.go.id/juknis/LEP9KP-pedoman-umum-sistem-dan-tata-kelola-badan-gizi-nasional-untuk-program-makan-bergizi-gratis>

itu, siswa yang mengalami trauma psikologis akibat keracunan MBG belum mendapatkan penanganan tindak lanjut.

### **Analisis masalah dan refleksi pada tahap monitoring dan evaluasi kebijakan**

Ketiadaan payung hukum yang mengikat dokumen SOP menyebabkan implementasi program MBG di lapangan berjalan serampangan. Selain itu, kepemilikan sertifikat SLHS dan HACCP yang tidak diwajibkan sejak awal pelaksanaan program membuat banyak dapur SPPG beroperasi tanpa standar higienitas yang jelas, bahkan menunjukkan kondisi dapur yang tidak layak.

Lebih lanjut, saling lempar tanggung jawab antarperangkat pelaksana program MBG serta ketidakjelasan mekanisme akuntabilitas menyebabkan evaluasi program MBG terhambat. Salah satu narasumber di SD Pagi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menuturkan bahwa pihak vendor (mitra SPPG) menunjukkan reaksi defensif ketika ditemukan ayam yang belum matang dalam sajian makanan. Padahal, pengolahan makanan tersebut dilakukan di dapur SPPG yang berada di bawah tanggung jawab mitra. Vendor bahkan sempat mengancam akan menghentikan distribusi MBG ke sekolah tersebut. Namun, kepala sekolah menegaskan bahwa program MBG merupakan program pemerintah dan tidak dapat dihentikan secara sepihak oleh mitra pelaksana.

Kurangnya kolaborasi lintas sektor turut memperlemah pengawasan dan jaminan kualitas program MBG. Ketika terjadi kasus keracunan massal di sebuah SD di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Kesehatan setempat mengaku tidak dilibatkan sejak awal pelaksanaan program. Dalam praktiknya, pengelolaan menu, penyediaan tenaga ahli gizi, hingga distribusi makanan sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab dapur SPPG, tanpa mekanisme koordinasi yang memadai dengan pemerintah daerah.

Ekosistem dapur SPPG memiliki persoalan lain: belum menjawab kebutuhan akan tenaga ahli gizi yang kompeten. Dalam beberapa kasus, sarjana gizi yang baru lulus direkrut untuk mengawasi kandungan nutrisi harian tanpa supervisi yang memadai. Bahkan, praktik penempatan lulusan di bidang yang tidak relevan ditemukan dalam program MBG, seperti sarjana pendidikan atau lulusan SMA yang dibekali pelatihan tiga bulan untuk menjalankan fungsi sebagai pengawas gizi. Situasi ini tentu berisiko tinggi karena penyusunan menu diserahkan kepada tenaga yang tidak memiliki kompetensi profesional atau sertifikasi terkait gizi. Akibatnya, kandungan gizi dalam setiap porsi MBG berpotensi tidak memenuhi standar nutrisi yang ditetapkan.

# 5

## DAMPAK IMPLEMENTASI PROGRAM MBG



## 5. DAMPAK IMPLEMENTASI PROGRAM MBG

### 5.1 Dampak MBG kepada penerima manfaat

#### Dampak pada siswa

Dalam pelaksanaan dan implementasinya, penerima manfaat, khususnya siswa, merasakan berbagai dampak dari program MBG. Salah satu siswa SMP Gapai Cita, Provinsi DIY, menyatakan setelah makan MBG merasa lebih bersemangat lagi. Selain itu, siswa juga mengatakan bisa menghemat uang saku selama diberikan MBG. Dampak ini juga dirasakan oleh siswa SDN 1 Donohudan di Boyolali, Jawa Tengah, saat awal pembagian MBG dilakukan di sekolahnya. Siswa menyebut bisa menghemat uang jajan dan senang bisa makan bersama teman-temannya.<sup>112</sup> Keuntungan MBG bagi siswa sebatas bersifat pragmatis, seperti penghematan uang saku dan kesenangan makan bersama. Nyatanya, dampak negatifnya lebih signifikan dan langsung menyasar kesehatan serta keselamatan siswa, di antaranya meliputi risiko keracunan makanan dan sajian tidak higienis, trauma psikologis karena mengalami keracunan makanan, serta terganggunya aktivitas belajar mengajar karena keterlambatan pendistribusian MBG.

#### Dampak pada guru

Guru di sekolah yang berperan sebagai ujung tombak proses pendistribusian MBG di sekolah juga menerima dampak yang nyata. Dalam implementasinya, guru mengalami gangguan aktivitas belajar mengajar karena waktu yang dialokasikan untuk mengurus MBG.<sup>113</sup> Selain itu, guru di sejumlah daerah juga mengalami keracunan hidangan MBG misalnya di daerah Sleman<sup>114</sup> dan Malang.<sup>115</sup> Tidak hanya itu, sejumlah guru-guru honorer juga merasakan ketidakadilan karena keputusan pemerintah untuk mengangkat pegawai SPPG menjadi ASN PPPK.<sup>116</sup> Dilansir dari BBC News Indonesia, sebanyak 32 ribu pegawai inti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Hal ini menjadi sorotan karena guru honorer yang berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar harus menunggu bertahun-tahun lamanya untuk bisa diangkat sebagai ASN.

#### Dampak pada orang tua

Program MBG ini tidak hanya memberikan dampak pada guru dan siswa, tetapi juga pada orang tua. Orang tua siswa SD Pagi di Kota Waingapu, NTT, yang mayoritas bekerja sebagai petani pasar, merasa terbantu dengan adanya program ini, karena tidak perlu lagi menyiapkan bekal maupun memberikan

<sup>112</sup> "Siswa Happy Program Makan Bergizi Gratis Prabowo: Bisa Menghemat Uang!" *CNBC Indonesia*, diakses pada 20 September 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20250106140205-33-601068/siswa-happy-program-makan-bergizi-gratis-prabowo-bisa-menghemat-uang>

<sup>113</sup> "P2G: Beban Guru Jadi Berat Kalau Terlibat MBG, Jam Belajar Ikut Berkurang," *Kompas.com*, diakses pada 01 Desember 2025, <https://www.kompas.com/edu/read/2025/09/30/195145371/p2g-beban-guru-jadi-berat-kalau-terlibat-mbg-jam-belajar-ikut-berkurang>

<sup>114</sup> "Dua Guru SMP di Sleman Juga Keracunan Usai Santap MBG," *Kompas.com*, diakses pada 01 Desember 2025, <https://yogyakarta.kompas.com/read/2025/08/27/192522878/dua-guru-smp-di-sleman-juga-keracunan-usai-santap-mbg>

<sup>115</sup> "35 Siswa dan Guru di Malang Diduga Keracunan MBG, SPPG Disetop," *CNNIndonesia.com*, diakses pada 01 Desember 2025, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20251025165152-20-1288425/35-siswa-dan-guru-di-malang-diduga-keracunan-mbg-sppg-disetop>

<sup>116</sup> "MBG di Tengah Kontroversi: Evaluasi Dampak dan Tantangan Program Makan Bergizi Gratis," *BBC News Indonesia*, diakses pada 02 Desember 2025, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4g442xz9wno>

uang saku harian kepada anak mereka. Meskipun begitu, semenjak kasus kejadian keracunan yang menimpa siswa semakin meluas, orang tua mengalami trauma psikologis dan penurunan kepercayaan terhadap pelaksanaan program MBG di sekolah.

Susi (nama disamarkan), orang tua siswa yang bersekolah di Yogyakarta, menuturkan bahwa ia tidak berekspektasi apapun tentang program MBG ini karena telah mendengar banyak berita tentang keracunan program MBG. Susi yang berprofesi sebagai guru di salah satu sekolah di Yogyakarta ini juga menjadi korban keracunan setelah menyantap hidangan MBG. Sebagai orang tua, Susi mengakui tidak ada perubahan pola makan terhadap anaknya. Menurutnya, sebagian anak-anak memang antusias menantikan hidangan MBG. Namun, antusiasme tersebut tidak memberikan dampak signifikan terhadap taraf konsentrasi dan semangat belajar.

## 5.2 Dampak MBG kepada mitra dan SPPG

### Perburuan rente dalam program Makan Bergizi Gratis

Program MBG memakan alokasi anggaran yang sangat besar hingga 13,1 persen dari total APBN 2026. Namun, pelaksanaan program MBG yang minim pengawasan menimbulkan risiko korupsi yang tinggi. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh para pemburu rente.

### Pekerja perempuan SPPG rentan eksploitasi dan pelecehan

Pekerja perempuan di Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) rentan mengalami eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan. Pemerintah khususnya Badan Gizi Nasional (BGN) seharusnya memenuhi hak-hak dan perlindungan para pekerja, dalam hal ini para pekerja perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program MBG yang melibatkan pekerja perempuan di dapur penyedia pangan dan gizi di SPPG. Beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi baik di SPPG Jatiasih dan Bekasi mengungkap realita kerentanan pekerja perempuan. Perempuan pekerja dalam program MBG juga rentan mengalami berbagai eksploitasi, misalnya upah dan jam kerja yang tidak jelas atau minimnya perlindungan dan keselamatan kerja. Jumlah perempuan pekerja di dapur MBG mencapai 55 persen dari total 40 ribu pekerja di SPPG.<sup>117</sup>

## 5.3 Dampak MBG terhadap lingkungan eksternal

### Permasalahan *food-waste*

Menu MBG tidak selalu disukai oleh penerima manfaatnya sehingga berpotensi menjadi sampah makanan yang menumpuk. Hal ini disebabkan oleh menu MBG yang tidak sesuai dengan preferensi penerima manfaat: rasa makanan yang tidak cocok dengan selera anak atau standar porsi yang tidak pas dengan individu berdasarkan usianya. Berdasarkan data dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) tahun 2024, potensi *food waste* atau sisa makanan dari program MBG diperkirakan mencapai 1,1 juta sampai 1,4 juta ton per tahun.<sup>118</sup> Jika menu MBG tidak dirancang secara cermat, maka akan menimbulkan peningkatan sampah makanan.

<sup>117</sup> "Rentan Eksploitasi di Program MBG, Sudahkah Hak Perempuan Terpenuhi?," *KBR.ID*, diakses pada 03 Desember 2025, <https://kbr.id/articles/indeks/perempuan-rentan-eksploitasi-di-program-mbg-sudahkah-hak-mereka-terpenuhi->

<sup>118</sup> "Bapanas Perkirakan Sisa Makanan Program MBG Capai 1,4 Juta Ton per Tahun," *Kompas.com*, diakses pada 03 Desember 2025, <https://money.kompas.com/read/2025/05/27/133100026/bapanas-perkirakan-sisa-makanan-program-mbg-capai-1-4-juta-ton-per-tahun>

Data dari Sistem Informasi Pengendalian Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2024 menunjukkan bahwa, limbah makanan menyumbang 39.36 persen dari total 35,02 juta ton sampah nasional. Bahkan UNEP Food Waste Indeks Report tahun 2024 menyebut bahwa Indonesia menempati posisi kelima penyumbang sampah makanan terbesar di dunia.<sup>119</sup> Jika sampah makanan dari program Makan Bergizi Gratis ini tidak dikelola dengan baik, maka berpotensi menambah volume sampah pangan di Indonesia.

Data dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), menyatakan bahwa program MBG menargetkan sekitar 17 juta siswa pada tahun 2025.<sup>120</sup> Setiap siswa diprediksi menghasilkan sisa makanan sekitar 25 hingga 50 gram per hari. Hasil survei dari Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia memperkirakan potensi timbunan sampah makanan dari program MBG mencapai 2.400 ton/hari atau 624.000 ton/tahun. Sampah makanan program MBG yang tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti menambah angka emisi gas rumah kaca hingga 200.706 ton Co2 ekuivalen/tahun.<sup>121</sup> Sekitar 26 persen dari total emisi gas rumah kaca berasal dari limbah makanan manusia. Tentunya sampah makanan dari program MBG ini akan memperburuk catatan emisi Indonesia.

### **Dampak MBG terhadap UMKM**

Program MBG yang digagas pemerintah berfokus pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan. Namun, MBG juga memiliki implikasi ekonomi yang besar terhadap kelangsungan pertumbuhan bisnis UMKM di Indonesia. MBG dirancang dengan pendekatan rantai pasok lokal yang memungkinkan pelaku usaha lokal untuk menyediakan bahan pangan dan jasa pengolahan untuk program MBG. Peran ini menempatkan UMKM sebagai aktor ekonomi utama dalam pelaksanaan program MBG, bukan sebagai objek pasif.

Potensi dampak positif MBG terhadap pengembangan UMKM, yakni meningkatkan pendapatan dan omzet, menciptakan lapangan pekerjaan, dan menguatkan rantai pasok lokal. Namun, program MBG ini juga menciptakan dampak negatif pada UMKM, misalnya impor alat makan berpotensi mematikan usaha produsen lokal.<sup>122</sup> Selain itu, keterlibatan pelaku UMKM juga tidak sampai 10 persen.<sup>123</sup>

---

<sup>119</sup> *Stop Food Waste Day: Seberapa Darurat Masalah Sampah Makanan di Indonesia?* diakses dari <https://nationalgeographic.grid.id/read/134375089/stop-food-waste-day-seberapa-darurat-masalah-sampah-makanan-di-indonesia> pada 6 Mei 2026

<sup>120</sup> "Program Makan Gratis Berpotensi Menambah Food Waste," *Bebassampah.id*, diakses pada 28 Februari 2026, <https://bebassampah.id/perpustakaan/2033/program-makan-gratis-berpotensi-menambah-food-waste>

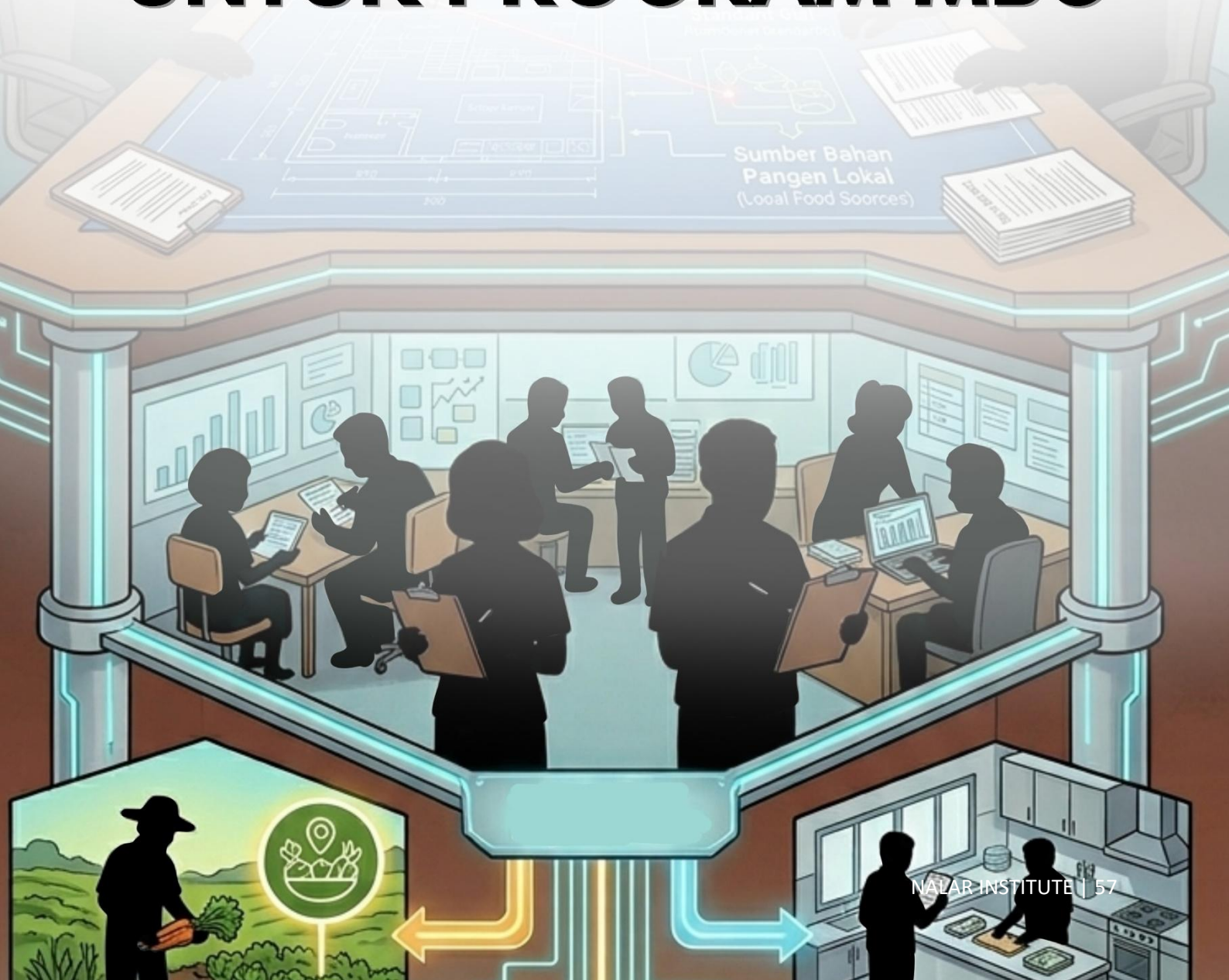
<sup>121</sup> *Ibid.*

<sup>122</sup> "Bagaimana UMKM Terpinggirkan di Proyek MBG," *Tempo.co*, diakses pada 03 Desember 2025, <https://www.tempo.co/ekonomi/dampak-mbg-umkm--2060483>

<sup>123</sup> "Bagaimana Program MBG Mengubah Pola Makan Anak Sekolah di Indonesia," *BBC News Indonesia*, diakses pada 03 Desember 2025, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/czngx1rx2pxo>

# 6

## REKOMENDASI KEBIJAKAN UNTUK PROGRAM MBG



## 6. REKOMENDASI KEBIJAKAN UNTUK PROGRAM MBG

- **Evaluasi keluaran MBG yang telah berjalan selama satu tahun**

Selama setahun, program MBG telah menjangkau hampir 35.000 sekolah di 38 provinsi. Guna menilai apakah program MBG telah mencapai tujuan awalnya—memperbaiki status gizi anak-anak Indonesia dan penurunan angka tengkes—diperlukan evaluasi dampak secara komprehensif. Hal ini dibutuhkan agar publik mengetahui apakah program MBG yang menggunakan dana publik benar-benar telah memberikan manfaat.
- **Memperkuat payung hukum dengan membuat regulasi turunan di tingkat daerah.**

Sejak awal peluncuran, program MBG tidak memiliki payung hukum yang kuat. Hingga akhir tahun 2025, belum ada regulasi turunan untuk mengimplementasikan MBG di tingkat daerah. Beberapa temuan dari penelitian menunjukkan bahwa aturan yang ditujukan kepada pemerintah daerah hanya sebatas surat edaran. Setelah payung hukum tata kelola program sudah diimplementasikan di tingkat pusat, perlu ada regulasi turunan yang mengadopsi petunjuk pelaksanaan dari pusat ke daerah. Hal ini bertujuan agar program MBG dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks lokal, misalnya penyusunan menu makanan yang mencerminkan kekhasan kuliner setiap daerah.
- **Pelaksanaan program MBG memerlukan kolaborasi lintas aktor**

Program MBG dinilai kurang melibatkan pemerintah daerah—yang seharusnya menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi program MBG di lapangan. Penanganan berbagai kasus keracunan yang terjadi mengungkap fakta bahwa dinas kesehatan dan dinas pendidikan setempat tidak dilibatkan. Padahal, kedua instansi ini memiliki tanggung jawab yang relevan. Perpres Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Pasal 19 menegaskan bahwa program ini MBG bersifat terdesentralisasi sehingga dinas-dinas terkait harus dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaannya.
- **Monitoring perlu dilakukan secara lebih ketat dan konsisten**

Kasus keracunan yang masih terus berulang hingga tahun 2026 memberi sinyal bahwa pemerintah belum melakukan monitoring program MBG secara komprehensif. Maka dari itu, monitoring perlu dilakukan secara rutin untuk memastikan dapur SPPG bekerja sesuai dengan SOP. Lebih lanjut, hasil monitoring harus akuntabel dan ditindaklanjuti jika terjadi penyimpangan di lapangan.
- **Perlu ada strategi pengendalian sampah makanan yang dihasilkan dari penyajian MBG**

Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk menekan dan mengolah limbah makanan MBG. Pertama, evaluasi keseluruhan menu program MBG terkait dengan selera dan kebiasaan makan setiap penerima manfaat berdasarkan usia dan wilayah tempat tinggal. Kedua, perlu adanya regulasi yang mendukung aturan teknis untuk mengelola limbah dengan berpegang pada prinsip *reuse, reduce, recycle* (3R). Ketiga, sosialisasi dan kolaborasi untuk semua perangkat pelaksana MBG, yakni sekolah, pelaku usaha pangan, komunitas lokal, UMKM penyedia bahan makanan program MBG, agar memiliki pengetahuan yang seragam terkait sistem pengolahan sampah makanan yang baik. Kelima, edukasi perilaku konsumsi untuk membentuk kebiasaan anak dan lingkungan sekolah agar mengambil makanan sesuai kebutuhan, menghabiskan makanan yang sudah diambil, dan menghargai makanan sebagai sumber gizi dan sumber energi.
- **Pemberhentian sementara program MBG sampai evaluasi menyeluruh dilakukan**

Jumlah kasus keracunan yang terus bertambah menjadi alarm peringatan bagi pemerintah bahwa program MBG mengandung cacat tata kelola yang serius. Hingga awal tahun 2026, kasus keracunan

yang dialami oleh siswa penerima manfaat program MBG masih terus bertambah tanpa tanda-tanda akan mereda. Oleh karena itu, penghentian sementara perlu dilakukan agar program MBG tidak menimbulkan korban yang lebih besar. Langkah ini juga harus diambil sebagai upaya mencegah pemborosan anggaran negara.

- **Kolaborasi masyarakat sipil dan penerima manfaat sebagai pengawas implementasi program MBG**  
Masyarakat sipil dan penerima manfaat perlu terus berkolaborasi mengawasi implementasi program MBG. Setiap kritik dan saran sebaiknya disampaikan melalui kanal media terbuka. Di sisi lain, pemerintah perlu mewadahi aspirasi masyarakat dan tidak melakukan represi atas kritik yang disuarakan.

\*\*\*



# DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal

- Farhan, A. U., Hafizhah, R. D., & Aji, A. S. 2024. The Association of Current Knowledge on Gene-Based Nutrition Services with Involvement and Confidence Levels among Nutrition Workers in Indonesia. <https://doi.org/10.20473/amnt.v8i1.2024.116-123>
- Firda, I. M. S., Heryani, S., Mutiara, N. I. J. B., Permatasari, H. N., Firdaus, M. F., Sevtian, D., & Herdiana, D. 2025. Formulasi Kebijakan Publik: Konsep dan Penelitian. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i6.324>
- Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI). 2025. Policy Paper Series: Mengkaji Program Makan Bergizi Gratis – Pentingnya Penguatan Tata Kelola, Regulasi, dan Monitoring Evaluasi pada Program Makan Bergizi Gratis. <https://cisdi.org/riset-dan-publikasi/publikasi/dokumen/seri-dua-kajian-makan-bergizi-gratis>
- OECD (2024), LOGIC: Good Practice Principles for Mainstreaming Behavioural Public Policy, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/6cb52de2-en>

## Buku

- Hill, Michael, and Peter Hupe. 2014. *Implementing Public Policy: An Introduction to the Study of Operational Governance*. 3rd ed. London: Sage.
- Lipsky, Michael. *Street-Level Bureaucracy*. New York: Russell Sage Foundation, 2010.
- Parsons, Wayne. 1995. *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Parsons, Wayne. 2008. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Pradana, Aditya Wisnu, Amalia Sevatita, Anugerah Yuka Asmara, Arief Anshory Yusuf, Derry Pantjadarma, Dudi Hidayat, Fajri Siregar, Inaya Rakhmani, Leonardus K. Nugraha, Rivandra Royono, dan Yanuar Nugroho. *Cetak Biru Ekosistem Pengetahuan & Inovasi*. Jakarta: Ristek-BRIN, KemenPPN/Bappenas, KemenPAN-RB, Februari 2021.
- Thaler, Richard H., and Cass R. Sunstein. 2008. *Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness*. New Haven, CT: Yale University Press.

## Media Daring

- Achmad, N., & Djumena, E. 2025. *BGN Hapus Sistem Reimbursement MBG, Diganti dengan Virtual Account*. <https://money.kompas.com/read/2025/05/06/173900026/bgn-hapus-sistem-reimbursement-mbg-diganti-dengan-virtual-account>
- Ahadian, U. 2015. *Penelitian FAO: 19,4 Juta Penduduk Indonesia Masih Mengalami Kelaparan*. <https://www.voaindonesia.com/a/pemelitian-fao-sembelan-belas-koma-empat-juta-penduduk-indonesia-masih-mengalami-kelaparan/2817021.html>
- Al Machmudi, M. 2025. *Prinsip Manajemen Keamanan Pangan HACCP Harus Diterapkan pada Program MBG*. <https://mediaindonesia.com/humaniora/771543/prinsip-manajemen-keamanan-pangan-haccp-harus-diterapkan-pada-program-mbg>
- Anggraeni, R. 2025. *Mitra MBG Gelembungkan Anggaran Lebih Tinggi dari Harga Pasar*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250819/12/1903727/mitra-mbg-gelembungkan-anggaran-lebih-tinggi-dari-harga-pasar>
- ANTARA News. 2025. *Ingin Daftar SPPI 2025? Ini Mekanisme Seleksi dan Syarat Lengkapnya*. <https://www.antaraneews.com/berita/4576930/ingin-daftar-sp-pi-2025-ini-mekanisme-seleksi-dan-syarat-lengkapnya>
- ANTARA News. 2025. *Kepala BGN: Mulai Februari, MBG Tak Lagi Pakai Mekanisme Reimburse*. <https://www.antaraneews.com/berita/4608982/kepala-bgn-mulai-februari-mbg-tak-lagi-pakai-mekanisme-reimburse>
- ANTARA News. 2025. *Ombudsman RI Sebut Mitra Masih Bisa Untung Rp2.000 per Porsi MBG*. <https://www.antaraneews.com/berita/4834281/ombudsman-ri-sebut-mitra-masih-bisa-untung-rp2000-per-porsi-mbg>
- Asia-Pacific Solidarity. 2025. *BGN: Nutritionist Shortage Emerges amid Indonesia's Free Meal Program Rollout*. <https://www.asia-pacific-solidarity.net/index.php/news/2025-11-13/bgn-nutritionist-shortage-emerges-amid-indonesias-free-meal-program-rollout.html>
- Ayuningrum, R. 2025. *Biaya Makan Bergizi Gratis Tetap Rp10 Ribu/Porsi atau Naik? Ini Jawabannya*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8102346/biaya-makan-bergizi-gratis-tetap-rp-10-ribu-porsi-atau-naik-ini-jawabannya>

- BBC News Indonesia. 2025. *Pengakuan Petugas MBG: Tak Punya Kontrak Kerja, Jam Kerja Tak Menentu, dan Telat Terima Gaji*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cm27rj2k4zdo>
- Bebassampah.id. 2026. *Program Makan Gratis Berpotensi Menambah Food Waste*.  
<https://bebassampah.id/perpustakaan/2033/program-makan-gratis-berpotensi-menambah-food-waste>
- Chairunnisa, N. 2025. *Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 335 Triliun untuk Intervensi Gizi hingga Digitalisasi*.  
<https://www.tempo.co/politik/anggaran-makan-bergizi-gratis-rp-335-triliun-untuk-intervensi-gizi-hingga-digitalisasi-2060952>
- CNN Indonesia. 2025. *Ahli Gizi Sebut Mustahil MBG Tanpa Kasus Keracunan*.  
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20251119173347-92-1297220/ahli-gizi-sebut-mustahil-mbg-tanpa-kasus-keracunan>
- CNN Indonesia. 2025. *Fakta-fakta Makan Gratis: Curhat Rasa Hambar hingga Sistem Reimburse*.  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250108063924-20-1184848/fakta-fakta-makan-gratis-curhat-rasa-hambar-hingga-sistem-reimburse>
- CNN Indonesia. 2025. *Prabowo Sebut MBG Jangkau 49 Juta Penerima: 7 Kali Penduduk Singapura*.  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20251206103232-20-1303498/prabowo-sebut-mbg-jangkau-49-juta-penerima-7-kali-penduduk-singapura>
- Darmanto. 2025. *Mayoritas SPPG di Kab Bandung Belum Memiliki SLHS, Proses Sertifikasi Lambat*.  
<https://www.radarbandung.id/2025/11/17/mayoritas-sppg-di-kab-bandung-belum-memiliki-slhs-proses-sertifikasi-lambat/>
- detikJogja. 2025. *Sederet Fakta Heboh Surat Perjanjian SPPG Minta Rahasiakan Kasus Keracunan*.  
<https://www.detik.com/jogja/berita/d-8122247/sederet-fakta-heboh-surat-perjanjian-sppg-minta-rahasiakan-kasus-keracunan>
- DWN. 2025. *Optimalkan Program MBG, Pemerintah Perkuat Tata Kelola BGN*.  
<https://nasional.kompas.com/read/2025/12/04/12384431/optimalkan-program-mbg-pemerintah-perkuat-tata-kelola-bgn>
- Fauziyah, T., & Ihsanuddin. 2026. *803 Siswa Keracunan, Satgas Jateng Evaluasi Pelaksanaan MBG di Grobogan*.  
<https://regional.kompas.com/read/2026/01/15/193233178/803-siswa-keracunan-satgas-jateng-evaluasi-pelaksanaan-mbg-di-grobogan>
- Hidayati, Nurul. 2025. *Prosedur Ketat Mendapatkan SLHS, Verifikasi Berlapis dan Uji Laboratorium Wajib bagi SPPG*.  
<https://lombokpost.jawapos.com/nasional/2510080100/prosedur-ketat-mendapatkan-slhs-verifikasi-berlapis-dan-uji-laboratorium-wajib-bagi-sppg>
- Hukumonline. 2026. *Kriteria Pegawai MBG Jadi PPPK*.  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/kriteria-pegawai-mbg-jadi-pppk-lt6968d30d9f240>
- Kasmara, I. 2025. *Pro Kontra Insentif Guru Penanggung Jawab MBG*.  
<https://rm.id/baca-berita/blakblakan/284783/pro-kontra-insentif-guru-penanggung-jawab-mbg-iman-zanatul-haeri-kami-menolak-guru-jadi-penanggung-jawab>
- Kompas. 2026. *Mengapa Hampir Separuh Anggaran Pendidikan untuk Program MBG dan Bagaimana Dampaknya*.  
<https://www.kompas.id/artikel/mengapa-hampir-separuh-anggaran-pendidikan-untuk-program-mbg-dan-bagaimana-dampaknya>
- KumparanNEWS. 2025. *BGN Ungkap Pemicu Keracunan Massal MBG: 80% SPPG Tak Jalankan SOP*.  
<https://kumparan.com/kumparannews/bgn-ungkap-pemicu-keracunan-massal-mbg-80-sppg-tak-jalankan-sop-25uwKmPxEDm>
- Leila, L. 2026. *SPPG Akan Diangkat Jadi PPPK, Ini Kriteria dan Skema Gajinya*.  
<https://www.beritasatu.com/nasional/2958013/sppg-akan-diangkat-jadi-pppk-ini-kriteria-dan-skema-gajinya>
- Mardianti, D. L. 2025. *Pemerintah Wajibkan Dapur MBG Punya Sertifikat Layak Higiene Sanitasi*.  
<https://www.tempo.co/politik/pemerintah-wajibkan-dapur-mbg-punya-sertifikat-layak-higiene-sanitasi-2074178>
- Muhamad, N. 2026. *Ada 21 Ribu Unit SPPG hingga Awal 2026, Ini Tren Bulanannya*.  
<https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/6970a62d95986/ada-21-ribu-unit-sppg-hingga-awal-2026-ini-tren-bulanannya>

- News Desk. 2024. *Indonesia Ranks 77th in Global Hunger Levels*.  
<https://www.thejakartapost.com/indonesia/2024/11/07/indonesia-ranks-77th-in-global-hunger-levels.html>
- NV Wahyu, T. 2026. *BGN Sebut SPPG Banaran Langgar SOP: Sudah Tahu Ada Kandang Babi Masih Nekat*.  
<https://www.detik.com/jateng/berita/d-8298057/bgn-sebut-sppg-banaran-langgar-sop-sudah-tahu-ada-kandang-babi-masih-nekat>
- Pasaribu, Q. 2026. *Korban Keracunan MBG Sepanjang Januari 2026 Tembus Hampir 2.000 Pelajar, Mengapa Krisis Masih Saja Terjadi?*  
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cvg5eywd109o>
- Rimadi, L. 2025. *Prabowo Sebut MBG Dinikmati 44 Juta Orang, Produksi Capai 2 Miliar Porsi*.  
<https://www.liputan6.com/news/read/6223985/prabowo-sebut-mbg-dinikmati-44-juta-orang-produksi-capai-2-miliar-porsi>
- Robert, E. 2025. *Puluhan Ribu Pegawai SPPG Akan Diangkat Jadi ASN, Bagaimana Nasib Guru Honorer yang Tak Punya Kepastian Kerja?*  
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4g442xz9wno>
- Rizky, Inge, N., Saputra, Y., & Aidil, M. 2026. *Ribuan Siswa Keracunan Makan Bergizi Gratis, Orang Tua Trauma dan Larang Anaknya Konsumsi MBG*.  
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cm2zney05ypo>
- Safitri, E. 2025. *BGN Ungkap Kelangkaan Ahli Gizi, Minta Persagi Isi Kekosongan untuk SPPG*.  
<https://news.detik.com/berita/d-8223725/bgn-ungkap-kelangkaan-ahli-gizi-minta-persagi-isi-kekosongan-untuk-sppg>
- Safitri, K., & Belarminus, R. 2025. *Penantian Ahli Gizi untuk Dilibatkan dalam Program MBG*.  
<https://nasional.kompas.com/read/2025/11/18/16264281/penantian-ahli-gizi-untuk-dilibatkan-dalam-program-mbg>
- Silambona, S. 2025. *Skor PISA Indonesia Masih Rendah, Dikhawatirkan Disalip Vietnam–Timor Leste*.  
<https://www.detik.com/edu/sekolah/d-8257399/skor-pisa-indonesia-masih-rendah-dikhawatirkan-disalip-vietnam-timor-leste>
- Siregar, S., & Sembiring, H. 2025. *Pedagang di Lubuk Pakam Nilai Harga Rp 10 Ribu untuk Program MBG Tak Realistis*.  
<https://mistar.id/news/sumut/pedagang-di-lubuk-pakam-nilai-harga-rp10-ribu-untuk-program-mbg-tak-realistis>
- Syafei, F., & Meiliana, D. 2025. *Menu MBG Rp 10.000 Disebut Cukup, Begini Realita Jika Beli di Warteg*.  
<https://bandung.kompas.com/read/2025/10/18/073904178/menu-mbg-rp-10000-disebut-cukup-begini-realita-jika-beli-di-warteg-di>
- Tribun Sumsel. 2025. *Viral Dapur SPPG di Blora Disorot karena Dinilai Tidak Higienis, Belum Punya Ahli Gizi*.  
<https://www.youtube.com/watch?v=1eeSj69Pval>
- Trikarinaputri, Ervana. 2025. *Menkes Minta Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Dapur MBG Dipercepat*.  
<https://www.tempo.co/politik/menkes-minta-penerbitan-sertifikat-laik-higiene-sanitasi-dapur-mbg-dipercepat-2075148>
- Uly. 2025. *Kemendikdasmen Perkuat Implementasi Program MBG Lewat Peluncuran Enam Modul Edukasi Gizi*.  
<https://kemendikdasmen.go.id/siaran-pers/14248-kemendikdasmen-perkuat-implementasi-program-mbg-lewat-pelunc>
- Wibowo, Teguh Imam, dan Gunawan. 2025. *Koordinator SPPG Blora Instruksikan Benahi Dapur MBG Belum Standar*.  
<https://jateng.antaranews.com/berita/603309/koordinator-sppg-blora-instruksikan-benahi-dapur-mbg-belum-standar>
- Wisnubroto, K. 2026. *Ini Tiga Skema Penyaluran Makan Bergizi Gratis*.  
<https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8750/ini-tiga-skema-penyaluran-makan-bergizi-gratis?lang=1>
- Yanwardhana, Emir. 2025. *Siswa Happy Program Makan Bergizi Gratis Prabowo: Bisa Menghemat Uang!*  
<https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20250106140205-33-601068/siswa-happy-program-makan-bergizi-gratis-prabowo-bisa-menghemat-uang>

